



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN

Konsumsi rokok dan konsumsi produk tembakau lainnya merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Kebiasaan merokok merupakan ciri sebagian laki-laki dewasa di Indonesia. Berbagai upaya pengendalian konsumsi tembakau dilakukan secara bertahap dan terintegrasi melibatkan sektor pemerintah dan non pemerintah. Dalam upaya pengendalian konsumsi tembakau diperlukan fakta terkini di sektor kesehatan, industri dan pertanian. Oleh karena itu, buku yang mengemukakan fakta-fakta penting terkait rokok dan produk tembakau lainnya tentu akan sangat bermanfaat.

Buku Bunga Rampai Fakta Tembakau dan Permasalahannya di Indonesia Tahun 2012 ini adalah buku keempat yang diterbitkan *Tobacco Control Support Center* - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Buku pertama diterbitkan tahun 2004, buku kedua diterbitkan tahun 2007, dan buku ketiga tahun 2010. Buku keempat ini memuat data dan informasi sampai dengan pertengahan tahun 2012 serta mengungkapkan secara lebih luas dan mendalam tentang: Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya, Dampak Kesehatan dan Ekonomi Tembakau, Pertanian Tembakau, Industri Tembakau, Kebijakan Cukai Rokok dan Manfaatnya, dan Kebijakan Pengendalian Tembakau.

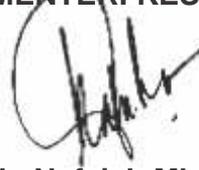
Saya berharap buku ini bermanfaat bagi para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan di sektor pemerintah maupun non pemerintah, serta masyarakat luas. Fakta yang dimuat dalam buku ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang tepat agar berpihak kepada rakyat. Informasi

dalam buku ini juga dapat digunakan sebagai bahan advokasi, pendidikan masyarakat, dan promosi kesehatan oleh semua pihak terutama oleh masyarakat madani di Indonesia. Fakta yang tertuang dalam buku ini juga dapat menjadi bahan untuk meningkatkan kesadaran semua pihak akan pentingnya mengutamakan kesehatan masyarakat di atas kepentingan bisnis.

Kepada semua pihak yang telah dengan tekun menyusun buku Bunga Rampai Fakta Tembakau dan Permasalahannya di Indonesia Tahun 2012 ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan. Jerih payah, kerja keras, dan kerja cerdas Saudara-saudara adalah bagian dari upaya melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya tembakau.

Jakarta, 28 Oktober 2012

MENTERI KESEHATAN RI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nafsiah Mboi', written over a faint circular stamp or watermark.

dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah akhirnya Buku Fakta Tembakau 2012 dapat diterbitkan. Buku ini merupakan pemutakhiran data mengenai tembakau dan rokok di Indonesia dari yang pernah diterbitkan dalam buku serupa di tahun 2004, 2007 dan 2010. Dalam penerbitan kali ini ditambahkan juga fakta baru mengenai hasil penelitian terhadap peranan cengkeh dalam rokok kretek yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Tugas *Tobacco Control Support Center* - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC IAKMI) adalah menyajikan data ini sebagai bahan advokasi mengenai masalah tembakau dan rokok dari berbagai aspek bukan hanya aspek kesehatan saja. Buku ini dapat dipergunakan oleh semua kalangan baik dari penentu kebijakan di parlemen, pemerintah pusat dan daerah, peneliti maupun para penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Di masa yang akan datang, kami berharap semakin bertambahnya jumlah penelitian mengenai tembakau dan rokok dari aspek-aspek lain seperti sosial budaya, kesehatan mental dan kesehatan kerja sehingga pengetahuan kita mengenai masalah tembakau dan rokok akan lebih komprehensif.

Hal mendasar yang perlu dipertahankan mengenai peningkatan efektifitas dan pengembangan program yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Buku ini tersusun berkat kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan RI, BPOM, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD FEUI). Para peneliti yang menulis dalam buku ini adalah :

1. Puri Sari H, Dwi Hapsari, Farida Soetarto, Julianty Pradono, Ch. M. Kristanti dan Nunik Kusumawardani dari Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI dengan judul Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya (BAB 1)
2. Suwarta Kosen dari Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI dengan judul Dampak Kesehatan dan Ekonomi Tembakau (BAB 2)

3. Abdillah Ahsan dari LD FEUI dengan judul Pertanian Tembakau dan Cengkeh (BAB 3)
4. Abdillah Ahsan dari LD FEUI dengan judul Industri Tembakau (BAB 4)
5. Abdillah Ahsan dari LD FEUI dengan judul Kebijakan Cukai Rokok dan Manfaatnya (BAB 5)
6. Kiki Soewarso dari TCSC IAKMI dengan judul Kebijakan Pengendalian Tembakau (BAB 6), disesuaikan data situasi kebijakan pada tahun 2012 oleh dr. Widyastuti Wibisana dan Nunik Kusumawardani, PhD.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih tentu lebih layak ditujukan kepada mereka yang sudah bekerja keras menyelesaikan buku ini.

Jakarta, Oktober 2012

Ketua TCSC IAKMI



Dr. Kartono Mohamad

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan, berkat rahmat dan karunia-NYA, kami dapat menyelesaikan Pemutakhiran Buku Tembakau yang berjudul: "Fakta Tembakau, Permasalahannya di Indonesia" tahun 2012.

Buku profil tembakau ini terbit secara berkala, dimana setiap edisinya selalu dilakukan pemutakhiran data mengenai tembakau dan permasalahannya, ditinjau dari berbagai aspek seperti kesehatan, perdagangan, pertanian dan industri. Kajian di dalam buku ini menggunakan data konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya yang terbaru yaitu data *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) tahun 2009, data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2010 dan data *Global Adult Tobacco Survey* (GATS) tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan.

Buku pemutakhiran profil tembakau tahun 2012 ini, dalam setiap bab-nya diharapkan dapat menjadi rujukan mengenai tembakau dan kaitannya di bidang kesehatan, industri dan ekonomi.

Bab satu, menceritakan tentang konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di tengah masyarakat pada 33 provinsi di Indonesia berdasarkan data terkini sampai dengan tahun 2011 dari Riset Kesehatan Nasional (RISKESDAS, SUSENAS, GYTS, GATS).

Bab dua, memberikan gambaran dampak kesehatan dan ekonomi akibat konsumsi tembakau di Indonesia dengan memperkirakan beban penyakit karena tembakau menggunakan metode *Global Burden of Disease* dengan ukuran DALYs (*Disability Adjusted Life Years*/tahun produktif yang hilang).

Bab tiga, membahas pertanian tembakau dan cengkeh dengan menggunakan data terakhir sampai dengan tahun 2011. Produksi pertanian tembakau dan cengkeh dituliskan mulai dari segi produksi, lahan, pekerja, harga dan segi perdagangan.

Bab empat, menggambarkan industri pengolahan produk tembakau dengan gambaran data terakhir tahun 2011, dilihat dari segi produksi, pangsa pasar, jumlah industri, pekerja, perdagangan dan kebijakan pemerintah terkait industri produk tembakau.

Bab lima, menjelaskan tentang cukai serta harga rokok disertai gambaran tentang dampak peningkatan cukai tembakau, harga rokok, penerimaan pemerintah, rata-rata pengeluaran rumah tangga dan isu-isu yang terkait dengan cukai tembakau sampai dengan tahun 2011.

Bab enam, memfokuskan pada kebijakan pengendalian tembakau yang berisi alasan perlunya kebijakan pengendalian dan intervensi pemerintah, dampak pengendalian serta peraturan dan RUU yang ada di Indonesia, sekaligus gambaran penerapan strategi MPOWER dengan gambaran situasi kebijakan terakhir di Indonesia.

Perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan serta terima kasih yang tulus atas kontribusi dari semua pihak yang telah membantu hingga terwujudnya buku ini, terutama kepada *Tobacco Control Support Centre (TCSC-IAKMI)* yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan pemutakhiran buku tembakau ini. Terlaksananya penulisan buku ini atas dukungan finansial yang diberikan oleh TCSC-IAKMI.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam buku ini, khususnya Abdillah Ahsan SE, ME, DR. Nunik Kusumawardani, Puti Sari H, MScPH, DR. Dwi Hapsari T, DR. Suwarta Kosen, DR. Farida Soetarto, DR. dr. Julianty Pradono, Drg. Ch. M. Kristanti, MSc, dr. Kartono Mohamad, Dra. Kiki Soewarso, Drg. Antarini dan DR. dr. Widyastuti Wibisana, MScPH.

Terima kasih sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Sdri. Priska Arfines, SGz yang sudah membantu kelancaran kegiatan administrasi dan Annisa Rizkianty, SKM yang telah membantu design dan layout penulisan buku ini.

Kami menyadari masih banyak kekurangan, kelemahan dan kesalahan dalam penulisan buku ini, oleh karena itu kami mohon kritik, masukan dan saran demi penyempurnaan dan pemutakhiran buku tembakau berikutnya.

Billahit taufiq walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Jakarta, Oktober 2012
a.n. Koordinator Tim Pemutakhiran Buku Tembakau



Dr. dr. Trihono, MSc.

RINGKASAN EKSEKUTIF

KONSUMSI ROKOK, PRODUK TEMBAKAU LAINNYA DAN RISIKO SAKIT

Indonesia merupakan negara dengan konsumsi rokok terbesar di dunia, yaitu pada urutan keempat setelah China, USA dan Rusia. Jumlah batang rokok yang dikonsumsi di Indonesia cenderung meningkat dari 182 milyar batang pada tahun 2001 (Tobacco Atlas 2002) menjadi 260,8 milyar batang pada tahun 2009 (Tobacco Atlas 2012).

Secara umum, kebiasaan merokok pada masyarakat Indonesia merupakan salah satu masalah kesehatan karena konsumsi tembakau yang masih cenderung tinggi. Jumlah batang rokok sekitar 10 batang per hari merupakan angka rata-rata yang cukup tinggi untuk memberikan dampak negatif kesehatan dan ekonomi. Apabila harga per batang adalah Rp. 500 maka perokok bisa mengeluarkan biaya sekitar Rp. 5000 per hari atau Rp. 150 ribu per bulan untuk membeli rokok saja. Sementara beban biaya yang berkaitan dengan penyakit akibat rokok seperti gangguan pernafasan dan paru-paru akan lebih mahal dari yang sudah dibelanjakan untuk rokok, bukan hanya dari biaya pengobatan tetapi juga biaya hilangnya hari atau waktu produktivitas kerja untuk usia pekerja.

Sementara dari sisi prevalensi (%), masalah merokok cenderung meningkat pada tahun 2010 (34,7%) dibandingkan data survei tahun 1995 (27%), meskipun ada sedikit sekali penurunan dari 5,2% tahun 2007 ke 4,2% tahun 2010 pada populasi perempuan. Apabila target pemerintah untuk menurunkan prevalensi merokok sebesar 1% per tahun maka hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah dan memerlukan upaya yang cukup besar dengan melibatkan berbagai pihak, penerapan multi strategi dan kepemimpinan yang tegas dan terarah.

Besaran masalah konsumsi tembakau berbeda antara laki-laki dan perempuan. Prevalensi (%) merokok cenderung stabil tinggi (diatas 50%) dan meningkat sejak tahun 1995 (53,4%) sampai dengan tahun 2010 (65,9%) pada laki-laki. Sementara pada perempuan, peningkatan tajam terjadi pada tahun 2004 dan 2007 (4,5% dan 5,2%) dibandingkan tahun 1995 dan 2001 (1,7% dan 1,3%), dan setelah itu menurun pada tahun 2010 (4,2%). Pada kelompok perempuan, prevalensi yang cukup tinggi pada tahun 2007 dan 2010 kemungkinan besar berkaitan dengan konsumsi tembakau kunyah pada kelompok usia lanjut.

Bila dilihat berdasarkan kelompok umur, terlihat peningkatan prevalensi yang cukup tinggi pada kelompok remaja laki-laki usia 15 – 19 tahun atau usia sekolah SMP, SMA, dan perguruan tinggi dari 13,7% pada tahun 1995 sampai dengan 38,4% pada tahun

2010. Hal ini berkaitan dengan sifat remaja laki-laki yang lebih cenderung mengambil risiko, adanya kekuatan '*peer pressure*', rasa ingin tahu yang lebih tinggi, serta pengaruh lingkungan keluarga. Sementara pada perempuan prevalensi lebih tinggi dan meningkat pada kelompok usia lebih tua (50 tahun ke atas), yang kemungkinan berkaitan dengan kebiasaan konsumsi tembakau kunyah di beberapa daerah di Indonesia.

Secara umum, dilihat dari prevalensi konsumsi tembakau, tampak ada kecenderungan prevalensi yang lebih tinggi pada daerah pedesaan, pendidikan rendah dan kuintil pendapatan yang lebih rendah dari tahun 1995 sampai dengan 2010. Meskipun demikian, terjadi pola prevalensi yang berlawanan bila dilihat dari jumlah batang rokok yang dihisap, yaitu rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap dalam sehari lebih tinggi pada populasi dengan pendidikan lebih tinggi, ekonomi lebih tinggi dan bekerja. Dapat diartikan hal ini berkaitan dengan daya beli dari masyarakat dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi.

Masalah merokok pada usia remaja dapat dilihat dari hasil GYTS (*Global Youth Tobacco Survey*) yang menunjukkan angka prevalensi merokok yang cukup tinggi dan meningkat mendekati prevalensi merokok pada orang dewasa, bahkan lebih tinggi pada remaja perempuan (6,4%) dibandingkan perempuan dewasa (4,2%). Masalah merokok pada remaja laki-laki cenderung pada tingginya angka prevalensi perokok aktif (41%). Sementara pada remaja perempuan permasalahan lebih kepada umur pertama kali merokok kurang dari 10 tahun (24,9%) dan tingkat adiksi (6,6%) yang lebih tinggi dibandingkan remaja laki-laki (4%) dari GYTS tahun 2009. Prevalensi perokok aktif yang sudah merasakan efek adiksi dari rokok meningkat tinggi pada remaja perempuan dari 1,6% pada tahun 2006 menjadi 6,6% pada tahun 2009. Meskipun demikian, perlu berhati-hati dalam membandingkan antara survei GYTS 2006 dan 2009 karena lokasi penelitian yang berbeda, dimana GYTS 2006 hanya mencakup wilayah Sumatera dan Jawa, sedangkan GYTS 2009 meliputi wilayah Sumatera, Mentawai dan Madura.

Besarnya masalah rokok bervariasi di tiap provinsi di Indonesia, baik pada populasi laki-laki dan perempuan. Variasi di tiap provinsi ini erat kaitannya dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat, baik pada konsumsi tembakau hisap maupun kunyah.

Perokok pasif merupakan salah satu permasalahan penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama pada kelompok rentan seperti usia balita, anak sekolah dan populasi perempuan. Meskipun terjadi penurunan prevalensi terpapar asap rokok di dalam rumah pada tahun 2010 dibandingkan survei tahun sebelumnya, jumlah yang terpapar cukup tinggi mencapai 92 juta penduduk Indonesia, sementara jumlah total perokok aktif adalah lebih dari 58 juta orang.

Besaran permasalahan rokok yang sudah ada dapat menjadi dasar bagi para pemerhati masalah rokok dan pelaksana program kesehatan di tingkat pemerintahan maupun non-pemerintah serta lembaga terkait lainnya untuk lebih meningkatkan efektifitas program dan pengembangan program yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, terutama untuk kelompok-kelompok rentan (anak usia sekolah, lansia, perempuan, pendidikan rendah dan ekonomi kurang, serta di pedesaan) disamping juga untuk populasi secara keseluruhan.

PERTANIAN TEMBAKAU

Secara global, produksi daun tembakau mengalami penurunan. Penurunan yang serupa terjadi juga di Indonesia, yaitu dari 156 ribu ton di tahun 1990 menjadi 135 ribu ton di tahun 2010. Berdasarkan komposisi produksi, provinsi penghasil daun tembakau di Indonesia tidak berubah. Produksi daun tembakau terkonsentrasi di lima provinsi, yaitu Jawa Timur, NTB, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Utara, dimana Jawa Timur menyumbang hampir 40% produksi daun tembakau nasional.

Selain produksi daun tembakau, proporsi lahan pertanian tembakau terhadap total lahan pertanian juga menurun dari 0.52% di tahun 1990 menjadi 0,38 di tahun 2009. Artinya ketersediaan lahan yang sedia ditanami tembakau semakin menurun.

Selain penurunan produksi daun tembakau dan proporsi lahan pertanian tembakau, terjadi juga pergeseran komposisi pekerja secara agregat dari sektor pertanian ke sektor lain. Namun untuk sektor pertanian tembakau, jumlah pekerja di sektor pertanian tembakau berfluktuasi. Selama sepuluh tahun terakhir (2000 – 2010) terjadi kenaikan jumlah petani tembakau secara absolut maupun relatif terhadap jumlah seluruh pekerja, dari 665 ribu menjadi 689 ribu atau terjadi kenaikan sebesar 3,61%. Dalam kurun waktu yang sama pula, proporsi petani tembakau terhadap pekerja sektor pertanian tidak berubah, yaitu tetap pada angka 1,6%. Sementara itu, proporsi petani tembakau terhadap seluruh pekerja menurun dari 0,7% menjadi 0,6%.

Produktivitas lahan tembakau Indonesia mengalami kenaikan dari 649 kg/ha pada tahun 1995 menjadi 867 kg/ha pada tahun 2009, namun kembali menurun pada tahun 2010 menjadi 764 kg/ha. Produktivitas lahan tembakau sendiri ditentukan oleh berbagai faktor antara lain: pupuk dan pestisida, bibit, cuaca dan air yang cukup. Sementara itu, mengingat sifat tanaman tembakau yang sangat sensitif, naik turunnya produktivitas tanaman tembakau juga tergantung pada cuaca terutama curah hujan yang tinggi; yang dapat merusak daun tembakau dan yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas. Jika dibandingkan keuntungan tanaman tembakau dengan tanaman lain, tembakau bukan tanaman yang memberikan

keuntungan paling besar, baik dataran rendah maupun dataran tinggi. Di dataran rendah, bawang merah, cabe merah, dan melon memberikan keuntungan lebih besar daripada tembakau. Sedangkan, di dataran tinggi, kentang dan cabe merah lebih menguntungkan untuk ditanam sebagai alternatif pengganti tembakau.

Harga riil daun tembakau mengalami peningkatan hingga tujuh kali lipat dari Rp 1,016 per kg pada tahun 1996 menjadi Rp 7,580 per kg pada tahun 2006. Namun, hal ini tidak berimplikasi pada kesejahteraan petani. Hal ini karena harga daun tembakau ditentukan oleh berbagai faktor seperti kualitas daun, jenis tembakau, dan persediaan daun tembakau di pabrik rokok. Dari semua faktor tersebut, faktor yang paling menentukan adalah para *grader*. *Grade* (kualitas) harga daun tembakau ditentukan secara sepihak. Petani tidak pernah tahu bagaimana *grader* menentukan harga daun tembakau, sehingga posisi tawar petani berada pada posisi yang lemah. Harga tembakau berlapis-lapis tergantung dari kualitas daun, bahkan ada yang sampai 40 tingkatan mulai dari harga Rp.500 hingga Rp.25 ribu per kg, tergantung penilaian *grader*-nya.

Selama 20 tahun terakhir, dari 1990 hingga 2010 terdapat kecenderungan peningkatan impor dan ekspor daun tembakau. Tahun 2010, Indonesia mengimpor 65,7 ton daun tembakau atau 48% dari total produksi, dan mengekspor 57 ton atau sekitar 42% dari total produksi. Jika dilihat dari nilai net ekspor, selama 20 tahun (1990-2010) Indonesia selalu mengalami net ekspor negatif yang berarti lebih banyak mengimpor dibandingkan mengekspor (kecuali 1990, 1992 dan 1998). Walaupun nilai net ekspor negatif tersebut besarnya cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, akan tetapi lima tahun terakhir nilainya semakin negatif yang artinya Indonesia semakin banyak mengimpor daun tembakau dimana pada tahun 2010 jumlahnya mencapai US\$ 183,077 juta.

INDUSTRI HASIL TEMBAKAU

Produksi rokok Indonesia meningkat antara tahun 2005 sampai 2011, yakni dari 220 miliar batang menjadi 300 miliar batang (nilai estimasi). Produksi rokok tersebut didominasi oleh rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) sebesar rata-rata 57,7% per tahunnya, kemudian diikuti oleh SKT (Sigaret Kretek Tangan) sekitar 35,5% per tahunnya dan SPM (Sigaret Putih Mesin) rata-rata 6,8 per tahunnya. Krisis moneter yang melanda kawasan negara-negara di Asia Tenggara ternyata tidak mempengaruhi produksi rokok di Indonesia. Tahun 1997-1998, saat inflasi di Indonesia mencapai 70%, produksi rokok di Indonesia tidak terpengaruh oleh inflasi dan tetap tinggi pada 269,8 milyar batang rokok. Pangsa pasar rokok didominasi oleh tiga perusahaan besar yaitu Philip Morris International (PMI) - HM Sampoerna Tbk,

Gudang Garam dan Djarum. Terdapat sekitar 37% pasar rokok Indonesia yang dikuasai oleh asing (Philip Morris dan BAT). Sedangkan untuk jumlah pabrik pengolahan hasil tembakau, terjadi penurunan dari tahun 2009 ke tahun 2011.

Kontribusi industri rokok pada perekonomian tidak signifikan dan cenderung menurun. Antara tahun 1995-2008 kontribusi industri rokok menurun peringkatnya, masing-masing pada tahun 1995, 2000, 2005 dan 2008 dari urutan ke 15, 19, 20 dan 23. Jumlah pekerja industri pengolahan tembakau meningkat lebih dari 70% dari 194.650 pada tahun 1985 menjadi 331.590 pada tahun 2000. Proporsi pekerja sektor industri pengolahan tembakau terhadap total tenaga kerja Indonesia selalu dibawah 1%. Pertumbuhan pekerja industri pengolahan tembakau dibandingkan dengan total pekerja industri sering kali tidak sejalan. Pada tahun 2008-2009, pekerja di sektor pengolahan tembakau menurun 4,18%, sedangkan total pekerja industri justru meningkat. Pekerja di industri pengolahan tembakau didominasi oleh perempuan. Perbandingan berkisar 4 : 1 antara perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Sejak tahun 2000 sampai dengan 2011, rata-rata upah nominal per bulan pekerja industri rokok selalu lebih rendah dari rata-rata upah pekerja industri. Dibandingkan dengan rata-rata upah pekerja di industri makanan, rata-rata upah nominal per bulan pekerja industri rokok juga selalu lebih rendah.

Ekspor rokok merupakan bagian kecil (0,28% – 0,42%) dari total nilai ekspor produk non migas. Dari tahun 2005 sampai 2011, persentase ekspor rokok terhadap produksi selalu di bawah 0,03%. Demikian dengan presentase impor rokok terhadap produksi, persentasenya bahkan kurang dari 0,0002%. Dengan demikian sebagian besar produksi rokok Indonesia adalah untuk konsumsi domestik. Pada tahun 2011, nilai ekspor rokok Indonesia adalah sebesar US\$ 549,8 juta atau sekitar 78,5% nilai ekspor produk tembakau. Kuantitas rokok yang diekspor sebanyak 59,1 juta kilogram atau sekitar 60% dari total kuantitas ekspor produk tembakau. Pada tahun 2011, nilai ekspor netto dari rokok adalah positif US\$ 543.515.020, dengan nilai ekspor US\$ 549.765.664 dan nilai impor US\$ 6.250.644. Dari enam jenis rokok yang di ekspor oleh Indonesia, nilai ekspor terbesar adalah dari sigaret mengandung tembakau (rokok putih), kedua sigaret kretek dan ketiga adalah cerutu, cheroots dan cerutu kecil mengandung tembakau. Tahun 2010, tiga besar negara penerima ekspor sigaret kretek dari Indonesia adalah Singapura, Malaysia dan Timor Leste. Sedangkan untuk ekspor rokok selain kretek, negara tujuan ekspor rokok jenis ini didominasi oleh Kamboja, Malaysia, Thailand, Turki dan Singapura. Pada tahun 2010, rokok dari Indonesia paling banyak diekspor ke Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand dan Turki. Sedangkan untuk impor, Indonesia paling banyak mengimpor rokok dari Jerman dan Cina.

KEBIJAKAN CUKAI ROKOK DAN MANFAATNYA

Peningkatan 10 persen cukai rokok akan menurunkan konsumsinya sebesar 1 sampai 3 persen dan meningkatkan penerimaan negara dari cukai rokok sebesar 7 sampai 9 persen. Permintaan rokok bersifat inelastis, dimana besarnya penurunan konsumsi rokok lebih kecil daripada peningkatan harganya. Hal ini juga memperlihatkan bahwa rokok adalah barang yang menimbulkan kecanduan bagi pemakainya. Peningkatan harga rokok melalui peningkatan cukai adalah *win win solution* karena akan menurunkan konsumsi rokok, walau bersifat inelastis, dan pada saat yang sama akan berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari cukai rokok. Barber et al 2008, melakukan penghitungan mengenai dampak peningkatan cukai rokok menjadi 57% (tingkat maksimal yang diperbolehkan Undang-Undang No. 39 tahun 2007). Jika tingkat cukai rokok ditingkatkan menjadi 57% dari harga jual eceran maka diperkirakan jumlah perokok akan berkurang sebanyak 6.9 juta orang, jumlah kematian yang berkaitan dengan konsumsi rokok akan berkurang sebanyak 2.4 juta kematian, dan penerimaan negara dari cukai tembakau akan bertambah sebanyak Rp. 50.1 Triliun (penghitungan ini didasarkan pada asumsi elastisitas harga terhadap permintaan rokok sebesar -0.4).

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang cukai, cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat antara lain konsumsinya perlu dikendalikan dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan cukai dibuat untuk mengendalikan konsumsi rokok. Keberhasilan kebijakan cukai rokok ditentukan oleh kemampuannya mengendalikan konsumsi rokok, bukan peningkatan penerimaan negara. Sejak tahun 2009, Indonesia menggunakan sistem cukai spesifik, dimana cukai ditetapkan per batang rokok. Namun masih tetap ada layer yang didasarkan pada Harga Jual Eceran (HJE). Di tahun 2012 masih terdapat 15 layer HJE. Penggunaan sistem cukai spesifik di landasi pertimbangan kemudahan administrasi. Akan tetapi banyaknya layer HJE akan memperumit administrasi pemungutan cukai.

Pada tahun 2012 terjadi peningkatan tarif cukai HT rata-rata sebesar 16%, dari 42% menjadi 51%. Namun tarif cukai sangat bervariasi dari yang terendah sebesar Rp75 per batang untuk SKT golongan 3 dan yang tertinggi sebesar Rp 365 untuk SPM golongan 1. Besarnya peningkatan tarif cukai HT bervariasi antara 9-49%. Namun sayangnya peningkatan tarif cukai terendah justru bagi pengusaha rokok kretek mesin 1 sebesar 9-10%. Pemerintah seolah-olah melindungi pengusaha rokok *mesin* yang *berskala besar* dan menguasai 44% pangsa pasar rokok.

Sistem cukai tembakau yang rumit diperkirakan akan menimbulkan beberapa implikasi seperti timbulnya pabrik rokok skala kecil yang dikenai cukai paling rendah,

praktek subkontrak dari perusahaan rokok besar ke perusahaan kecil, tertahannya tingkat produksi rokok di skala yang lebih kecil yang dikenai cukai lebih rendah dan lebarnya rentang harga jual eceran di tingkat konsumen. Keempat implikasi ini akan mengurangi efektifitas kebijakan cukai tembakau dalam mengendalikan konsumsi rokok. Penerimaan pemerintah dari cukai HT bukanlah yang terbesar dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya. Untuk periode 1998-2010 penerimaan pemerintah dari cukai HT hanya berkisar 4,8% - 7,7% dibandingkan dengan total penerimaan pemerintah.

KEBIJAKAN PENGENDALIAN TEMBAKAU

Indonesia telah mempunyai dasar hukum yang mendukung pengendalian konsumsi tembakau yang tercakup dalam UU Kesehatan No. 36/ 2009 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan. Berdasarkan UU kesehatan tersebut telah dibuat juga peraturan pemerintah, peraturan bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, dan Peraturan Daerah di beberapa provinsi yang mencakup kawasan tanpa rokok. Meskipun secara internasional Indonesia belum menunjukkan komitmen pengendalian tembakau yang kuat, karena belum menandatangani *Framework Convention on Tobacco Control (TCSC)*, Indonesia telah menerapkan beberapa program pengendalian termasuk kawasan tanpa rokok dan strategi MPower yang mencakup strategi pengendalian dampak negatif konsumsi rokok dari aspek kesehatan maupun ekonomi.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB 1 KONSUMSI ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU LAINNYA	1
1.1 Konsumsi Rokok	1
1.2 Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya Menurut Karakteristik Populasi	3
1.3 Fakta tentang Rokok Kretek	24
BAB 2 DAMPAK KESEHATAN DAN EKONOMI TEMBAKAU	28
2.1 Metode dalam Pengukuran Dampak Kesehatan dan Ekonomi Tembakau	29
2.2 Sumber Data Epidemiologi	29
BAB 3 PERTANIAN TEMBAKAU DAN CENGKEH	37
3.1 Produksi Daun Tembakau	37
3.1.1 Produksi Global	37
3.1.2 Tren Produksi Tembakau di Indonesia	38
3.1.3 Produksi Tembakau Menurut Provinsi	38
3.2 Lahan Tembakau	39
3.2.1 Proporsi Lahan Pertanian Tembakau	39
3.2.2 Luas Lahan Tembakau Menurut Provinsi	41
3.2.3 Luas Lahan Menurut Jenis Tanaman Tembakau	42
3.2.4 Luas Lahan Tembakau Rakyat	42
3.2.5 Luas Lahan Tembakau Virginia	43
3.2.6 Luas Lahan Tembakau Na-Oogst	43
3.3 Pekerja di Pertanian Tembakau	43
3.3.1 Pergeseran Pekerja dari Sektor Pertanian ke Sektor Lain	43
3.3.2 Persentase Petani Tembakau Terhadap Pekerja Sektor Pertanian	45
3.3.3 Petani Tembakau Setara Purna Waktu	46
3.4 Harga Tembakau	48

3.5	Pendapatan Usaha Tani Tembakau	49
3.5.1	Produktivitas Lahan Tembakau	49
3.5.2	Keuntungan Usaha Tani Tembakau	49
3.6	Perdagangan Tembakau	51
3.6.1	Ekspor Daun Tembakau dan Semua Jenis Produk Terhadap Ekspor Total	51
3.6.2	Ekspor Tembakau Dibandingkan dengan Hasil Pertanian Lainnya	51
3.6.3	Nilai Ekspor Netto Daun Tembakau	52
3.6.4	Rasio Ekspor Impor Daun Tembakau	53
3.6.5	Nilai Impor Tembakau Virginia	54
3.7	Produksi Cengkeh	55
3.7.1	Produksi Cengkeh Dunia	55
3.7.2	Tren Produksi Cengkeh di Indonesia	57
3.8	Lahan dan Pekerja di Perkebunan Cengkeh	58
3.8.1	Luas Lahan Cengkeh	58
3.8.2	Luas Lahan Berdasarkan Kepemilikan	59
3.8.3	Distribusi Lahan Cengkeh Menurut Pulau dan Provinsi	60
3.8.4	Jumlah Petani Cengkeh Menurut Provinsi	60
3.9	Harga Cengkeh	62
3.9.1	Tata Niaga Cengkeh	62
3.10	Perdagangan Cengkeh	63
3.10.1	Ekspor Cengkeh	63
3.10.2	Impor Cengkeh	63
BAB 4	INDUSTRI TEMBAKAU	67
4.1	Produksi Rokok	68
4.1.1	Tren Produksi Rokok	68
4.1.2	Tren Produksi Rokok vs Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi	70
4.2	Pangsa Pasar Rokok	71
4.2.1	Dominasi Industri Besar	71
4.3	Jumlah Industri Rokok	71
4.3.1	Definisi Skala Industri	71
4.3.2	Tren Perkembangan Jumlah Perusahaan Pengolahan Tembakau	72
4.3.3	Kontribusi Industri Rokok Pada Perekonomian	72
4.4	Pekerja di Industri Pengolahan Produk Tembakau	73
4.4.1	Tren Jumlah Pekerja	73

4.4.2	Proporsi Pekerja Industri Pengolahan Produk Tembakau	76
4.4.3	Pertumbuhan Pekerja Industri Pengolahan Tembakau	76
4.4.4	Pekerja Industri Pengolahan Tembakau Menurut Jenis Kelamin	77
4.4.5	Penghasilan Rata-rata	77
4.5	Perdagangan Tembakau	80
4.5.1	Nilai Ekspor Rokok Terhadap Total Nilai Ekspor	80
4.5.2	Kuantitas Ekspor Rokok	80
4.5.3	Nilai Ekspor Rokok	82
4.5.4	Nilai Ekspor Rokok Netto	82
4.5.5	Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Rokok Kretek	84
4.5.6	Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Rokok Selain Kretek	84
4.5.6.a	Perbandingan Nilai Ekspor Tahun 2009 dengan 2010	85
4.5.6.b	Perbandingan Nilai Impor Tahun 2009 dengan 2010	87
BAB 5	KEBIJAKAN CUKAI ROKOK DAN MANFAATNYA	89
5.1	Dampak Peningkatan Rokok	89
5.1.1	Dampak Peningkatan Rokok terhadap Konsumsi Rokok dan Penerimaan Negara	89
5.1.2	Dampak Peningkatan Cukai Tembakau terhadap Jumlah Perokok, Kematian yang Terkait dengan Konsumsi Rokok dan Penerimaan Cukai Tembakau	89
5.1.3	Dampak Peningkatan Harga Rokok pada Kelompok Termiskin	90
5.2	Kebijakan Cukai Rokok di Indonesia	90
5.2.1	Filosofi UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai	90
5.2.2	Sistem Cukai Hasil Tembakau di Indonesia	92
5.2.3	Perubahan Kebijakan Cuka Hasil Tembakau	92
5.2.4	Peran DPR dalam Peningkatan Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT)	93
5.2.5	Peningkatan Tarif Cukai Hasil Tembakau 2011-2012	93
5.2.6	Implikasi dari Sistem Cukai Hasil Tembakau	95
5.3	Perbandingan Tingkat Cukai dan Harga Rokok di ASEAN	95
5.3.1	Perbandingan Tingkat Cukai Rokok di ASEAN	95
5.3.2	Perbandingan Harga Rokok di ASEAN	97
5.4	Penerimaan Pemerintah dari Cukai Hasil Tembakau	97
5.4.1	Penerimaan Cukai Hasil Tembakau 2006-2012	97

5.4.2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah dari Cukai HT dan Penerimaan Lainnya	99
5.5 Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga untuk Tembakau	99
5.5.1 Pengeluaran Rumah Tangga untuk Rokok	99
5.5.2 Tren Pengeluaran Rumah Tangga Termiskin untuk Rokok	99
5.5.3 Perbandingan Pengeluaran Rumah Tangga untuk Rokok antara yang Termiskin dan yang Terkaya	101
5.5.4 Kesempatan yang Hilang Akibat Kebiasaan Merokok RT Termiskin	101
5.6 Isu-isu yang Terkait dengan Cukai Tembakau	104
5.6.1 Usaha Kecil dan Menengah Rokok	104
5.6.2 Pajak Pertambahan Nilai	105
5.6.3 Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	105
5.6.4 Pajak Rokok Daerah	107
BAB 6 KEBIJAKAN PENGENDALIAN TEMBAKAU	110
6.1 Peraturan-peraturan yang ada di Indonesia	110
6.2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2012	111
6.3 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri	113
6.4 Strategi MPOWER	114

DAFTAR TABEL

BAB 1 KONSUMSI ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU LAINNYA		
Tabel 1.1	Rata-rata konsumsi rokok (batang per hari) menurut karakteristik demografi tahun 2007 dan 2010	4
Tabel 1.2	Prevalensi perokok berdasarkan kelompok umur di Indonesia tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010*	6
Tabel 1.3	Jumlah perokok aktif ≥ 15 tahun menurut jenis kelamin dan kelompok umur, tahun 2010	8
Tabel 1.4	Sikap, pengetahuan dan persepsi orang dewasa terhadap asap rokok dan dampaknya pada kesehatan	11
Tabel 1.5	Prevalensi pelajar merokok umur 13-15 tahun di 40 Sekolah Menengah Pertama di Pulau Jawa dan Sumatera, Indonesia tahun 2006 dan 2009	12
Tabel 1.6	Tren prevalensi konsumsi tembakau pada penduduk ≥ 15 tahun berdasarkan jenis kelamin dan provinsi di Indonesia tahun 1995, 2001, 2007 dan 2010	15
Tabel 1.7	Prevalensi merokok umur ≥ 15 tahun berdasarkan wilayah dan jenis kelamin di Indonesia tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010	18
Tabel 1.8	Prevalensi merokok umur ≥ 15 tahun berdasarkan tingkat pendidikan di Indonesia tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010	18
Tabel 1.9	Prevalensi perokok umur ≥ 15 tahun berdasarkan kelompok pendapatan Indonesia tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010	20
Tabel 1.10	Prevalensi perokok umur ≥ 15 tahun berdasarkan umur mulai merokok di Indonesia tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010	21
Tabel 1.11	Prevalensi populasi yang terkena asap rokok orang lain (perokok pasif) di dalam rumah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, Indonesia tahun 2001, 2004, 2007 dan 2010	22
Tabel 1.12	Jumlah populasi yang terkena asap rokok orang lain (perokok pasif) di dalam rumah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin Indonesia tahun 2007 dan 2010	23

Tabel 1.13	Rata-rata kandungan nikotin, tar, CO dan Eugenol rokok kretek dan rokok putih	25
Tabel 1.14	Rata-rata kandungan nikotin, tar, CO dan Eugenol pada rokok	25
Tabel 1.15	Kandungan tar, nikotin dan Eugenol pada rokok kretek tahun 2003	26
BAB 2 DAMPAK KESEHATAN DAN EKONOMI TEMBAKAU		
Tabel 2.1	Kecenderungan prevalensi merokok di Indonesia, RISKESDAS 2007 dan 2010	28
Tabel 2.2	Pola penyebab kematian (semua umur) di Indonesia, RISKESDAS 2007	29
Tabel 2.3	Penduduk Indonesia menurut umur dan jenis kelamin, Sensus Penduduk 2010	31
Tabel 2.4	Proporsi penyakit utama terkait konsumsi tembakau dan Kode ICD – 10, Indonesia 2010	31
Tabel 2.5	Prevalensi perokok aktif dan mantan perokok usia \geq 15 tahun menurut kelompok umur, jenis kelamin, tempat tinggal, tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat pengeluaran per kapita, Indonesia, 2010	33
Tabel 2.6	Jumlah kasus berdasarkan jenis penyakit terkait tembakau dan jenis kelamin, Indonesia, 2010	32
Tabel 2.7	Total tahun produktif yang hilang (Disability Adjusted Life Years/DALYs Loss) karena penyakit terkait tembakau, Indonesia 2010	34
BAB 3 PERTANIAN TEMBAKAU DAN CENGKEH		
Tabel 3.1	Sepuluh besar negara produsen daun tembakau di dunia, 2009 dan 2010	37
Tabel 3.2	Produksi tembakau menurut provinsi, 2009-2010	39
Tabel 3.3	Persentase luas lahan tembakau terhadap <i>Arable Land*</i> dan lahan pertanian, 1990-2009	41
Tabel 3.4	Luas lahan tembakau (ha) menurut provinsi, Indonesia 2009-2010	42
Tabel 3.5	Areal (ha) dan proporsi (%) lahan tembakau menurut jenis tembakau, 2002-2007	43
Tabel 3.6	Jumlah pekerja menurut lapangan usaha dan menurut proporsi (%) pekerja di Indonesia, 1985-2010	44

Tabel 3.7	Proporsi petani tembakau terhadap jumlah pekerja di sektor pertanian tahun 1996-2010	46
Tabel 3.8	Persentase petani tembakau setara purna waktu (<i>full time equivalent</i> / FTE), 1990-2010	47
Tabel 3.9	Rata-rata harga daun tembakau kering (Rp/kg), 1996-2006	48
Tabel 3.10	Analisis usaha tani tembakau Virginia di Jawa Tengah (Temanggung dan Klaten), 2005, dalam Rp (000)	50
Tabel 3.11	Perbandingan keuntungan usaha tani beberapa tanaman substitusi tembakau (Rp 000/hektar/musim)	51
Tabel 3.12	Nilai ekspor daun tembakau, ekspor migas dan non migas (juta US\$), 1992-2010	52
Tabel 3.13	Nilai dan proporsi ekspor tembakau dibandingkan komoditas pertanian lainnya, 2006 dan 2007 (dalam US\$ juta)	53
Tabel 3.14	Proporsi ekspor dan impor daun tembakau terhadap total produksi Indonesia, 1990-2010	54
Tabel 3.15	Nilai ekspor, impor dan nilai ekspor bersih daun tembakau, Indonesia 1999-2010	55
Tabel 3.16	Impor tembakau Virginia* menurut negara asal, kuantitas dan nilai, 2009-2010	56
Tabel 3.17	Negara-negara penghasil cengkeh dunia, 2007 dan 2010	56
Tabel 3.18	Perkembangan ekspor, impor, produksi dan konsumsi cengkeh, Indonesia, 1990-2010	57
Tabel 3.19	Persentase luas lahan cengkeh terhadap luas <i>Arable Land</i> , tahun 1990-2010	58
Tabel 3.20	Luas lahan cengkeh menurut kepemilikan, Indonesia 1990-2010	59
Tabel 3.21	Distribusi lahan cengkeh (ha) menurut provinsi, tahun 2010	60
Tabel 3.22	Jumlah petani perkebunan cengkeh menurut provinsi, Indonesia 2010	61
Tabel 3.23	Proporsi ekspor dan impor cengkeh terhadap total produksi, Indonesia, 1990-2010	64

BAB 4 INDUSTRI TEMBAKAU

Tabel 4.1	Produksi rokok berdasarkan jenis rokoknya, 2005-2010 (miliar batang / tahun)	68
-----------	------------------------------------------------------------------------------	----

Tabel 4.2	Jumlah industri rokok berdasarkan jenis rokok, 2011	72
Tabel 4.3	Sumbangan sektor rokok terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk 66 sektor, Indonesia 1995-2008	74
Tabel 4.4	Perbandingan pekerja sektor industri pengolahan tembakau dengan seluruh pekerja dan pekerja sektor industri, Indonesia 1985-2009	75
Tabel 4.5	Distribusi pekerja di perusahaan produk tembakau menurut jenis kelamin, Indonesia 1993-2009	78
Tabel 4.6	Rata-rata upah nominal per bulan buruh industri di bawah mandor, Indonesia 2000-2011 (dalam ribuan)	79
Tabel 4.7	Nilai ekspor rokok dan produk industri lainnya (dalam juta US\$), 1999-2011	81
Tabel 4.8	Rasio ekspor dan impor rokok terhadap produksi, Indonesia, 2005-2011	81
Tabel 4.9	Ekspor dan impor rokok Indonesia, Januari-Desember 2011	83
Tabel 4.10	Negara tujuan ekspor kretek menurut kuantitas dan nilai, Indonesia 2010	82
Tabel 4.11	Negara tujuan ekspor rokok selain kretek menurut kuantitas dan nilai, Indonesia 2010	84
Tabel 4.12	Perbandingan ekspor rokok menurut negara tujuan berdasarkan berat dan nilai, Indonesia 2009-2010	85
Tabel 4.13	Perbandingan impor rokok menurut negara asal berdasarkan berat dan nilai, Indonesia 2009-2010	86
BAB 5 KEBIJAKAN CUKAI ROKOK DAN MANFAATNYA		
Tabel 5.1	Dampak peningkatan 10% cukai tembakau terhadap konsumsi rokok dan penerimaan negara dari cukai tembakau	89
Tabel 5.2	Dampak kenaikan tarif cukai tembakau terhadap kematian akibat rokok dan penerimaan negara	91
Tabel 5.3	Dampak peningkatan harga rokok terhadap konsumsi rokok menurut kelompok pendapatan	90
Tabel 5.4	Perubahan sistem cukai hasil tembakau 2005-2012	93
Tabel 5.5	Perubahan kebijakan cukai hasil tembakau 2007-2012	94
Tabel 5.6	Persentase peningkatan tarif dan target penerimaan cukai hasil tembakau, 2012	95
Tabel 5.7	Sistem dan tingkat cukai industri hasil tembakau, 2011-2012	96

Tabel 5.8	Pangsa pasar IHT menurut jenis dan golongan produksi	96
Tabel 5.9	Beban tarif cukai rokok di negara ASEAN, 2012	97
Tabel 5.10	Harga rokok merek internasional di ASEAN	98
Tabel 5.11	Perbandingan penerimaan pemerintah dari cukai tembakau dan penerimaan lainnya	100
Tabel 5.12	Distribusi persentase rumah tangga perokok dan non-perokok, Indonesia, 2003-2010	101
Tabel 5.13	Pengeluaran rumah tangga perokok termiskin (q1), Indonesia, 2003-2010	102
Tabel 5.14	Pengeluaran rumah tangga perokok menurut kuintil, Indonesia, 2010	103
Tabel 5.15	Pengeluaran bulanan rumah tangga perokok termiskin, 2010	104
Tabel 5.16	Perbandingan pengeluaran bulanan rumah tangga perokok termiskin, 2010	104
 BAB 6 KEBIJAKAN PENGENDALIAN TEMBAKAU		
Tabel 6.1	Peraturan Gubernur	111
Tabel 6.2	Peraturan Daerah Provinsi	111
Tabel 6.3	Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota	112
Tabel 6.4	Peraturan Bupati/ Instruksi Bupati	112
Tabel 6.5	Peraturan Walikota	113
Tabel 6.6	Peraturan Daerah lain yang mengatur kawasan tanpa rokok	113

DAFTAR GAMBAR

BAB 1	KONSUMSI ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU LAINNYA	
Gambar 1.1	Lima negara dengan konsumsi rokok terbesar (milyar batang)	1
Gambar 1.2	Peringkat lima negara dengan konsumsi rokok terbesar (milyar batang) tahun 2009	2
Gambar 1.3	Sepuluh negara dengan persentase perokok terbesar dari jumlah perokok dunia*	3
Gambar 1.4	Prevalensi merokok* penduduk umur ≥ 15 tahun berdasarkan jenis kelamin, Indonesia - tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010	5
Gambar 1.5	Prevalensi perokok berdasarkan kelompok umur pada laki-laki di Indonesia tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010	6
Gambar 1.6	Prevalensi perokok berdasarkan kelompok umur pada perempuan di Indonesia tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010	7
Gambar 1.7	Jumlah individu yang mengkonsumsi tembakau secara aktif berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada populasi usia 15 tahun ke atas di Indonesia tahun 2010	9
Gambar 1.8	Prevalensi merokok saat ini, merokok setiap hari dan mantan perokok setiap hari berdasarkan jenis kelamin pada populasi usia ≥ 15 tahun di Indonesia tahun 2011	9
Gambar 1.9	Prevalensi jenis rokok pada populasi usia ≥ 15 tahun di Indonesia tahun 2011	10
Gambar 1.10	Prevalensi mengunyah tembakau berdasarkan jenis kelamin pada populasi usia ≥ 15 tahun di Indonesia tahun 2011	12
Gambar 1.11	Prevalensi merokok kelompok remaja umur 15-19 tahun berdasarkan jenis kelamin, Indonesia - tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010	13
Gambar 1.12	Prevalensi perokok umur ≥ 15 tahun berdasarkan provinsi di Indonesia, tahun 2010	14
Gambar 1.13	Prevalensi perokok laki-laki umur ≥ 15 tahun	16

	berdasarkan provinsi di Indonesia, tahun 2010	
Gambar 1.14	Prevalensi perokok perempuan umur ≥ 15 tahun berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2010	17
Gambar 1.15	Pola prevalensi merokok laki-laki umur ≥ 15 tahun berdasarkan tingkat pendidikan di Indonesia tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010	19
Gambar 1.16	Pola prevalensi merokok perempuan umur ≥ 15 tahun berdasarkan tingkat pendidikan di Indonesia tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010	20
Gambar 1.17	Prevalensi konsumsi tembakau umur ≥ 15 tahun berdasarkan umur mulai merokok (tahun) pada laki-laki dan perempuan di Indonesia tahun 2010	22
BAB 3 PERTANIAN TEMBAKAU DAN CENGKEH		
Gambar 3.1	Produksi tembakau Indonesia (ton) tahun 1990-2012	38
Gambar 3.2	Persentase produksi tembakau menurut provinsi, 2009	40
Gambar 3.3	Persentase produksi tembakau menurut provinsi, 2010	40
Gambar 3.4	Persentase pekerja di tiga sektor perekonomian, 1985-2010	45
Gambar 3.5	Produktivitas lahan tembakau, 1995-2010	49
Gambar 3.6	Persentase distribusi lahan cengkeh (ha) menurut provinsi, 2010	61
Gambar 3.7	Jumlah petani cengkeh di Indonesia (dalam juta), 2004-2010	62
BAB 4 INDUSTRI TEMBAKAU		
Gambar 4.1	Produksi rokok Indonesia (miliar batang)	69
Gambar 4.2	Produksi rokok di Indonesia tahun 1985-2010	69
Gambar 4.3	Tingkat inflasi dan pertumbuhan GDP, Indonesia, 1985-2010	70
Gambar 4.4	Pangsa pasar menurut industri rokok, 2008 dan 2009	71
Gambar 4.5	Jumlah perusahaan baru, pembekuan dan pencabutan ijin usaha, 2004-2008	72
Gambar 4.6	Pekerja industri pengolahan tembakau, 1985-2009	73
Gambar 4.7	Pekerja pengolahan tembakau sebagai proporsi	76

	dari seluruh pekerja industri, 2009	
Gambar 4.8	Tren pekerja perusahaan produk tembakau menurut jenis kelamin, 1993 - 2009	77
Gambar 4.9	Tren rata-rata upah nominal buruh di bawah mandor pada industri tembakau/rokok, industri makanan dan seluruh industri menurut kuartal, 2000-2011 (dalam ribuan)	78
BAB 5 KEBIJAKAN CUKAI ROKOK DAN MANFAATNYA		
Gambar 5.1	Produksi dan penerimaan cukai hasil tembakau, Indonesia 2006-2012	98
Gambar 5.2	Alokasi DBH-CHT di empat provinsi, 2008-2010 (dlm milyar rupiah)	106

1

Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya

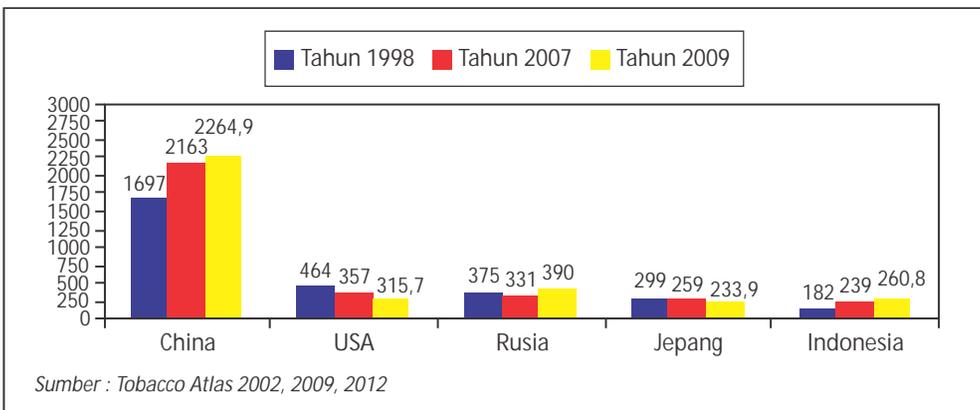
1.1 Konsumsi Rokok

Hasil survei kesehatan berskala nasional yang terkini (2010) menunjukkan besaran masalah tembakau yang masih relatif tinggi dan cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka prevalensi (%) konsumsi tembakau baik yang dihisap (rokok) maupun yang dikunyah juga cenderung meningkat terutama pada laki-laki di Indonesia.

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran jumlah batang rokok dan prevalensi merokok termasuk mengunyah tembakau berdasarkan beberapa status sosial demografi dari beberapa survei kesehatan dan rokok tahun 1995 sampai dengan tahun 2011 serta data yang berkaitan dengan rokok kretek. Konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sumber data yang ditampilkan dalam bab ini mencakup data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS), *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS), *Global Adult Tobacco Survey* (GATS), laporan *World Health Organization* (WHO) dan *Tobacco Atlas*.

Di samping masih menjadi masalah nasional di Indonesia, konsumsi rokok di Indonesia juga memberikan sumbangan masalah kesehatan global dengan menjadi salah satu dari lima negara yang mengkonsumsi rokok tertinggi di dunia.

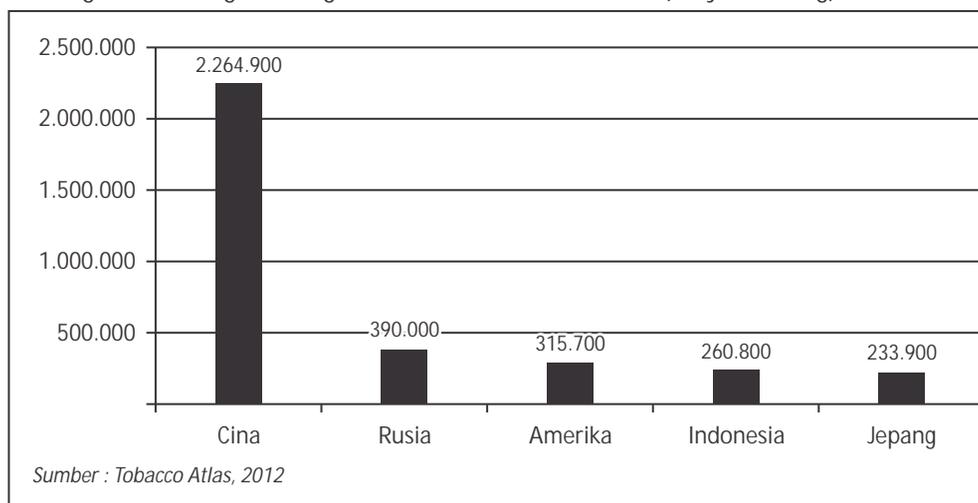
Gambar 1.1
Lima negara dengan konsumsi rokok terbesar (milyar batang)



- Gambar 1.1 di atas memperlihatkan konsumsi rokok berdasarkan jumlah total batang yang dihisap per tahun pada lima negara yang mengkonsumsi rokok terbanyak. Dari buku 'Tobacco Atlas' tahun 2002, 2009 dan 2012 tampak terlihat peningkatan jumlah batang rokok yang dikonsumsi di Indonesia dan China, dan penurunan di Amerika dan Jepang serta fluktuatif di Rusia. Konsumsi rokok di Indonesia meningkat dari 182 milyar batang pada tahun 1998 menjadi 260.8 milyar batang pada tahun 2009.

Gambar 1.2

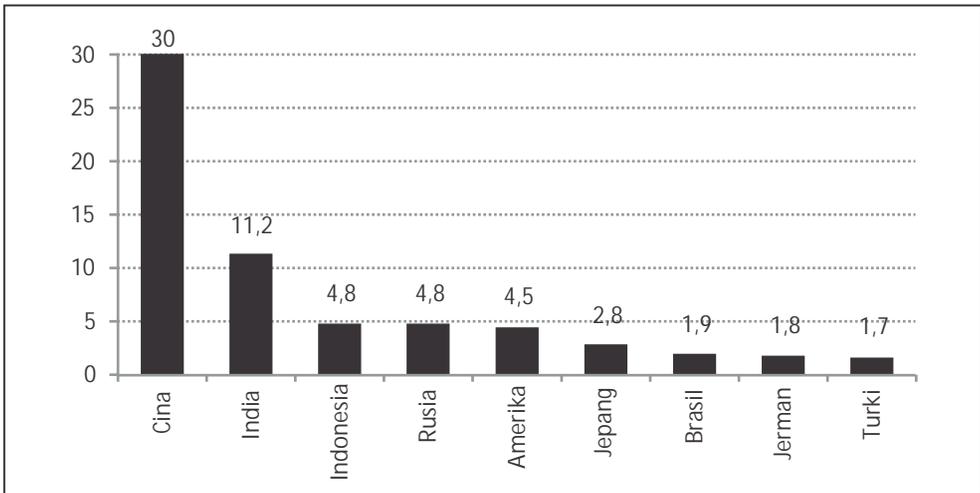
Peringkat lima negara dengan konsumsi rokok terbesar (milyar batang) tahun 2009



- Gambar 1.2 menunjukkan bahwa dari data tahun 2009 dalam buku 'Tobacco Atlas' tahun 2012, Indonesia adalah negara keempat dengan jumlah batang rokok yang dikonsumsi terbesar di dunia setelah China, Rusia dan Amerika. Ini berarti peringkat Indonesia meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dari peringkat lima menjadi peringkat empat, dan Jepang turun dari peringkat keempat menjadi peringkat kelima (lihat gambar 1.1).
- Dari gambar 1.3 terlihat bahwa dari laporan *World Health Organization* (WHO) tahun 2008 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat ketiga untuk jumlah perokok terbesar dari jumlah perokok dunia (4.8%) setelah Cina (30%) dan India (11.2%).

Gambar 1.3

Sepuluh negara dengan persentase perokok terbesar dari jumlah perokok dunia*



Sumber: WHO Report on Global Tobacco Epidemic, 2008

*Jumlah perokok di dunia mencapai 1,3 milyar orang.

1.2 Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya Menurut Karakteristik Populasi

Konsumsi rokok per hari akan dijelaskan secara lebih rinci dalam beberapa tabel dan grafik berikut ini. Data diambil dari hasil survei berskala nasional seperti SUSENAS, SKRT, dan RISKESDAS. Survei terkait menggunakan instrumen pertanyaan yang sama untuk rokok pada tahun 1995, 2001 dan 2004 yang mencakup data merokok yang dihisap, sedangkan untuk tahun 2007 dan 2010 meliputi data merokok yang dihisap dan dikunyah. Sebagai informasi tambahan, dimasukkan juga data survei GATS pada tahun 2011.

- Rata-rata jumlah batang rokok yang dikonsumsi pada tahun 2010 adalah 10 batang per hari (10 batang pada laki-laki dan 6 batang pada perempuan). Dibandingkan tahun 2007, rata-rata jumlah batang cenderung sedikit menurun pada laki-laki dan menurun sebesar 20% (2 batang) pada perempuan. Hanya pada kuintil 5 rata-rata jumlah batang rokok sedikit meningkat pada tahun 2010 (12 batang) dibandingkan tahun 2007 (11 batang).
- Pola rata-rata jumlah batang rokok yang dikonsumsi menunjukkan gambaran demografi yang tidak berbeda dalam kurun waktu tiga tahun baik pada laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2007 dan 2010, rata-rata konsumsi batang rokok per hari lebih banyak pada kelompok populasi kota,

pendidikan lebih tinggi, bekerja dan usia produktif (25 – 54 tahun). Pola yang sedikit berubah hanya pada kelompok status kawin perempuan, dimana jumlah rata-rata batang rokok yang dihisap per hari pada tahun 2007 lebih tinggi pada kelompok perempuan tidak kawin dibandingkan kelompok kawin sedangkan pada tahun 2010 tidak begitu berbeda antara perempuan kawin dan tidak kawin.

Tabel 1.1
Rata-rata konsumsi rokok (batang per hari) menurut karakteristik demografi tahun 2007 dan 2010

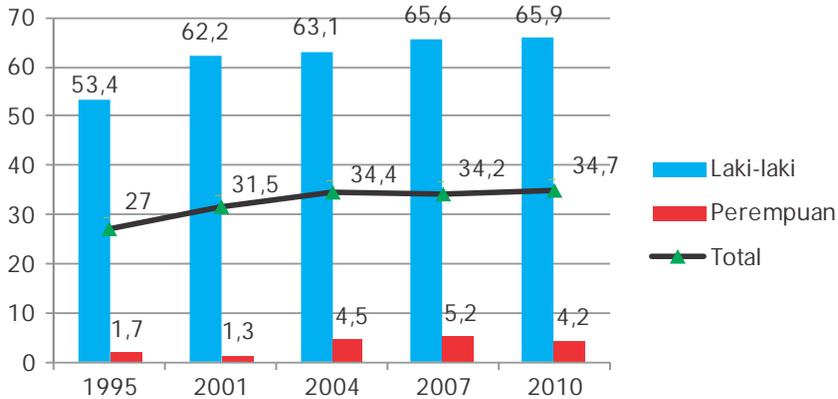
No.	Karakteristik	Tahun 2007			Tahun 2010		
		Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
		L	P	Total	L	P	Total
1	Lokasi						
	Kota	10,1	6,8	9,8	10,1	6,4	9,9
	Desa	10,7	7,8	10,5	10,6	5,6	10,2
2	Kelompok Pendapatan						
	K1 (terendah)	10,0	7,1	9,8	9,0	5,1	8,7
	K2	10,2	7,7	10,0	9,9	5,1	9,6
	K3	10,5	7,4	10,2	10,4	5,4	10,2
	K4	10,7	7,4	10,4	11,1	6,1	10,9
	K5 (tertinggi)	11,2	7,7	11,0	11,9	8,1	11,6
3	Tingkat Pendidikan						
	Dasar	10,7	7,2	10,3	10,5	5,6	10,1
	Menengah	10,2	8,2	10,1	10,1	6,9	10,0
	Tinggi	10,7	8,2	10,6	10,7	7,5	10,6
4	Status Perkawinan						
	Kawin	10,9	7,3	10,6	10,9	5,9	10,6
	Tidak Kawin	8,8	9,2	8,8	8,8	5,9	8,6
5	Status Pekerjaan						
	Tak Bekerja	8,2	7,3	7,9	7,7	5,8	7,3
	Bekerja	10,8	7,7	10,7	10,7	6,0	10,5
6	Kelompok Umur						
	15-24	8,4	9,4	8,4	8,2	6,3	8,1
	25-34	10,6	8,5	10,4	10,6	7,1	10,5
	35-44	11,2	7,7	11,1	11,2	5,9	10,9
	45-54	11,5	7,1	11,1	11,3	6,2	11,0
	55+	10,3	6,9	9,7	10,0	5,3	9,3
	Total	10,5	7,4	10,2	10,4	5,9	10,1

Sumber: RISKESDAS 2007, 2010

Catatan: termasuk konsumsi rokok dan tembakau tiap hari dan kadang-kadang

Gambar 1.4

Prevalensi merokok* penduduk umur ≥ 15 tahun berdasarkan jenis kelamin, Indonesia - tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010



Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007* dan 2010*

Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang;

*) data 2007 dan 2010 termasuk tembakau hisap dan kunyah

- Dari Gambar 1.4 terlihat prevalensi merokok pada penduduk usia ≥ 15 tahun dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 tampak meningkat sebanyak 7,7 persen (27% vs 34,7%). Pada laki-laki, prevalensi cenderung meningkat dan pada perempuan prevalensi tampak fluktuatif, pada tahun 2010 sedikit penurunan sebanyak 1 persen dibandingkan tahun 2007.
- Data dari *Global Adult Tobacco Survey (GATS)* tahun 2011 menunjukkan prevalensi merokok sebesar 36,1% (67,4% laki-laki dan 4,5% perempuan). GATS dilakukan dengan metode yang berbeda dengan SUSENAS, SKRT dan RISKESDAS. Survei ini merupakan kerjasama antara Badan Pusat Statistik dan Badan Litbangkes Kemenkes. GATS menggunakan desain sampling *multistage geographically clustered* yang menggambarkan keterwakilan nasional. Jumlah sampel didapatkan dari 8.994 rumah tangga dan satu individu per rumah tangga dipilih secara acak dengan menggunakan metode KISH pada populasi 15 tahun ke atas.
- Prevalensi merokok berdasarkan kelompok umur dengan interval lima tahun dari pada tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010 dapat dilihat pada tabel 1.2 diatas. Untuk melihat secara lebih jelas pola prevalensi berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada gambar 1.5 dan 1.6.
- Pada tahun 2010, prevalensi konsumsi rokok tertinggi pada laki-laki adalah pada kelompok umur 30-34 tahun (74,5%) dan di kelompok umur 75 tahun ke atas (14,9%) pada perempuan.

Tabel 1.2
Prevalensi perokok berdasarkan kelompok umur di Indonesia
tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010*

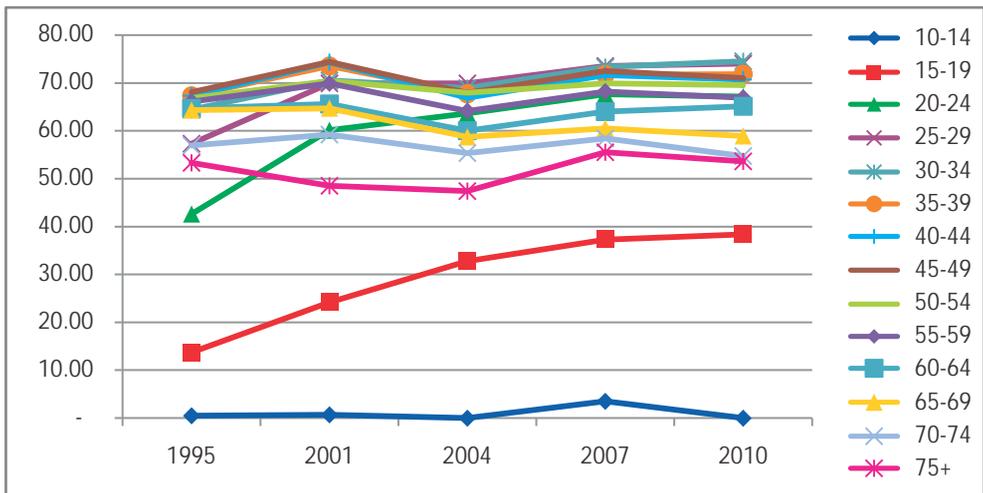
Kel. Umur	1995			2001			2004			2007			2010		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
10-14	0,5	0,1	0,3	0,7	0	0,4	NA	NA	NA	3,5	0,5	2,0	NA	NA	NA
15-19	13,7	0,3	7,1	24,2	0,2	12,7	32,8	1,9	17,3	37,3	1,6	18,8	38,4	0,9	20,3
20-24	42,6	1	20,3	60,1	0,6	28,8	63,6	4,1	30,6	67,6	2,3	32,8	67,1	1,6	33,8
25-29	57,3	1,1	27,4	69,9	0,6	33,7	69,9	4,5	34,7	73,5	2,5	35,1	74,0	2,2	36,9
30-34	64,4	1,2	31,5	70,5	0,9	35,3	68,9	3,8	37,3	73,3	2,7	35,6	74,5	2,2	37,6
35-39	67,3	1,7	35,6	73,5	1,3	36,6	67,7	5,0	39,7	71,7	3,4	35,7	71,8	3,0	36,8
40-44	67,3	2,3	34,2	74,3	1,9	39,6	66,9	4,9	40,1	71,6	4,6	36,6	70,7	4,1	37,2
45-49	68	3,1	35,7	74,4	2,2	41,3	67,9	5,8	41,0	72,5	5,9	38,1	71,0	4,9	38,0
50-54	66,8	3,4	34,5	70,4	2,6	34,8	67,9	4,9	38,8	69,9	7,0	38,6	69,5	6,0	38,6
55-59	66,1	3,3	33,9	69,9	3	36,3	64,7	6,2	36,8	68,2	8,4	39,2	66,9	6,2	39,0
60-64	64,7	2,8	32,2	65,6	2,8	32,6	60,0	6,2	31,3	64,2	11,4	36,3	65,1	8,9	34,6
65-69	64,3	3,8	34	64,7	2,7	32,2	58,7	4,4	30,9	60,5	13,5	35,7	58,9	11,2	34,7
70-74	56,9	3,1	30,6	59,2	2,1	30	55,3	3,8	27,0	58,4	17,0	35,8	54,7	12,3	32,2
75+	53,3	1,9	24,8	48,5	2,1	23,5	47,4	4,1	24,9	55,5	18,0	34,9	53,6	14,9	32,2

Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007*, 2010* dan GATS 2011

Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang;

*) data 2007 dan 2010 termasuk tembakau hisap dan kunyah

Gambar 1.5
Prevalensi perokok berdasarkan kelompok umur pada laki-laki di Indonesia
tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010



Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007*, 2010* dan GATS 2011

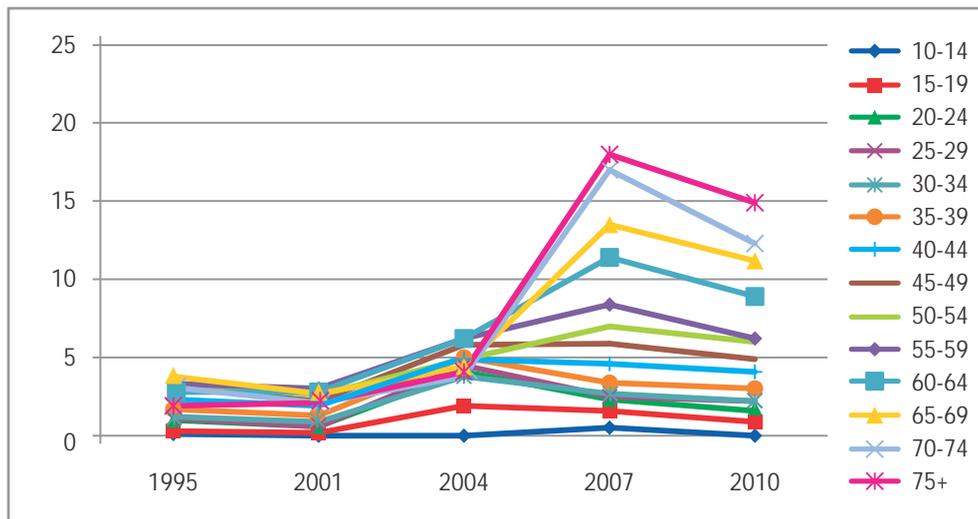
Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang;

*) data 2007 dan 2010 termasuk tembakau hisap dan kunyah

- Gambar 1.5 menunjukkan bahwa pada laki-laki, dengan interval umur lima tahun terjadi pola peningkatan perokok pada usia remaja dan produktif terutama pada kelompok umur 15-19 tahun dan cenderung fluktuatif pada kelompok umur lainnya.
- Prevalensi tertinggi adalah pada kelompok umur 30-34 tahun (74,5%)

Gambar 1.6

Prevalensi perokok berdasarkan kelompok umur pada perempuan di Indonesia tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010



Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007*, 2010* dan GATS 2011

Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang;

*) data 2007 dan 2010 termasuk tembakau hisap dan kunyah

- Dari Gambar 1.6 terlihat bahwa pada populasi perempuan, pola prevalensi konsumsi tembakau cenderung fluktuatif dari tahun 1995 s/d 2010 pada semua kelompok umur. Sebagian besar peningkatan terjadi pada tahun 2007 dan menurun pada tahun 2010.
- Peningkatan yang cukup tajam terjadi pada kelompok perempuan umur 50 tahun ke atas pada tahun 2007. Peningkatan ini kemungkinan berkaitan dengan perbedaan instrumen pertanyaan merokok pada survei tahun 2004 dan 2007. Pada tahun 2007 dan 2010 pertanyaan merokok termasuk konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya (tembakau kunyah), sementara pada tahun 1995, 2001, dan 2004 tidak termasuk konsumsi produk tembakau lainnya. Kemungkinan lebih banyak perempuan usia lanjut yang mengonsumsi tembakau kunyah.

Tabel 1.3
Jumlah perokok aktif 15 tahun menurut jenis kelamin dan kelompok umur,
tahun 2010

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
15-19	3.792.060	83.536	3.875.597
20-24	5.634.209	138.150	5.772.359
25-29	7.104.718	228.429	7.333.147
30-34	7.055.252	222.254	7.277.505
35-39	6.611.448	283.564	6.895.011
40-44	6.118.899	362.849	6.481.748
45-49	5.371.330	365.944	5.737.273
50-54	4.409.544	358.549	4.768.093
55-59	3.303.287	260.988	3.564.275
60-64	2.182.721	353.196	2.535.917
65-69	1.531.863	298.690	1.830.553
70-74	964.836	245.429	1.210.265
75+	974.387	332.476	1.306.864
Total	55.054.554	3.534.054	58.588.607

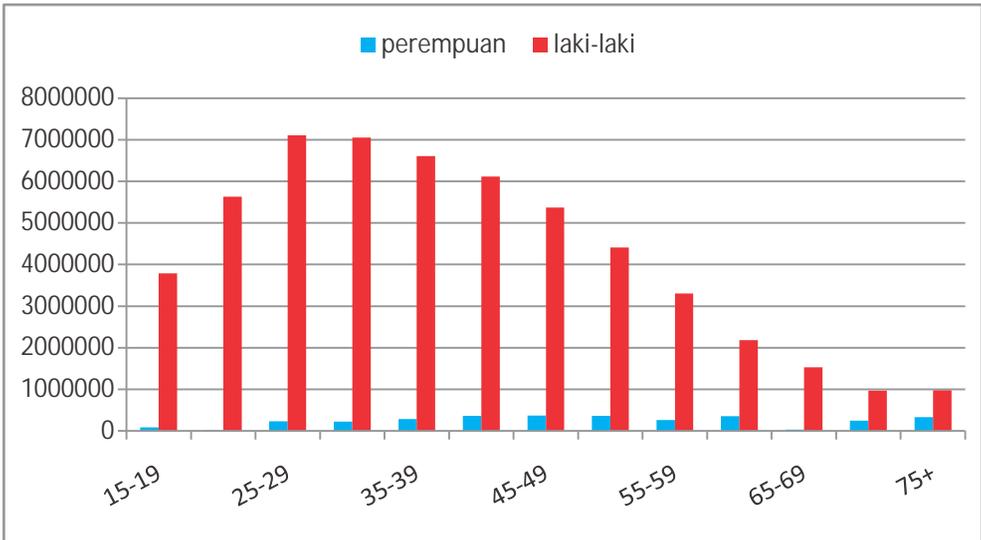
Sumber: RISKESDAS 2010

Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang; termasuk tembakau hisap dan kunyah

- Untuk melihat gambaran yang lebih jelas perbedaan jumlah perokok aktif antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kelompok umur, dapat dilihat pada gambar 1.7.
- Dari tabel 1.3 dan gambar 1.7 dapat dilihat jumlah penduduk yang mengkonsumsi tembakau berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dari data survei RISKESDAS tahun 2010. Pada laki-laki jumlah penduduk yang mengkonsumsi tembakau tertinggi pada kelompok umur 25 - 29 tahun. Sementara pada perempuan tertinggi pada kelompok umur yang lebih tua (45 - 49 tahun).

Gambar 1.7.

Jumlah individu yang mengkonsumsi tembakau secara aktif berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada populasi usia 15 tahun keatas di Indonesia tahun 2010

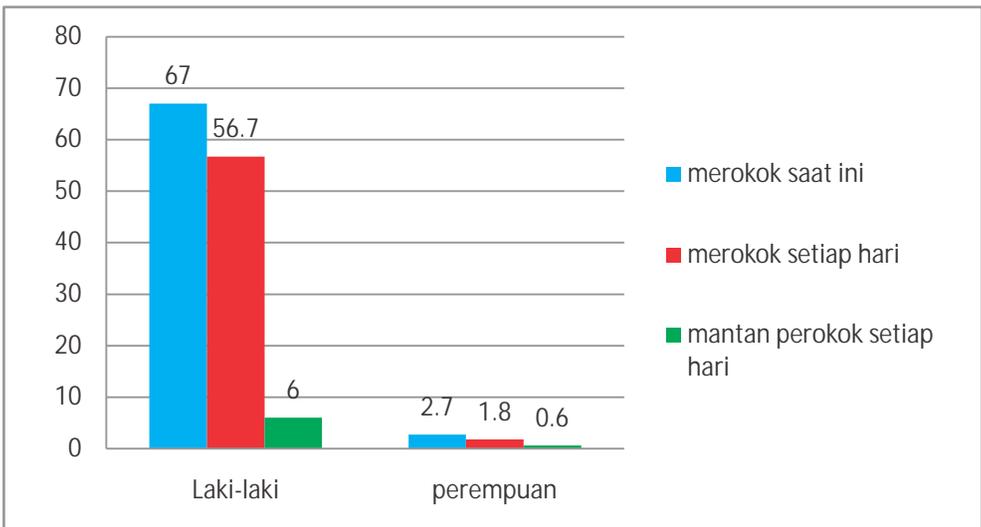


Sumber: RISKESDAS 2010

Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang; termasuk tembakau hisap dan kunyah

Gambar 1.8

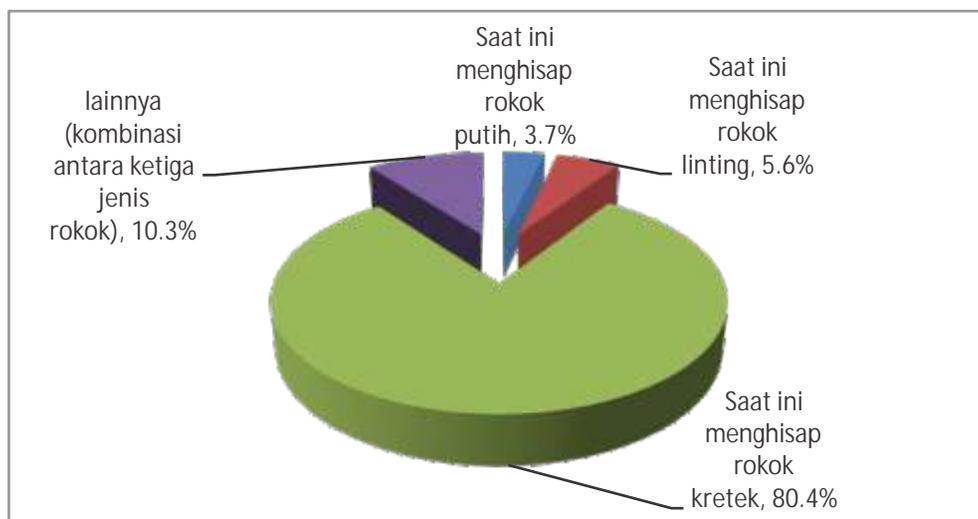
Prevalensi merokok saat ini, merokok setiap hari dan mantan perokok setiap hari berdasarkan jenis kelamin pada populasi usia ≥ 15 tahun di Indonesia tahun 2011



Sumber: Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2011 (Badan Litbangkes)

- Gambar 1.8. menampilkan prevalensi merokok saat ini (setiap hari dan kadang-kadang), merokok setiap hari dan mantan perokok setiap hari berdasarkan jenis kelamin dari data GATS pada tahun 2011. Prevalensi merokok saat ini (setiap hari dan kadang-kadang) sebesar 67% pada laki-laki dan 2,7% pada perempuan, sementara prevalensi merokok setiap hari adalah sebesar 56,7% pada laki-laki dan sebesar 1.8% pada perempuan.
- Secara umum, kebiasaan merokok setiap hari sulit untuk dihentikan. Hal ini ditunjukkan dengan prevalensi mantan perokok setiap hari cukup rendah, hanya 6% dari laki-laki dan 0,6% pada perempuan usia 15 tahun ke atas.

Gambar 1.9
Prevalensi jenis rokok pada populasi usia ≥ 15 tahun di Indonesia tahun 2011



Sumber: *Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2011 (Badan Litbangkes)*

- Gambar 1.9 menunjukkan bahwa sebagian besar orang Indonesia menghisap rokok kretek saja (80,4%), 5,6% menghisap rokok linting saja, 3,7% menghisap rokok putih saja, sementara sisanya mengkonsumsi kombinasi dari ketiganya.
- Untuk prevalensi kombinasi ketiga jenis rokok sebesar 10,3% dengan dominasi kombinasi rokok kretek dan linting sebesar 7,7%. Hanya sedikit yang mengkonsumsi kombinasi antara rokok putih dan kretek (0,3%).
- Hasil GATS tahun 2011 menunjukkan bahwa prevalensi konsumsi tembakau kunyah di Indonesia adalah sebesar 1,7%. Gambar 1.10 menunjukkan bahwa prevalensi mengunyah tembakau (kadang-kadang dan setiap hari) sedikit lebih tinggi pada perempuan (2%) dibandingkan pada laki-laki (1,5%).

Prevalensi mengunyah tembakau setiap hari adalah 1,3% pada perempuan dan 1,1% pada laki-laki.

- Data dari GATS juga menunjukkan tingginya perokok pasif di Indonesia. Sebesar 51,3% orang dewasa yang bekerja di dalam ruangan (14,6 juta orang) terpapar asap rokok di lingkungan kerja. 78,4% orang dewasa (133,3 juta orang) terpapar asap rokok di rumah. 85,4% orang dewasa (44 juta orang) yang mendatangi tempat makan terpapar asap rokok.
- Sebesar 86% orang dewasa mempercayai bahwa merokok dapat menyebabkan penyakit berat.

Tabel 1.4

Sikap, pengetahuan dan persepsi orang dewasa terhadap asap rokok dan dampaknya pada kesehatan

	Perokok saat ini (%)	Bukan perokok (%)	Total (%)
Orang dewasa yang percaya bahwa merokok dapat menyebabkan penyakit berat	81,3	88,5	86,0
Orang dewasa yang percaya bahwa merokok menyebabkan :			
• Stroke	40,0	48,4	45,5
• Serangan jantung	78,3	83,1	81,5
• Kanker paru	81,0	86,7	84,7
• PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik)	32,7	37,8	36,0
• Kelahiran prematur	42,1	53,4	49,5
Orang dewasa yang percaya bahwa menghisap asap rokok dari perokok aktif dapat menyebabkan penyakit berat pada orang yang tidak merokok	67,8	76,8	73,7

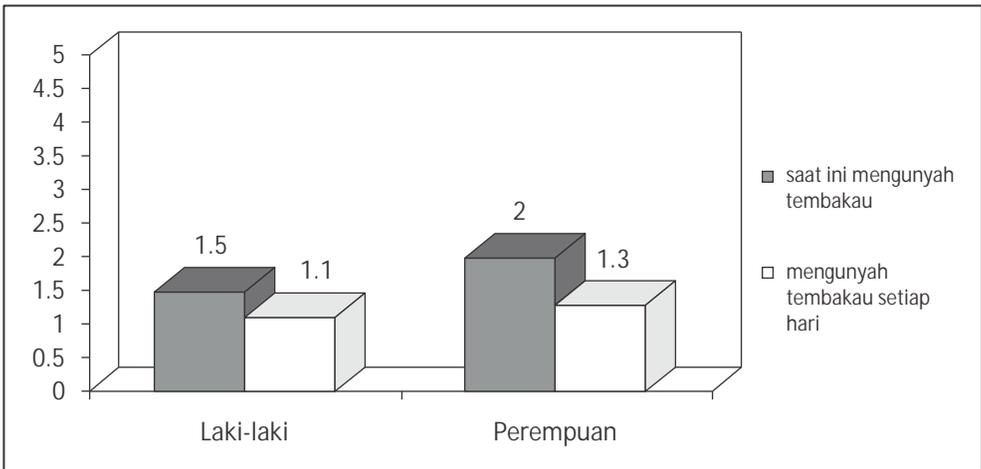
Sumber : GATS 2012

- *Indonesia Global Youth Tobacco Survey* tahun 2009 dilakukan di 16 kabupaten dari 10 provinsi di pulau Jawa, Sumatera, Mentawai dan Madura. Sampel adalah murid SMP usia 13 – 15 tahun dengan total jumlah sampel adalah 3.319 orang yang tersebar di 40 SMP. Sementara GYTS 2006 dilakukan di Sumatera dan Jawa dengan jumlah sampel 2.352 murid SMP. Data GYTS tahun 2006 dan 2009 ini tidak bisa membandingkan perubahan prevalensi (peningkatan atau penurunan) berdasarkan tahun survei, karena

keterwakilan sampel dan wilayah survei yang berbeda pada tahun 2006 dan 2009, tetapi bisa melihat pola perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada masing-masing tahun survei.

- Anak sekolah perempuan mempunyai prevalensi pernah merokok sebelum umur 10 tahun yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada tahun 2006 dan 2009.

Gambar 1.10
Prevalensi mengunyah tembakau berdasarkan jenis kelamin pada populasi usia ≥ 15 tahun di Indonesia tahun 2011



Sumber: Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2011 (Badan Litbangkes)

Tabel 1.5
Prevalensi pelajar merokok umur 13-15 tahun di 40 Sekolah Menengah Pertama di Pulau Jawa dan Sumatera, Indonesia Tahun 2006 dan 2009

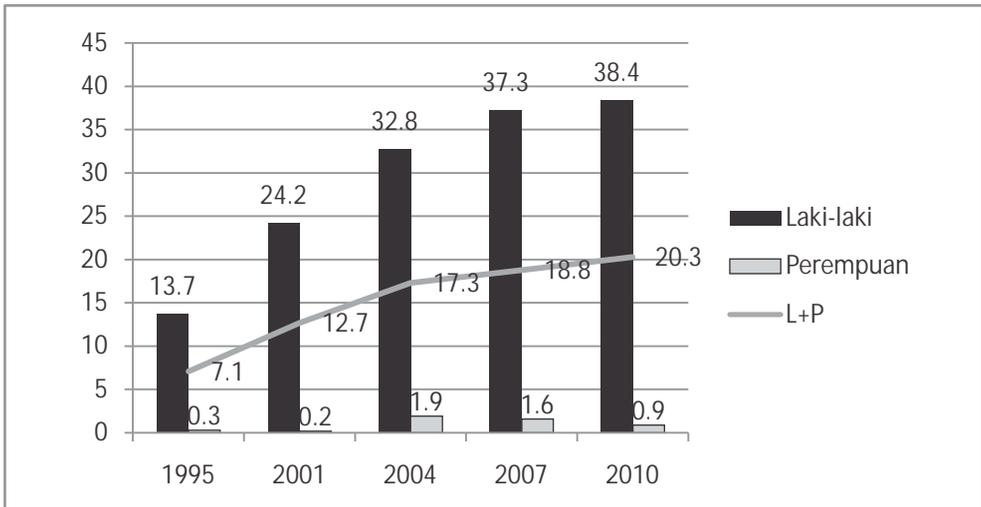
	Pernah merokok (%)		Pernah merokok sebelum umur 10 tahun (%)		Perokok aktif (%)		Perokok aktif yang merasakan kebutuhan pertama kali merokok di pagi hari (%)	
	2006	2009	2006	2009	2006	2009	2006	2009
Laki-laki	61,3	57,8	28,5	18,7	24,5	41,0	3,5	4,0
Perempuan	15,5	6,4	40,8	24,9	2,3	3,5	1,6	6,6
Total	37,3	30,4	30,9	19,4	12,6	20,3	3,2	4,2

Catatan: GYTS 2006: n total 2352 untuk daerah Sumatra dan Jawa;
GYTS 2009: n total 3319 untuk Pulau Jawa, Mentawai, dan Madura;
Sumber: Indonesia Global Youth Tobacco Survey (GYTS), 2006, 2009

- Prevalensi perokok aktif yang merasakan kebutuhan pertama kali merokok di pagi hari tampak berbeda polanya antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2006 dan 2009. Pada tahun 2006 prevalensinya lebih rendah pada perempuan (3,5% vs 1,6%), sementara pada tahun 2009 lebih rendah pada laki-laki (4,0% vs 6,6%).

Gambar 1.11

Prevalensi merokok kelompok remaja umur 15-19 tahun berdasarkan jenis kelamin, Indonesia - tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010



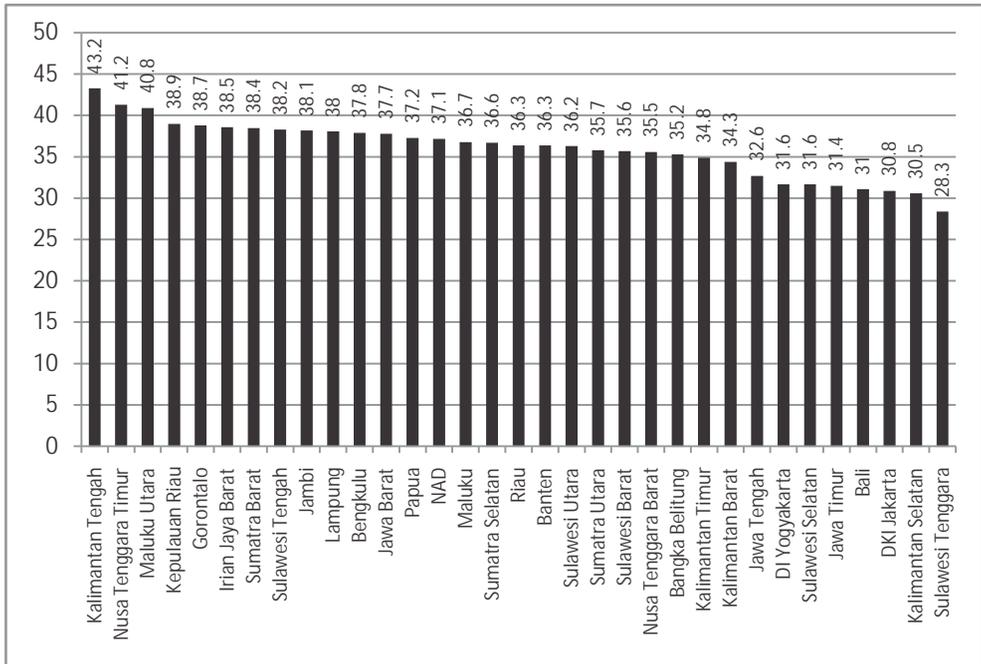
Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007*, 2010*

Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang;

*) data 2007 dan 2010 termasuk tembakau hisap dan kunyah

- Gambar 1.11 menunjukkan bahwa khusus pada remaja usia 15-19 tahun prevalensi merokok meningkat 12,9% dalam kurun waktu 15 tahun (1995 – 2010), terutama pada remaja laki-laki meningkat sebanyak 24,6% (13,7% - 38,4%), dan pada remaja perempuan meningkat sebanyak 0,6% (0,3% - 0,9%). Pada perempuan pola prevalensi cenderung fluktuatif dan mencapai prevalensi tertinggi pada survei tahun 2004 (1,9%) dan terus menurun di 2007 dan 2010.
- Secara umum, provinsi dengan prevalensi konsumsi tembakau tertinggi adalah provinsi Kalimantan Tengah (43,2%), sedangkan prevalensi konsumsi tembakau terendah ada di provinsi Sulawesi Tenggara (28,3%).
- Sebagian besar provinsi (23 dari 33 provinsi) mempunyai rata-rata prevalensi merokok lebih dari rata-rata nasional (34,7%).

Gambar 1.12
Prevalensi perokok umur ≥ 15 tahun berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2010



Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007*, 2010*

Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang;

*) data 2007 dan 2010 termasuk tembakau hisap dan kunyah

- Tabel 1.6 menggambarkan angka prevalensi merokok di tiap provinsi berdasarkan jenis kelamin pada tahun 1995, 2001, 2007 dan 2010. Hasil survey tahun 2004 tidak ditampilkan dalam tabel karena hanya menggambarkan angka nasional, tidak bisa mewakili gambaran provinsi.
- Untuk gambaran yang lebih jelas mengenai prevalensi merokok berdasarkan jenis kelamin di tiap provinsi di Indonesia tahun 2010 dapat dilihat pada gambar 1.13 dan 1.14
- Dari gambar 1.13 diatas, terlihat bahwa provinsi dengan prevalensi tertinggi merokok pada laki-laki usia 15 tahun ke atas adalah di provinsi Gorontalo (75,6%) dan prevalensi terendah di provinsi Sulawesi Tenggara (53,6%).
- Prevalensi merokok pada laki-laki cenderung tinggi di semua provinsi, yaitu diatas 50%.

Tabel 1.6

Tren prevalensi konsumsi tembakau pada penduduk ≥ 15 tahun berdasarkan jenis kelamin dan provinsi di Indonesia tahun 1995, 2001, 2007 dan 2010

Provinsi	1995			2005			2007			2010		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
NAD	52,8	2,2	26,9	*	*	*	66,6	5,7	34,8	71,4	3,3	37,1
Sumatera Utara	59,8	2,5	28,7	59,7	1,7	30,3	64,9	7,0	34,9	66,2	6,6	35,7
Sumatera Barat	54,2	1,5	27,6	67,1	2,5	33,3	71,6	3,7	35,2	74,4	4,1	38,4
Riau	58,6	3,7	31	63,3	2,1	33,4	64,2	5,0	34,8	66,8	3,6	36,3
Jambi	57,2	1,7	29,2	57,4	1,5	30,1	63,1	4,8	33,5	68,7	7,0	38,1
Sumatera Selatan	61,3	1,7	31,6	64,8	1,7	33,7	69,3	3,4	36,2	70,7	2,3	36,6
Bengkulu	61,1	2,4	32,3	66,7	0,6	34,8	73,1	4,2	38,7	73,7	2,8	37,8
Lampung	42,6	1,8	22,1	67,4	1,6	35,9	70,9	4,3	38,2	71,8	2,8	38,0
Bangka Belitung	*	*	*	58,5	1,3	30,3	61,3	3,2	32,6	66,5	2,5	35,2
Kepulauan Riau	*	*	*	*	*	*	59,1	4,8	30,8	70,5	5,7	38,9
DKI Jakarta	58,3	1,8	29,8	54,5	1,5	27,7	60,4	4,8	30,8	57,9	3,0	30,8
Jawa Barat	52,4	1,3	26,1	68	1,7	35	71,1	6,2	37,1	70,2	5,1	37,7
Jawa Tengah	47,2	0,5	23,5	61,5	1	30,8	65,6	6,0	34,3	63,5	3,2	32,6
DI Yogyakarta	55,7	1,3	27,2	53,7	0,2	26,3	60,3	7,7	32,8	58,5	5,6	31,6
Jawa Timur	33,1	0,9	16,9	62,4	0,8	30,7	64,5	4,0	32,6	61,9	2,5	31,4
Banten	*	*	*	66,3	0,8	33,6	71,7	4,9	37,3	68,1	2,9	36,3
Bali	61,8	0,5	29,2	45,7	1,3	23,3	49,2	7,5	28,2	55,4	7,2	31,0
NTB	45,7	1	18,8	62,6	0,4	29,9	66,6	4,1	33,8	72,8	2,6	35,5
NTT	39,8	0,9	20,1	56,6	0,5	27,6	64,3	9,2	34,8	71,9	12,9	41,2
Kalimantan Barat	54,7	2,4	28,7	58,6	2,9	31,4	59,5	5,4	32,4	64,5	4,8	34,3
Kalimantan Tengah	46,3	2,3	23,6	60,2	1	31,8	62,9	6,6	34,7	70,5	13,0	43,2
Kalimantan Selatan	42,1	1,9	22,5	51,8	1,2	26,6	54,5	2,1	27,0	59,0	2,2	30,5
Kalimantan Timur	50,6	0,9	25,6	55,3	2,6	29,2	54,6	3,3	29,3	61,0	5,8	34,8
Sulawesi Utara	49,3	3,3	26,2	61,2	1,9	31,7	63,8	5,0	33,9	66,1	5,9	36,2
Sulawesi Tengah	48,7	2,2	23,7	64,6	3	34,3	68,8	3,8	35,2	70,8	4,1	38,2
Sulawesi Selatan	51,1	2,4	26,1	58,5	1,2	27,9	60,7	2,9	29,4	64,1	2,4	31,6
Sulawesi Tenggara	40,9	1	21,1	58,7	1,7	29,9	60,1	3,5	30,3	53,6	3,4	28,3
Gorontalo	*	*	*	69	0,9	35,2	74,2	3,6	37,5	75,6	4,6	38,7
Sulawesi Barat	*	*	*	*	*	*	57,7	2,4	29,5	67,1	3,8	35,6
Maluku	69	4,3	23,1	*	*	*						
Maluku							62,0	4,3	31,6	71,2	4,8	36,7
Maluku Utara							68,1	5,4	35,5	73,1	8,3	40,8
Papua	69	0,6	27,3	54,6	3,7	29,7						
Irian Jaya Barat							56,9	7,7	30,8	64,4	10,8	38,5
Papua							52,9	11,7	32,0	59,7	11,9	37,2
Indonesia	53,4	1,7	26,9	62,2	1,3	31,5	65,6	5,2	34,2	65,9	4,2	34,7

L = Laki-laki; P = Perempuan; L+P = Laki-laki + Perempuan

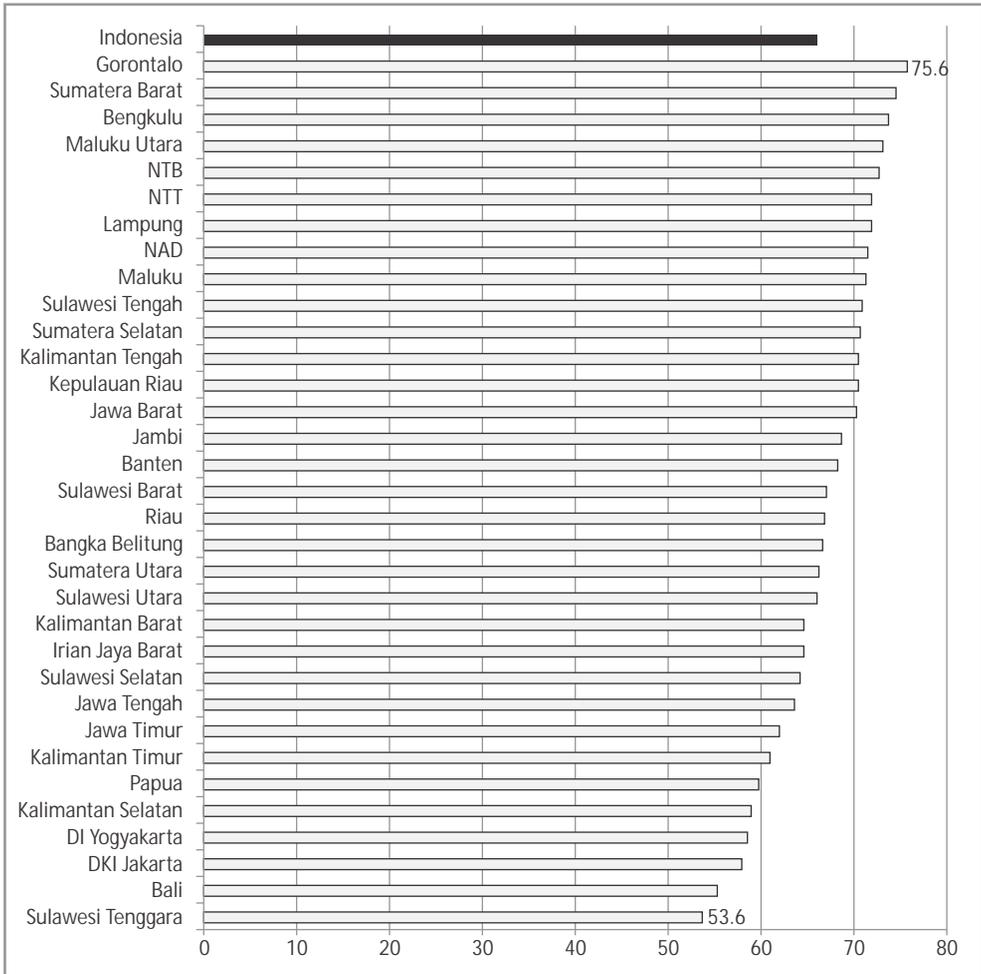
Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007*, 2010*

Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang;

*) data 2007 dan 2010 termasuk tembakau hisap dan kunyah

Gambar 1.13

Prevalensi perokok laki-laki umur ≥ 15 tahun berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2010



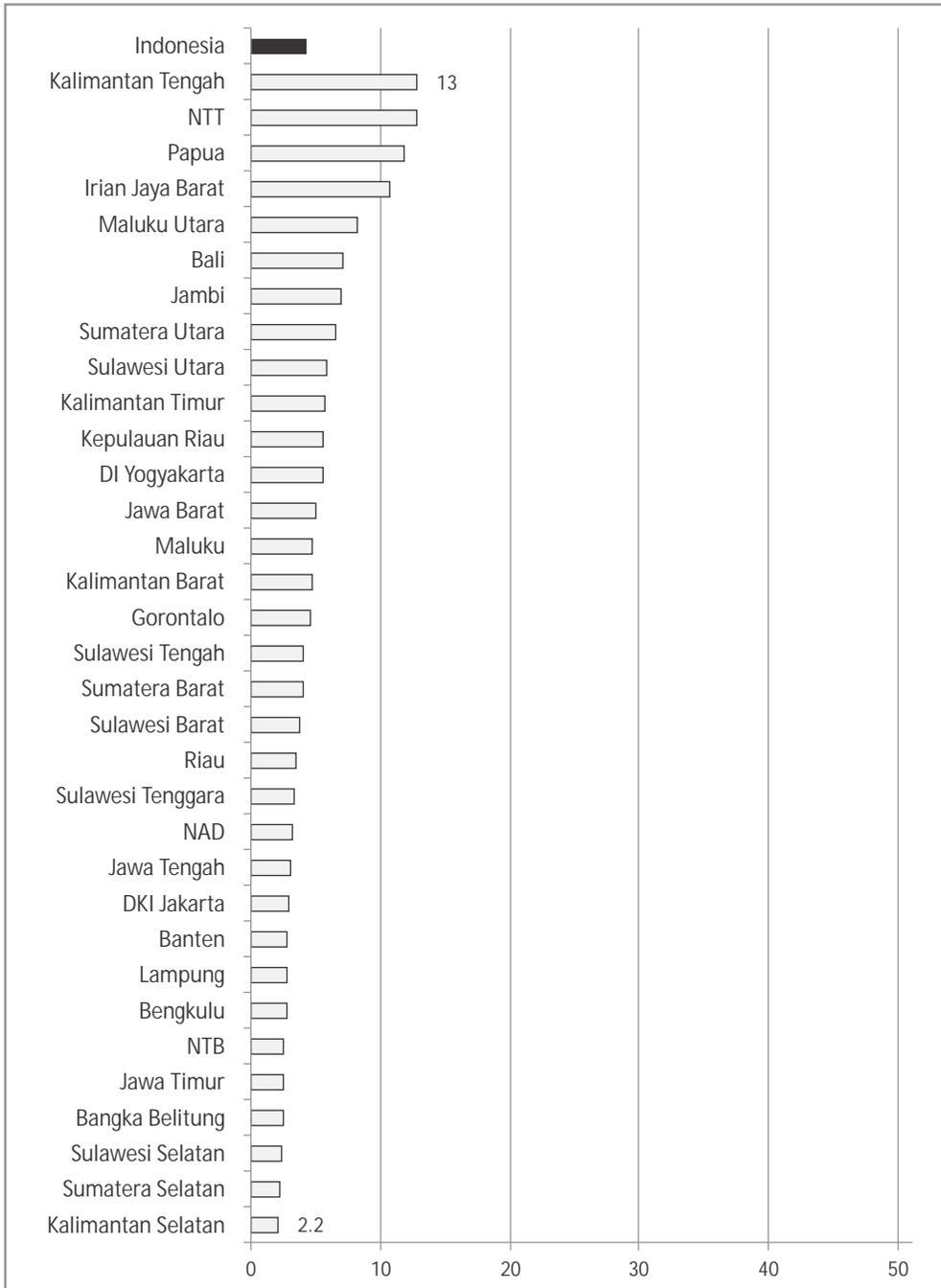
Sumber: RISKESDAS 2010

Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang; tembakau dihisap dan dikunyah

- Dari gambar 1.14, dapat dilihat bahwa provinsi dengan prevalensi tertinggi konsumsi tembakau pada perempuan usia 15 tahun ke atas adalah provinsi Kalimantan Tengah (13%) sedangkan prevalensi terendah adalah di provinsi Kalimantan Selatan (2,2%).
- Dari tiga gambar (1.12, 1.13, dan 1.14) dapat dilihat bahwa masalah konsumsi tembakau di tingkat provinsi berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Gambar 1.14

Prevalensi perokok perempuan umur ≥ 15 tahun berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2010



Sumber: RISKESDAS 2010

Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang; tembakau dihisap dan dikunyah

Tabel 1.7

Prevalensi merokok umur ≥ 15 tahun berdasarkan wilayah dan jenis kelamin di Indonesia tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010

Lokasi	1995			2001			2004			2007			2010		
	L	P	Total												
Pedesaan	58,3	2	29,5	67,0	1,5	34,0	66,8	4,7	36,5	69,2	6,3	36,6	70,1	5,3	37,4
Perkotaan	45,1	1,2	22,6	56,1	1,1	28,2	58,6	4,2	31,7	61,1	3,8	31,2	62,1	3,1	32,3
Total	53,4	1,7	26,9	62,2	1,3	31,5	63,1	4,5	34,4	65,6	5,2	34,2	65,9	4,2	34,7

Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007* dan 2010*

Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang: *) tembakau hisap dan kunyah

- Tabel 1.7 menunjukkan bahwa menurut wilayah daerah tempat tinggal, prevalensi merokok meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan di daerah perkotaan (9,4%) lebih besar dibandingkan daerah pedesaan (7,5%) dalam 15 tahun terakhir (1995-2010).
- Secara umum, prevalensi merokok di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, khususnya pada perempuan. Gambaran ini kemungkinan berkaitan dengan kebiasaan masyarakat daerah pedesaan tertentu di Indonesia untuk konsumsi tembakau kunyah, yang umumnya dilakukan oleh kelompok usia lanjut.

Tabel 1.8

Prevalensi merokok umur ≥ 15 tahun berdasarkan tingkat pendidikan di Indonesia tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010

Pendidikan	1995			2001			2004			2007			2010		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Tdk sekolah/ tdk tamat	67,3	2,8	29,3	73,0	2,4	31,1	67,3	4,8	31,2	72,3	10,1	35,4	72,6	8,8	35,8
Tamat SD	52,8	1,0	27,3	65,1	0,9	33,3	67,0	5,0	36,6	70,1	4,0	35,5	71,5	3,5	36,6
Tamat SMP	38,6	0,8	21,3	51,8	0,6	27,8	58,9	3,7	33,8	60,7	2,7	31,7	62,0	2,4	33,1
Tamat SMA	44,7	0,8	26,1	57,7	0,8	33,5	60,7	3,8	36,4	62,3	2,8	35,0	63,0	2,1	35,5
Tamat PT	37,1	0,6	23,0	44,2	0,3	25,2	47,8	3,5	29,7	49,9	2,3	27,2	47,5	1,8	25,5
Total	53,4	1,7	27,0	62,2	1,3	31,5	63,1	4,5	34,4	65,6	5,2	34,2	65,9	4,2	34,7

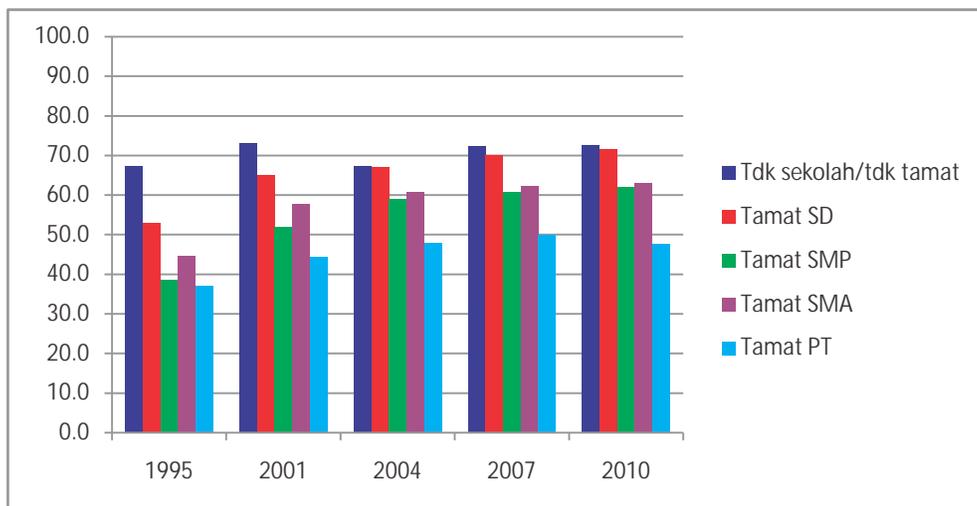
Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSNAS 2004, RISKESDAS 2007* dan 2010*

Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang: *) tembakau hisap dan kunyah

- Tabel 1.8 menggambarkan pola prevalensi konsumsi rokok dan tembakau berdasarkan latar belakang pendidikan individu. Prevalensi cenderung lebih tinggi pada kelompok rendah pada tahun 1995, dan fluktuatif pada tahun-tahun berikutnya. Gambar 1.15 dan 1.16 berikut memberikan tampilan untuk melihat gambaran pola yang lebih jelas pada laki-laki dan perempuan.

Gambar 1.15

Pola prevalensi merokok laki-laki umur ≥ 15 tahun berdasarkan tingkat pendidikan di Indonesia tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010



Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007* dan 2010*

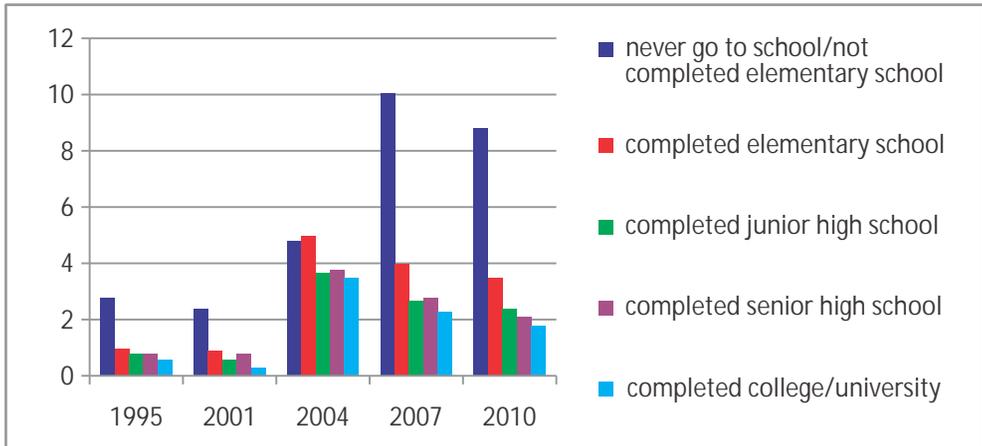
Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang; *) tembakau hisap dan kunyah

- Gambar 1.15 di atas menggambarkan bahwa pola prevalensi merokok pada laki-laki usia 15 tahun ke atas cenderung sama dari tahun 1995 s/d 2010. Prevalensi merokok lebih tinggi pada populasi dengan tingkat pendidikan lebih rendah.
- Dari gambar 1.16, dapat dilihat pola prevalensi merokok pada perempuan dari tahun 1995 s/d 2010. Pola prevalensi merokok berdasarkan tingkat pendidikan tidak berubah pada tahun 1995 dan 2001, dimana prevalensi konsumsi tembakau lebih tinggi pada populasi dengan pendidikan rendah.
- Pola sedikit berubah pada tahun 2004, meskipun tetap menggambarkan prevalensi yang lebih rendah pada kelompok pendidikan lebih tinggi.

- Sementara itu, pada tahun 2007 dan 2010 tampak pola yang sama, dengan prevalensi merokok pada jauh lebih tinggi pada perempuan pendidikan rendah (tidak sekolah/ tidak tamat SD). Hal ini berkaitan dengan kebiasaan mengunyah tembakau pada kelompok perempuan di beberapa kabupaten di Indonesia.

Gambar 1.16

Pola prevalensi merokok perempuan umur ≥ 15 tahun berdasarkan tingkat pendidikan di Indonesia tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010



Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007* dan 2010*

Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang; *) tembakau hisap dan kunyah

Tabel 1.9

Prevalensi perokok umur ≥ 15 tahun berdasarkan kelompok pendapatan Indonesia tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010

Status Ekonomi	1995			2001			2004			2007			2010		
	L	P	Total												
Kuintil 1	57,8	2,2	27,5	62,9	1,7	30,0	63,0	4,4	33,9	68,4	5,8	35,8	66,9	4,5	35,0
Kuintil 2	56,5	1,8	28,7	65,4	1,2	33,0	64,8	4,0	35,5	67,2	5,2	35,0	68,2	4,2	36,0
Kuintil 3	55,0	1,7	28,3	64,0	1,3	32,9	64,4	4,5	35,2	66,0	5,4	34,4	68,7	3,8	36,0
Kuintil 4	51,6	1,4	26,5	61,2	1,3	31,8	63,4	4,8	34,5	64,5	5,0	33,4	65,1	3,9	34,4
Kuintil 5	46,2	1,4	23,7	57,4	1,1	29,6	60,1	4,5	32,8	60,9	4,5	31,5	59,6	4,4	32,0
Total	53,4	1,7	26,9	62,2	1,3	31,5	63,1	4,5	34,4	65,6	5,2	34,2	65,9	4,2	34,7

Sumber: RISKESDAS 2010

Catatan: termasuk pernah merokok/konsumsi tembakau

- Tabel 1.9 menunjukkan bahwa pola prevalensi merokok berdasarkan kuintil tidak berbeda jauh dari tahun 1995 s/d 2010 baik pada laki-laki maupun perempuan. Prevalensi cenderung lebih tinggi pada kuintil rendah.
- Pada tahun 2010 prevalensi merokok pada perempuan cenderung sedikit lebih tinggi pada kuintil terendah dan tertinggi.

Tabel 1.10

Prevalensi perokok umur ≥ 15 tahun berdasarkan umur mulai merokok di Indonesia tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010

Umur mulai merokok	Tahun				
	1995	2001	2004	2007	2010
5-9	0,6	0,4	1,7	1,9	1,7
10-14	9,0	9,5	12,6	16,0	17,5
15-19	54,6	58,9	63,7	50,7	43,3
20-24	25,8	23,9	17,2	19,0	14,6
25-29	6,3	4,8	3,1	5,5	4,3
30+	3,8	2,6	1,82	6,9	18,6

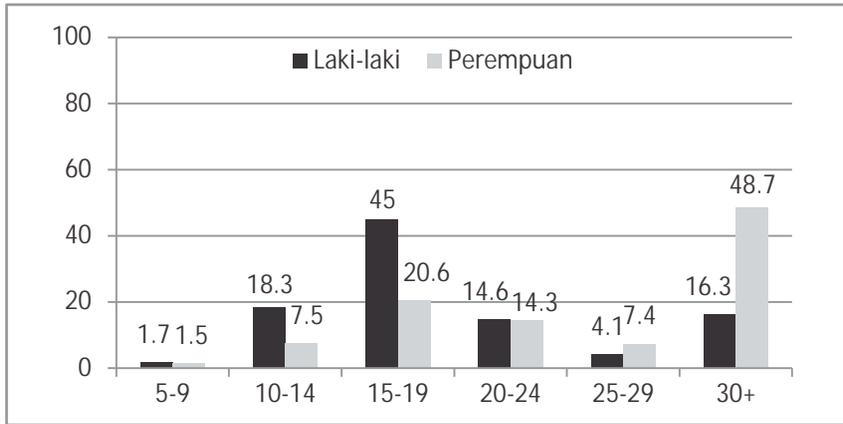
Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007* dan 2010*

Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang; *) tembakau hisap dan kunyah

- Tabel 1.10 menggambarkan pola umur mulai merokok di Indonesia, dengan angka prevalensi tertinggi adalah mulai merokok pada usia 15-19 tahun atau di masa usia sekolah (SMP/SMA) pada semua tahun survey (tahun 1995 s/d 2010).
- Pola prevalensi tidak berbeda sejak tahun 1995. Meskipun demikian terjadi kecenderungan umur mulai merokok usia muda 5 – 14 tahun meningkat dari 9,6% pada tahun 1995 menjadi 19,2% pada tahun 2010.
- Pada kelompok umur mulai merokok 30 tahun ke atas, terjadi peningkatan yang cukup tajam pada dari hasil survey tahun 2004 sebesar 1,82% menjadi 6,9% pada tahun 2007 dan 18,6% pada tahun 2010. Peningkatan dari 6,9% pada tahun 2007 menjadi 18,6% pada tahun 2010 kemungkinan berkaitan dengan merokok sebagai fungsi sosial pada usia produktif kerja.
- Gambar 1.17 menggambarkan prevalensi umur mulai merokok diantara populasi yang pernah merokok atau konsumsi tembakau pada tahun 2010, yang menunjukkan adanya perbedaan pola antara laki-laki dan perempuan.
- Pada laki-laki prevalensi tertinggi terjadi pada kelompok umur 15 – 19 tahun (45%) sedangkan pada perempuan pada umur 30 tahun atau lebih (48.7%).

Gambar 1.17

Prevalensi konsumsi tembakau umur ≥ 15 tahun berdasarkan umur mulai merokok (tahun) pada laki-laki dan perempuan di Indonesia tahun 2010



Sumber: RISKESDAS 2010

Catatan: termasuk pernah merokok/konsumsi tembakau

Tabel 1.11

Prevalensi populasi yang terkena asap rokok orang lain (perokok pasif) di dalam rumah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, Indonesia tahun 2001, 2004, 2007 dan 2010

Kelompok Umur	Persentase perokok pasif											
	2001			2004			2007			2010		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
0-4	69,5	69,6	69,5	NA	NA	NA	59,2	59,0	59,1	56,7	56,9	56,8
5-9	70,6	70,6	70,6	NA	NA	NA	59,3	58,8	59,0	57,7	57,1	57,4
10-14	70,7	70,4	70,6	NA	NA	NA	57,8	59,1	58,4	58,1	56,8	57,5
15-19	51,1	67,6	59	36,1	55,2	45,7	35,1	57,8	46,2	34,5	55,4	44,7
20-24	23,4	65,6	45,6	16,5	52,0	36,1	15,1	56,6	37,2	19,5	56,7	38,1
25-29	9,6	65,5	38,8	8,1	53,9	32,7	8,1	55,8	33,9	11,5	54,2	33,2
30-34	4,3	64,8	35	5,7	53,7	29,0	4,4	53,1	30,4	5,8	51,4	28,7
35-39	2,1	67,4	35,4	7,1	54,6	28,3	3,0	54,0	29,9	3,9	50,7	27,4
40-44	2,5	68,8	34,3	8,6	53,4	28,0	3,1	54,7	30,1	3,9	52,4	28,1
45-49	3,5	67,5	32,9	8,3	54,0	28,1	4,6	55,8	31,0	5,3	53,7	29,3
50+	5,3	56,3	31,9	11,7	38,3	25,0	8,8	44,4	27,1	8,6	44,8	26,9
Total	31,8	66	48,9	11,8	50,0	30,5	26,0	54,5	40,5	24,9	52,9	38,8

Sumber: SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007 dan 2010

Tabel 1.12
Jumlah populasi yang terkena asap rokok orang lain (perokok pasif) di dalam rumah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin Indonesia tahun 2007 dan 2010

Kelompok Umur	Jumlah perokok pasif (orang)					
	2007			2010		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	6.371.809	6.014.790	12.386.600	5.819.353	5.600.299	11.419.652
5-9	7.307.709	6.936.435	14.244.144	7.070.878	6.738.536	13.809.414
10-14	6.925.952	6.777.618	13.703.569	6.865.455	6.218.069	13.083.524
15-19	3.344.070	5.247.592	8.591.661	3.558.940	5.422.462	8.981.402
20-24	1.137.282	4.858.956	5.996.238	1.780.970	5.195.264	6.976.234
25-29	658.103	5.288.081	5.946.184	1.164.135	5.674.372	6.838.507
30-34	351.293	4.888.260	5.239.553	561.096	5.056.105	5.617.201
35-39	252.310	5.011.481	5.263.791	360.602	4.761.234	5.121.836
40-44	228.468	4.480.063	4.708.531	336.286	4.505.715	4.842.001
45-49	312.423	4.029.228	4.341.651	396.109	3.969.997	4.366.106
50+	1.710.277	9.107.741	10.818.017	1.733.996	9.278.484	11.012.480
Total	28.599.696	62.640.245	91.239.939	29.647.820	62.420.537	92.068.357

Sumber: Susenas 1995, SKRT 2001, Susenas 2004, Riskesdas 2007 dan 2010

- Prevalensi perokok pasif masih tinggi, dialami oleh dua dari lima penduduk, dengan jumlah besaran sebanyak 92 juta penduduk (Tabel 1.11 dan 1.12).
- Perokok pasif lebih banyak dialami kelompok umur 0-14 tahun, baik laki-laki atau perempuan. Pada kelompok umur 15 tahun, prevalensi lebih tinggi pada perempuan dibandingkan penduduk laki-laki. Sekalipun tampak ada kecenderungan penurunan perokok pasif dalam 10 tahun terakhir (tahun 2001–2010).
- Secara umum jumlah perokok pasif meningkat pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2007. Total perokok pasif tahun 2010 sebesar 92.068, 357 orang. Perokok pasif perempuan dua kali lebih besar dibandingkan dengan perokok pasif laki-laki.
- Berdasarkan kelompok umur, jumlah perokok pasif terbesar terdapat pada kelompok umur balita dan anak (0 s/d 14 tahun) dan umur 50 tahun ke atas (terutama pada kelompok perempuan).

1.3 Fakta tentang Rokok Kretek

Sejarah munculnya rokok kretek diawali pada tahun 1870 – 1880 di Kudus dimana secara kebetulan bapak H. Djamarie membuat rokok dicampur dengan cengkeh, bila dihisap menimbulkan bunyi kretek-kretek seperti bunyi daun dibakar disebut “*Kemeretek*” dalam bahasa Jawa. Sejak itu, rokok dengan campuran cengkeh dikenal sebagai “Rokok Kretek”.¹ Definisi rokok kretek menurut Standar Industri Indonesia dari Departemen Perindustrian, adalah rokok dengan atau tanpa filter yang menggunakan tembakau rajangan dicampur dengan cengkeh rajangan digulung dengan kertas sigaret, boleh memakai bahan tambahan kecuali yang tidak diizinkan.² Setiap batang rokok kretek mengandung cengkeh sekitar 30% atau kurang lebih 0,7 – 0.9 gram.³

Analisis asap rokok selama ini yang dihitung adalah kadar tar dan nikotin, dimana tar adalah semua zat yang keluar dari asap dikurangi nikotin dan air. Berbeda dengan rokok putih (bukan kretek) asap rokok kretek selain mengandung tar dan nikotin terdapat juga eugenol sebagai hasil pembakaran cengkeh. Eugenol merupakan zat yang mempunyai efek psikotropik dan sinergi dengan nikotin dalam meningkatkan adiksi. Disamping itu eugenol bersifat *mild euphoria* melumpuhkan reflek batuk, anestesi topikal dan *baal/numb* pada daerah mulut dan leher.⁵ Selama ini analisis asap rokok kretek tidak mencantumkan kadar eugenol sendiri tetapi dimasukkan ke dalam tar.

Eugenol merupakan salah satu minyak atsiri yang penting dan banyak digunakan untuk memberikan rasa/ flavor pada produk makanan, parfum, bersifat antiseptik dan bakterisidal.⁶ Dokter gigi sering menggunakan eugenol yang dicampur dengan *Zinc-Oxide* sebagai tambalan sementara untuk menghilangkan rasa sakit pada kasus pulpitis, sebagai anti inflamasi dengan menghambat sintesa prostaglandin, anti bakteri dan topical anestesi.⁷

Smoking machine untuk analisa asap rokok dapat menghitung kadar zat yang terkandung dalam asap setiap batang rokok, seperti nikotin, eugenol, tar, dan CO.^{8,9,10,11} Selama ini yang diwajibkan ditampilkan dalam bungkus rokok adalah kadar tar dan nikotin saja, sementara kadar zat yang bersifat adiktif lainnya tidak diwajibkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Oleh karena itu, sangat penting dicantumkan juga kadar eugenol & CO dalam kemasan rokok.

Tabel 1.13

Rata-rata kandungan nikotin, tar, CO dan Eugenol rokok kretek dan rokok putih

	Rokok kretek	Rokok putih
Nikotin	3,52 mg	0,72 mg
Tar	65,61 mg	7,93 mg
CO	24,36 mg	6,56 mg
Eugenol / cengkeh	12,92 mg	-

Sumber : Analisis dilakukan di laboratorium POM, 2002

Tabel 1.14

Rata-rata kandungan nikotin, tar, CO dan Eugenol pada rokok

	Sigaret putih mesin (SPM)	Sigaret kretek mesin (SKM)	Sigaret kretek tangan (SKT)
Nikotin (mg/batang)	0,7 - 1,36	0,55 - 3,22	1,27 - 3,71
Tar (mg/batang)	7,23 - 17,1	11,56 - 46,85	19,99 - 53,49
Eugenol / cengkeh	-	0,95 - 9,69	1,09 - 14,13

Sumber : Data hasil pengujian Badan POM terhadap hasil sampling rokok di tahun 2010

KESIMPULAN

Eviden/ fakta ilmiah terkini menunjukkan bahwa masalah merokok termasuk konsumsi produk tembakau lainnya di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat bagi perempuan dan laki-laki di hampir semua kelompok umur, pada populasi desa maupun kota, pada setiap tingkatan ekonomi dan tingkat pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa analisa lanjut permasalahan merokok membutuhkan analisa gender dan kelompok umur untuk dapat memberikan gambaran permasalahan merokok yang lebih tajam.

Pada semua kelompok umur, laki-laki cenderung lebih banyak yang mulai merokok pada usia lebih muda, sedangkan pada perempuan lebih banyak yang umur mulai merokok pada umur yang lebih tua (30 tahun ke atas). Meskipun demikian, apabila kita melihat khusus pada kelompok perempuan remaja usia 13 - 15 tahun, angka umur pernah merokok sebelum umur 10 tahun pada remaja perempuan lebih tinggi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki demikian juga tingkat adiksi terhadap rokok (keinginan untuk merokok saat bangun pagi) lebih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki.

Secara umum, konsumsi tembakau di Indonesia didominasi oleh rokok kretek. Rokok kretek merupakan jenis rokok yang memberikan dampak negatif yang lebih buruk bagi kesehatan, dan fakta ini bukan berarti jenis rokok lain tidak berbahaya bagi kesehatan karena apapun jenis rokok akan tetap memberikan dampak negatif bagi

Tabel 1.15
Kandungan tar, nikotin dan Eugenol pada rokok kretek tahun 2003

No	Merek	Nikotin mg/cig	Tar mg/cig	Eugenol mg/cig	Tar minus Eugenol mg/cig
1.	Dji Sam Soe	*2.37	46,6	*9,61	36,99
2.	Sampoerna Hijau 12'	2.22	45,0	9,42	35,55
3.	Panamas Kuning 12'	2.29	46,2	9,45	36,72
4.	GG King Size 12'	*2.10	53,2	*12,10	40,90
5.	Wismilak 12'	2.10	49,4	8,56	40,85
6.	Mister Slim 12'	1.70	28,1	5,10	23,00
7.	Wismilak Slim 12'	1.68	42,2	8,21	34,02
8.	Bentoel Sensasi Sejati 12'	*2.50	51,3	*11,70	39,60
9.	Djarum 76 12'	*2.50	48,5	*9,70	38,80
10.	Djarum Coklat 12'	*2.40	48,80	*11,20	37,60
11.	Grendel OM 10'	1.73	42,74	9,12	33,62
12.	Grendel MI 16'	1.67	45,03	8,35	36,68
13.	Djagung Prima 10'	1.70	41,99	6,26	35,73
14.	Retjo Pentung Sp 10'	2.33	41,63	4,71	36,92
15.	Suket Teki Merah	2.10	45,51	7,33	38,18
16.	Pusaka 12'	2.24	44,79	6,23	38,56
17.	Sejahtera KS Kuning 12'	1.99	40,65	7,57	33,08
18.	Engkol 12'	1.82	39,25	3,63	35,62
19.	Saritoga XQ King 12'	1.76	38,93	4,51	34,42
20.	Bokomas Universal 12'	2.27	39,8	6,52	33,23
21.	Panamas Ijo 12'	2.15	45,6	6,63	39,00
22.	Sukun Merah KS 10'	*2.10	52,9	*12,84	40,07
23.	Oepet SPS Biru Putih 10'	1.70	36,51	6,50	30,01

Sumber : Sampoerna, *Scientific Regulatory Intelligence* 2003, dalam Rachman 2003.

*Kebijakan Pengembangan Industri Olahan Tembakau: Industri dan Perdagangan.*¹²

* Rokok yang paling laris di pasaran yang mempunyai kadar Nikotin & Eugenol tinggi.
(Perusahaan Besar) karena pengaruh adiksi yang tinggi.

kesehatan. Sementara itu, meskipun konsumsi tembakau kunyah secara nasional masih relatif rendah karena hanya beberapa wilayah tertentu di Indonesia yang mempunyai kebiasaan mengunyah tembakau. Gambaran yang lebih spesifik mengenai besaran masalah konsumsi tembakau kunyah akan berbeda di wilayah tertentu di Indonesia yang mempunyai kebiasaan mengunyah tembakau terutama pada kelompok perempuan yang lebih tua.

Fakta besarnya masalah konsumsi tembakau yang terkini menunjukkan bahwa arah upaya pengendalian konsumsi tembakau secara spesifik perlu untuk

mempertimbangkan sasaran intervensi yang sensitif terhadap aspek gender dan kelompok umur, disamping juga memperhatikan aspek wilayah (pedesaan dan perkotaan), pendidikan dan ekonomi.

KEPUSTAKAAN

1. Kemala S, Cengkeh dan Rokok Kretek. Dalam Monograf Tanaman Cengkeh, Balitro Bogor, 1997: 1 – 3.
2. Departemen Perindustrian. *Standart Nasional Indonesia Rokok Kretek*, SNI 0766 – 1989 – A, SII – 0932 – 1984.
3. Chaniago D. Analisis permintaan cengkeh untuk industry rokok kretek di Indonesia. *Pemberitaan LITTRI*, VII; 41: Okt 1981, Maret: 1 – 3.
4. Beyer J, Yurekli AA. *The Economic Aspects of Tobacco Control*. 50-th Anniversary of the Faculty of Economics University of Indonesia. World Bank, LDFEUI. Jakarta, Oktober 3, 2000.
5. Guidotti, T.L, Binder S, Stratton JW, Schechter FG, Jenkins RA. Clove Cigarettes. Development of the Fad and Evidence for Health Effects. *In* : Hollinger M.A : *Current Topics in Pulmonary, Pharmacology and Toxicology*. New York, 1989; 2 : 123.
6. Guenther Ernest. *The essential oil*, diterjemahkan S Ketaran dalam minyak atsiri, UI press. Jakarta, 1990: 484 – 494.
7. Weine FS. *Endodontic therapy*. Toronto, Mosby Co, 1989: 135.
8. ISO 3308 1991. *International Standard*. Routine analytical cigarette – smoking machine. Definitions and standard condition. 3rd ed.
9. ISO – 10315 1991 *International Standard*. *Cigarettes* – Determination of nicotine in smoke condensates – Gas – chromatographic method. 1st ed.
10. ISO – 10362 – 1. 1991. *International Standard*. *Cigarettes* – Determination of water in smoke condensates. 1st ed.
11. ISO – 4387, 1991. *International Standard*. *Cigarettes* – Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine.
12. Rachman 2003. Kebijakan Pengembangan Industri Olahan Tembakau: Industri dan Perdagangan.
13. Farida Soetiarto, Analisis karies spesifik yang berhubungan dengan rokok kretek. Desertasi ilmu epidemiologi, program pascasarjana FKM-UI, 2003.

2

Dampak Kesehatan dan Ekonomi Tembakau

Konsumsi tembakau di Indonesia meningkat secara bermakna, karena faktor-faktor meningkatnya pendapatan rumah tangga, pertumbuhan penduduk, rendahnya harga rokok dan mekanisasi industri kretek. Indonesia menduduki peringkat kelima terbesar di dunia dalam hal konsumsi rokok, setelah Cina, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang. Prevalensi perokok aktif usia 15 tahun ke atas pada tahun 2010 mencapai 34,7% (31,8% pada tahun 2001). Kenaikan tertinggi berada pada perokok perempuan usia 15 tahun ke atas, yaitu dari 1,4% pada tahun 2001 menjadi 4,2% pada tahun 2010.

Tembakau merupakan penyebab tunggal kematian utama yang dapat dicegah. Konsumsi tembakau merupakan hal yang umum karena harganya yang relatif terjangkau, pemasaran yang tersebar luas dan agresif, kurangnya pengetahuan akan bahaya yang ditimbulkan, serta inkonsistensi kebijakan publik terhadap penggunaan tembakau. Kematian prematur karena tembakau biasanya terjadi rata-rata 15 tahun sebelum umur harapan hidup tercapai. Tahun 2010 diperkirakan terdapat 6 juta orang di dunia meninggal (termasuk 190.260 orang di Indonesia) akibat penyakit terkait tembakau. Umumnya penyakit yang terkait dengan tembakau memerlukan waktu bertahun-tahun untuk timbul setelah perilaku merokok dimulai, sehingga epidemi penyakit terkait tembakau dan jumlah kematian di masa mendatang akan terus meningkat.

Tembakau dapat menyebabkan berbagai penyakit, khususnya kanker paru, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung koroner, dan gangguan pembuluh darah, disamping menyebabkan penurunan kesuburan, peningkatan insiden hamil diluar kandungan, gangguan pertumbuhan janin (fisik dan IQ), kejang pada kehamilan, gangguan imunitas bayi dan peningkatan kematian perinatal.

Tabel 2.1

Kecenderungan prevalensi merokok di Indonesia, RISKESDAS 2007 and 2010

	RISKEDAS 2007	RISKEDAS 2010
Prevalensi perokok aktif usia >15 tahun	33,4 %	34,7 %
Prevalensi perokok aktif laki-laki usia >15 tahun	65,3 %	65,9 %
Prevalensi perokok aktif wanita usia >15 tahun	5,0 %	4,2 %
Proporsi penduduk terkena paparan asap rokok di lingkungan (ETS)	84,5 %	76,1 %

Tabel 2.2
Pola penyebab kematian (semua umur) di Indonesia, RISKESDAS 2007

Penyebab kematian	Proporsi kematian (%)	Penyebab kematian	Proporsi kematian (%)
Stroke	15,4	Pneumonia	3,8
Tuberkulosis	7,5	Diare	3,5
Hipertensi	6,8	Ulkus lambung dan ulkus usus 12 jari	1,7
Cedera	6,5		
Perinatal	6	Tifoid	1,6
Diabetes Melitus	5,7	Malaria	1,3
Tumor ganas	5,7	Meningitis Ensefalitis	0,8
Penyakit hati	5,1	Malformasi kongenital	0,6
Penyakit jantung iskemik	5,1	Dengue	0,5
Penyakit saluran nafas bawaan	5,1	Tetanus	0,5
		Septikemi	0,3
Penyakit jantung	4,6	Malnutrisi	0,2

2.1 Metode dalam Pengukuran Dampak Kesehatan dan Ekonomi Tembakau

Studi Morbiditas-Disabilitas Survei Kesehatan Nasional 2001, 2004, dan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2007; serta Survei Disabilitas GBD 2010 memberikan informasi perkiraan nasional untuk usia, jenis kelamin, sebab kesakitan spesifik, tingkat disabilitas untuk berbagai penyakit terkait tembakau.

Data mortalitas, termasuk tingkat kematian karena sebab spesifik (*cause specific mortality rate*) didapatkan dari Riset Kesehatan Dasar 2007, *Indonesia Mortality Registration System Strengthening Project (IMRSSP) 2007 – 2010* (bantuan WHO dan AusAID) dan *Mortality Surveillance of Tuberculosis at Six Provinces (DFID/STOP TB)*. Data demografi didasarkan pada hasil Sensus Penduduk 2010 (BPS 2010).

Beban penyakit tidak menular terkait tembakau diperkirakan dengan menggunakan *Global Burden of Disease Method* (WHO, 2000).

2.2 Sumber Data Epidemiologi

Sebagai sumber data epidemiologi, telah dipergunakan berbagai sumber data seperti surveilans penyakit tidak menular (mortalitas dan morbiditas) yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, berbagai studi lokal, serta Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Biaya pengeluaran medis (rawat inap dan rawat jalan) untuk penyakit terkait tembakau didapatkan dari Buku Tarif INA - DRG RS Umum dan Khusus Kelas C dan D (DepKes R.I. 2007).

Untuk memperkirakan beban penyakit karena tembakau, dipergunakan metode *Global Burden of Disease* dengan ukuran DALYs (*Disability Adjusted Life Years*/tahun produktif yang hilang).

DALYs merupakan ukuran yang mengkombinasikan usia produktif yang hilang karena kematian prematur dan karena sakit atau cacat/disabilitas.

- ✕ DALY = YLL + YLD
- ✕ YLL = *years of life lost due to premature mortality*
- ✕ YLD = *years of life lost due to disability*

$$YLL_i = \frac{KCe^{ra}}{(r+br)^2} \cdot \frac{0}{\beta} - (b+r)(L+a) \cdot (r+br) \cdot ((L+a)-1) - e^{-rL} + br^{\beta}a \cdot ((- (r+br)(a-1))^{\frac{0}{\beta}} + \frac{0a\beta - K}{\beta} \frac{0a\beta}{r} \frac{0a\beta}{\beta} - e^{-rL} \frac{0}{\beta})$$

Di mana,

- r = the discount rate ($r = 0.03$),
- C = the age weighting correction constant ($C = 1$),
- β = the parameter from the age-weighting function,
- K = the age-weighting modulation factor
- a = the age of death
- L = the standard expectation of life at age α

$$YLD_i = r \left\{ \frac{KCe^{ra}}{(r+\beta)^2} \left[e^{-r(r+\beta)L} [-(r+\beta)(L+a)-1] - e^{-r(r+\beta)a} [-(r+\beta)a-1] \right] + \frac{1-K}{r} (1-e^{-rL}) \right\}$$

Dimana,

- a = the age of onset of the disability
- L = the duration of disability
- r = the discount rate ($r = 0.03$)
- b = the age weighting parameter
- K = the age weighting modulation factor
- C = the adjustment constant necessary because of unequal age weights

Pengeluaran biaya untuk membeli rokok dihitung berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2010.

Tabel 2.3
Penduduk Indonesia menurut umur dan jenis kelamin, Sensus Penduduk 2010

Kelompok umur (thn)	Penduduk (x1000)		
	Laki-laki	Wanita	Total
0 - 4	11.659	11.013	22.672
5 - 15	23.630	22.295	45.925
15 - 44	58.717	58.171	116.888
45 - 59	17.293	16.745	34.038
60 - 64	2.926	3.130	6.056
65 - 69	2.224	2.648	4.692
70 - 74	1.531	1.924	3.455
75 +	1.606	2.228	3.833
Total	119.631	117.974	237.605

Tabel 2.3 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (BPS Indonesia), yakni: 237.605.000, yang terdiri dari 119.631 laki-laki dan 117.974 wanita.

Tabel 2.4
Proporsi penyakit utama terkait konsumsi tembakau dan Kode ICD – 10, Indonesia 2010

Nama penyakit	ICD 10 Code	Proporsi penyakit karena tembakau
1. Tumor Mulut dan Tenggorokan	C 00-14	0.7
2. Tumor Oesophagus	C 15	0.3
3. Tumor Lambung	C 16	0.25
4. Tumor Hati	C 22	0.1
5. Tumor Paru, Bronchus dan Trachea	C 33-34	0.9
6. Tumor Mulut Rahim	C 53	0.3
7. Tumor Ovarium	C 56	0.1
8. Tumor Kandung Kemih	C 67	0.1
9. Penyakit Jantung Koroner	I 20-25	0.35
11. Stroke	I 60-69	0.4
12. Penyakit Paru Obstruktif Kronik	J 44-47	0.7
15. Bayi Berat Lahir Rendah	P 05, P 07	0.3

Tabel 2.4 menunjukkan proporsi penyakit terkait konsumsi tembakau berdasarkan studi epidemiologi di Indonesia dan di luar Indonesia. Misalnya, hanya 35% dari

penyakit jantung koroner disebabkan oleh penggunaan tembakau dan 65% lainnya tidak diketahui penyebabnya.

Tabel 2.5 menunjukkan prevalensi perokok dan mantan perokok menurut karakteristik utama, yaitu kelompok umur, jenis kelamin, tempat tinggal, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pengeluaran per kapita.

Tabel 2.6
Jumlah kasus berdasarkan jenis penyakit terkait tembakau dan jenis kelamin, Indonesia, 2010

Penyakit	Jumlah Kasus (ribu)	Laki-Laki (ribu)	Wanita (ribu)
Bayi Berat Lahir Rendah	47.546	23.317	24.229
Tumor Mulut dan Tenggorokan	10.73	6.14	4.59
Tumor Oesophagus	0.46	0.27	0.19
Tumor Lambung	7.20	1.12	6.08
Tumor Hati	1.87	1.14	0.72
Tumor Paru, Bronchus dan Trachea	19.81	14.60	5.21
Tumor Mulut Rahim	7.84	0.00	7.84
Tumor Ovarium	0.71	0.00	0.71
Tumor Kandung Kemih	0.67	0.52	0.15
Penyakit Jantung Koroner	53.74	31.28	22.46
Penyakit Stroke	47.60	24.60	23.00
Penyakit Paru Obstruktif Kronik	183.68	134.18	49.50
Total	384.058	237.167	146.881

Tabel 2.6 menunjukkan jumlah kasus penyakit terkait tembakau menurut jenis kelamin pada tahun 2010. Penyakit paru obstruktif kronik merupakan jenis penyakit terbanyak, diikuti oleh penyakit jantung koroner, penyakit stroke dan tumor paru, bronchus dan trachea; dengan total kasus 384.058 (237.167 laki-laki dan 146.881 wanita).

Jumlah kematian terbanyak disebabkan oleh penyakit stroke, bayi berat lahir rendah/*low birth weight*, serta kanker trachea, bronchus, dan paru. Total jumlah kematian terkait tembakau pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 190.260 kasus (100.680 laki-laki dan 50.520 wanita) atau 12,7% dari total kematian pada tahun yang sama (1.539.288).

Tabel 2.7 menunjukkan total tahun produktif yang hilang (DALYs Loss) pada tahun 2010 karena penyakit terkait tembakau dan diperkirakan sebesar 3.533.000 tahun produktif (2.103.000 laki-laki dan 1.430.000 wanita). Bila dihitung dengan pendapatan per kapita per tahun pada tahun 2010 sebesar US \$3.465,00, maka total

Tabel 2.5

Prevalensi perokok aktif dan mantan perokok usia ≥ 15 tahun menurut kelompok umur, jenis kelamin, tempat tinggal, tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat pengeluaran per kapita, Indonesia, 2010

Karakteristik	Perokok aktif	Mantan perokok
Kelompok umur		
15-24	26,7	3,4
25-34	37,3	3,6
35-44	37,0	4,8
45-54.	38,2	6,1
55-64	37,0	8,1
65-74	33,7	12,2
75+	32,2	14,0
15+	34,7	5,4
Jenis kelamin		
Laki-Laki	65,9	9,4
Wanita	4,2	1,5
Status perkawinan		
Tidak Menikah	33,2	4,0
Menikah	36,5	5,9
Cerai	20,9	5,0
Tempat tinggal		
Perkotaan	32,4	6,3
Pedesaan	37,4	4,3
Tingkat pendidikan		
Tidak sekolah	32,0	5,4
Tidak lulus sekolah dasar	37,8	5,2
Tamat Sekolah Dasar	36,6	4,7
Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	33,1	4,8
Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Kedua	35,5	6,1
Tamat Akademi	25,5	7,9
Pekerjaan		
Tidak Bekerja	13,1	3,6
Mahasiswa	16,1	4,6
Karyawan	35,9	9,0
Pengusaha	46,2	6,6
Buruh/Petani/Nelayan	50,3	5,4
Lainnya	24,7	5,7
Tingkat pengeluaran per kapita		
Quintile 1	35,0	4,1
Quintile 2	36,0	4,7
Quintile 3	36,0	5,3
Quintile 4	34,4	5,9
Quintile 5	32,0	7,2

Tabel 2.7
Total tahun produktif yang hilang (Disability Adjusted Life Years/DALYs Loss)
karena penyakit terkait tembakau, Indonesia 2010

Penyakit	Total (ribu)	Laki-Laki (ribu)	Wanita (ribu)
Bayi Berat Lahir Rendah	409	272	137
Tumor Mulut dan Tenggorokan	546	275	270
Tumor Oesophagus	41	24	17
Tumor Lambung	66	35	31
Tumor Hati	196	122	74
Tumor Paru, Bronchus dan Trachea	650	511	139
Tumor Mulut Rahim	86	-	86
Tumor Ovarium	16	-	16
Tumor Kandung Kemih	13	12	1
Penyakit Jantung Koroner	62	38	24
Penyakit Stroke	538	277	261
Penyakit Paru Obstruktif Kronik	586	437	149
TOTAL	3.533	2.103	1.430

biaya yang hilang berjumlah 12,24 milyar US Dollar atau setara dengan Rp 105,30 triliun.

Beban yang tinggi disebabkan oleh tumor paru, bronchus dan trachea; penyakit paru obstruktif kronik, tumor mulut dan tenggorokan, penyakit stroke dan bayi berat lahir rendah. Meskipun belum diketahui prevalensi merokok di kalangan ibu hamil, tingginya jumlah kasus bayi berat lahir rendah menunjukkan kemungkinan paparan yang tinggi oleh ibu hamil terhadap asap rokok di lingkungan.

Total biaya pelayanan rawat inap penyakit terkait dengan tembakau pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 1,85 triliun rupiah dan total biaya pelayanan rawat jalan mencapai 0,26 triliun rupiah.

Konsumsi rokok rata-rata per orang per hari pada tahun 2010 adalah 11 batang atau 330 batang per bulan. Bila harga per batang rata-rata Rp 500, maka total biaya yang dihabiskan untuk membeli rokok mencapai Rp 165 ribu per bulan atau dalam setahun mencapai Rp 1.880.000,-.

Diperkirakan pada tahun 2010, pengeluaran masyarakat untuk membeli tembakau, mencapai 138 triliun rupiah. Angka ini naik lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun 2007 (90 triliun rupiah)*

Bila seluruh kerugian ekonomi secara makro pada tahun 2010 dijumlahkan, yang

mencakup pengeluaran masyarakat untuk membeli tembakau (138 triliun rupiah), maka kehilangan tahun produktif karena kematian prematur, sakit dan disabilitas (105,3 triliun rupiah), total biaya rawat inap karena penyakit terkait tembakau (1,85 triliun rupiah), dan total biaya rawat jalan karena penyakit terkait tembakau (0,26 triliun rupiah) memberi jumlah kumulatif kerugian ekonomi sebesar 245,41 triliun rupiah. Jumlah ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan cukai rokok untuk tahun yang sama, yakni sebesar 55 triliun rupiah.

KESIMPULAN

Epidemi penggunaan tembakau di Indonesia, menyebabkan terjadinya penyakit tidak menular yang tidak perlu dan sebenarnya dapat dicegah, memperburuk tingkat kesejahteraan keluarga miskin, dan meningkatkan beban ekonomi makro negara.

Penggunaan sumber daya keluarga yang sudah terbatas untuk membeli tembakau, mengurangi pembiayaan untuk keperluan penting lainnya seperti pendidikan, makanan berkualitas dan pelayanan kesehatan.

Kebijakan "*cost-effective*" untuk mengendalikan tembakau harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan, untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan ekonomi.

WHO pada tahun 2008 memperkenalkan paket 6 intervensi kebijakan yang *cost-effective* untuk mengendalikan tembakau, yaitu:

- Meningkatkan pajak dan harga rokok, serta produk tembakau lainnya
- Pelarangan iklan, promosi dan pemberian sponsor oleh industri rokok
- Perlindungan terhadap paparan asap rokok di lingkungan
- Peringatan terhadap bahaya tembakau
- Pertolongan pada mereka yang ingin berhenti merokok
- Memonitor penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahan

Enam kebijakan di atas akan mencegah generasi muda untuk mulai merokok, membantu perokok aktif untuk berhenti merokok, dan mencegah terpaparnya bukan perokok terhadap asap rokok.

Yang dibutuhkan adalah kesungguhan dan komitmen pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta masyarakat madani untuk mengadopsi, dan melaksanakan berbagai kebijakan yang telah terbukti mengurangi penggunaan tembakau dan beban penyakit yang terkait tembakau, menurunkan kematian prematur, dan mengurangi beban ekonomi yang ditimbulkan.

KEPUSTAKAAN

1. Departemen Kesehatan RI. Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik (2007), Buku Tarif INA-DRG RS Umum dan Khusus Kelas C & D. (Keputusan Menteri Kesehatan R.I., No. 1161/MENKES/SK/X/2007 Tanggal 31 Oktober 2007)
2. National Institute of Health Research and Development, Ministry of Health Republic of Indonesia. *Baseline Health Research 2007*. Jakarta, 2008.
3. World Health Organization. *WHO report on the global tobacco epidemic, 2008: the MPOWER package*. Geneva: WHO, 2008.
4. Shafey O, Eriksen M, Ross H, Mackay J. *The tobacco atlas*. 3rd eds. Georgia: American Cancer Society, 2009.
5. Kosen S. *Study on medical expenditures and burden of major of tobacco attributed diseases in Indonesia*. Jakarta: Ministry of Health Republic of Indonesia, National Institute of Health Research and Development, 2010.
6. Tobacco Control Support Center. *Fakta tembakau permasalahannya di Indonesia tahun 2010*. Jakarta, TCSC IAKMI, 2010.
7. US Department of Health and Human Services. *How tobacco smoke causes diseases: the biology and behavioral basis for smoking attributable disease: a report of the surgeon general*. Georgia: Centers for Diseases Control and Prevention, 2010.
8. Badan Pusat Statistik (2011). Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010.
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan - Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Riset Kesehatan Dasar 2010*
10. Kosen S. Current Burden and Economic Costs of Major Tobacco Attributed Diseases in Indonesia. Presented at the World Conference on Tobacco or Health (WCTOH) 2012, Singapore 20-24 March 2012

3

Pertanian Tembakau dan Cengkeh

3.1 Produksi Daun Tembakau

3.1.1 Produksi Global

- Tabel 3.1 menunjukkan bahwa China, Brazil, India, dan Amerika Serikat merupakan negara produsen daun tembakau terbesar di dunia. Pada tahun 2009, keempat negara tersebut memproduksi 4,9 juta ton tembakau atau 68,5% dari total produksi tembakau di dunia. Sementara itu, Indonesia memproduksi tembakau sebesar 176 ribu ton, atau sekitar 2,4% dari total produksi tembakau dunia.
- Pada tahun 2010, keempat negara di atas tetap menjadi negara penghasil tembakau terbesar di dunia, dengan produksi daun tembakau mencapai 4,87 ton atau sekitar 68% dari total produksi dunia. Sementara Indonesia berada di posisi kelima dengan jumlah produksi sebesar 136 ribu ton atau sekitar 1,91% dari total produksi tembakau dunia.
- Dengan demikian, jumlah produksi daun tembakau di Indonesia dari tahun 2009-2010 mengalami penurunan sekitar 23% (tabel 3.1).

Tabel 3.1

Sepuluh besar negara produsen daun tembakau di dunia, 2009 dan 2010

No	Negara	2009		Negara	2010	
		Dalam ton	%		Dalam ton	%
1	China	3.067.928	42,65	China	3.005.753	42,25
2	Brazil	863.079	12,00	Brazil	780.942	10,98
3	India	620.000	8,62	India	755.500	10,62
4	Amerika Serikat	373.400	5,19	Amerika Serikat	326.080	4,58
5	Malawi	208.155	2,89	Malawi	215.000	3,02
6	Indonesia*	176.510	2,45	Indonesia*	135.678	1,91
7	Argentina	159.495	2,22	Argentina	123.300	1,73
8	Italia	119.119	1,66	Pakistan	119.323	1,68
9	Pakistan	104.996	1,46	Zimbabwe	109.737	1,54
10	Zimbabwe	96.367	1,34	Italia	97.200	1,37
	Lainnya	1.403.958	19,52	Lainnya	1445.452	20,32
	Dunia	7.193.007	100	Dunia	7.113.965	100

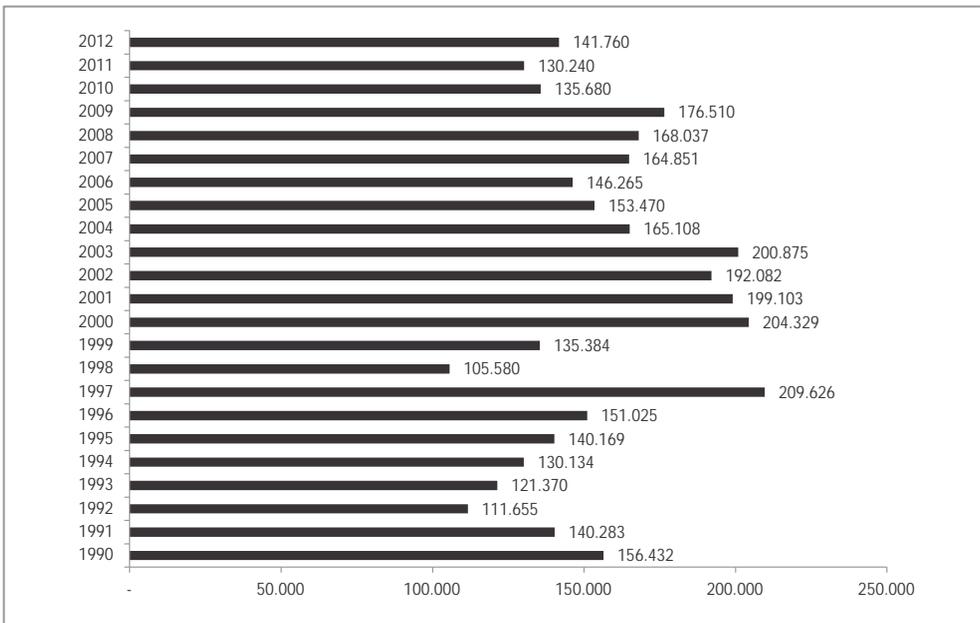
Sumber: diakses dari <http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx> pada 28 Mei 2012

* Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012: Tembakau, 2011, Kementerian Pertanian

3.1.2 Tren Produksi Tembakau di Indonesia

- Selama kurun waktu 1990-2012, jumlah produksi daun tembakau Indonesia berfluktuasi. Tahun 2010 total produksi daun tembakau Indonesia mencapai 135,6 ribu ton (Gambar 3.1).
- Sementara itu, produksi daun tembakau pada tahun 2011 berada pada angka sementara 130,24 ribu ton, dan pada tahun 2012 diestimasi sejumlah 141,76 ribu ton.
- Data juga menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2000 – 2010) terjadi penurunan produksi daun tembakau sebesar 33% dari 204.329 ton menjadi 135.678 ton.

Gambar 3.1
Produksi tembakau Indonesia (ton) tahun 1990-2012



Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012: Tembakau, Kementerian Pertanian, 2011.

*angka sementara (2011) **estimasi (2012)

(Tanda asterisk dihilangkan pada grafik)

3.1.3 Produksi Tembakau Menurut Provinsi

- Tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jawa Tengah merupakan penghasil tembakau terbesar di Indonesia, baik pada tahun 2009 maupun 2010.

- Pada tahun 2009, produksi tembakau ketiga provinsi tersebut mencapai 159 ribu ton atau 90% dari total produksi tembakau nasional. Sementara pada tahun 2010, produksi ketiga provinsi tersebut mencapai 118 ribu ton atau sekitar 87% dari total produksi tembakau nasional.
- Adapun provinsi-provinsi lain seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali, memproduksi tembakau sekitar 10% dari total produksi tembakau nasional (tabel 3.2).

Tabel 3.2
Produksi tembakau menurut provinsi, 2009-2010

Provinsi	2009		Provinsi	2010	
	Produksi (ton)	Persentase (%)		Produksi (ton)	Persentase (%)
Jawa Timur	76.278	43,2	Jawa Timur	53.228	39,2
NTB	51.353	29,1	NTB	38.894	28,7
Jawa Tengah	31.211	17,7	Jawa Tengah	26.530	19,6
Jawa Barat	7.156	4,1	Jawa Barat	7.658	5,6
Sumatera Utara	3.239	1,8	Sumatera Utara	3.458	2,5
Sumatera Selatan	2.572	1,5	Sumatera Selatan	1.759	1,3
Bali	1.899	1,1	Bali	992	0,7
Lainnya	2.802	1,6	Lainnya	3.159	2,3
Jumlah	176.51	100	Jumlah	135.678	100

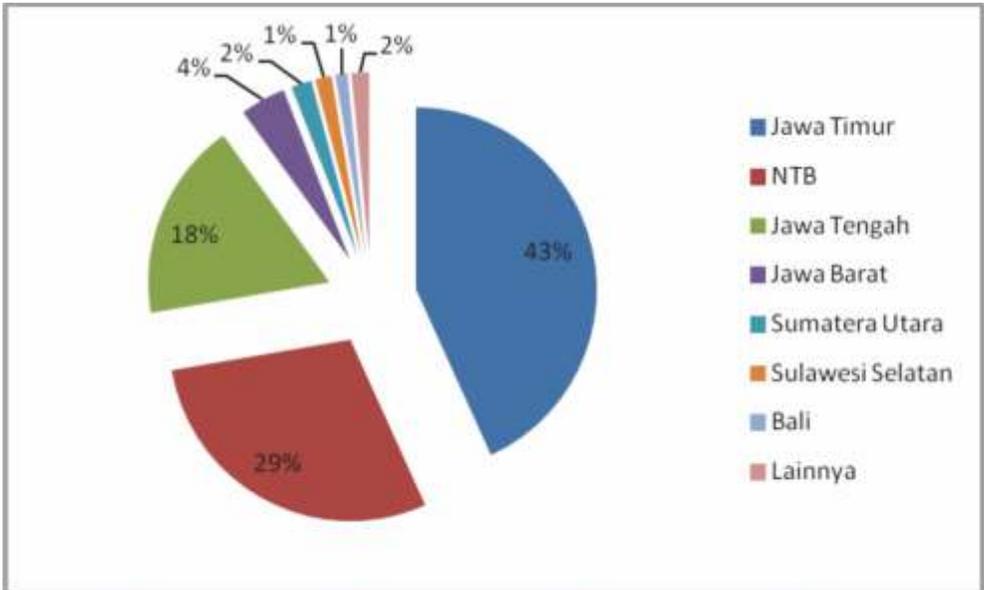
Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012: Tembakau, Kementerian Pertanian, 2011.

3.2 Lahan Tembakau

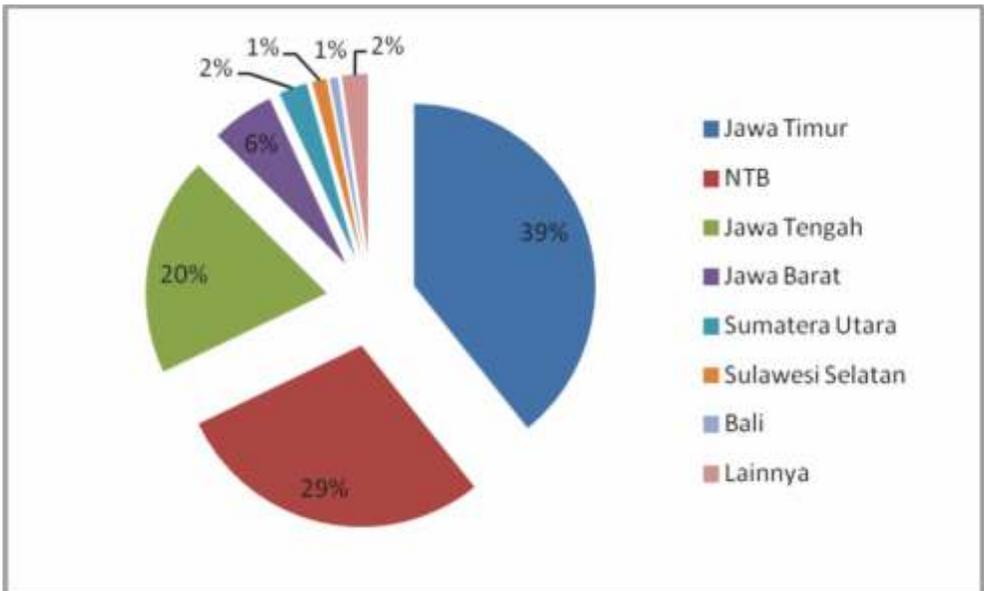
3.2.1 Proporsi Lahan Pertanian Tembakau

- Dalam kurun waktu tahun 1990-2009, persentase luas lahan tembakau terhadap *arable land* menunjukkan kecenderungan yang menurun, yaitu dari 1,16% pada tahun 1990 menjadi 0,87% pada tahun 2009 (tabel 3.3).
- Bersamaan dengan itu, proporsi lahan tembakau terhadap lahan pertanian, menunjukkan kecenderungan yang menurun juga, yaitu dari 0,52% tahun 1990 menjadi 0,38% tahun 2009 (tabel 3.3). Kecenderungan yang menurun ini menunjukkan semakin sedikitnya lahan yang diutilisasi untuk ditanami tembakau.

Gambar 3.2
 Persentase produksi tembakau menurut provinsi, 2009



Gambar 3.3
 Persentase produksi tembakau menurut provinsi, 2010



Tabel 3.3
 Persentase luas lahan tembakau terhadap *arable land** dan lahan pertanian,
 1990-2009

Tahun	Luas lahan tembakau (ha)	Luas <i>arable land</i> (ha) (dalam 000)	Luas lahan pertanian (ha) (dalam 000)	% Lahan tembakau terhadap total <i>arable land</i>	% Lahan tembakau terhadap lahan pertanian
1990	235.866	20.253	45.083	1,16	0,52
1991	214.838	18.081	41.524	1,19	0,52
1992	166.847	18.100	41.351	0,92	0,40
1993	178.496	18.129	42.016	0,98	0,42
1994	193.095	17.126	41.971	1,13	0,46
1995	220.944	17.342	42.187	1,27	0,52
1996	225.475	17.941	42.163	1,26	0,53
1997	248.877	18.500	42.722	1,35	0,58
1998	165.487	18.700	42.922	0,88	0,39
1999	167.271	19.700	43.923	0,85	0,38
2000	239.737	20.500	45.677	1,17	0,52
2001	260.738	20.200	46.300	1,29	0,56
2002	256.081	20.081	46.881	1,28	0,55
2003	256.081	22.406	49.406	1,15	0,52
2004	200.973	24.666	51.766	0,81	0,39
2005	198.212	21.946	49.246	0,90	0,40
2006	172.234	21.500	50.200	0,80	0,34
2007	198.054	22.000	51.000	0,90	0,39
2008	196.627	22.700	52.000	0,87	0,38
2009	204.405	23.600	53.600	0,87	0,38

Sumber: <http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx> pada 28 Mei 2012

Statistik Perkebunan 2010-2-2012: Tembakau, Kementerian Pertanian, 2011.

Catatan: *) *arable land* adalah lahan pertanian semusim

3.2.2 Luas Lahan Tembakau Menurut Provinsi

- Tabel 3.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2009 sekitar 184 ribu hektar atau 90% luas lahan tembakau berada di tiga provinsi yaitu Jawa Timur (55%), Jawa Tengah (21%) dan Nusa Tenggara Barat (15%).
- Sekitar 8% luas lahan tembakau berada di provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta (tabel 3.4).
- Pada tahun 2010, ketiga provinsi tersebut masih merupakan pemilik luas lahan tembakau terbesar, yaitu ensit seluas 193 ribu hektar atau 89% dari

total luas lahan tembakau di Indonesia. Walaupun demikian terjadi sedikit perubahan persentase untuk ketiga provinsi tersebut yaitu Jawa Timur (51%), Jawa Tengah (23%) dan Nusa Tenggara Barat (16%).

Tabel 3.4
Luas lahan tembakau (ha) menurut provinsi, Indonesia, 2009-2010

Provinsi	2009		Provinsi	2010	
	Lahan (ha)	(%)		Lahan (ha)	(%)
Jawa Timur	112.007	54,8	Jawa Timur	109.426	50,6
Jawa Tengah	42.159	20,6	Jawa Tengah	49.358	22,8
NTB	29.759	14,6	NTB	34.699	16,0
Jawa Barat	8.138	4,0	Jawa Barat	9.002	4,2
Sulawesi Selatan	3.440	1,7	Sulawesi Selatan	3.416	1,6
Sumatera Utara	3.317	1,6	Sumatera Utara	3.376	1,6
DIY	1.778	0,9	DIY	2.150	1,0
Lainnya	3.852	1,9	Lainnya	4.844	2,2
Jumlah	204.450	100	Jumlah	216.271	100

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2008-2009 dan 2009-2011: Tembakau, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan.

3.2.3 Luas Lahan Menurut Jenis Tanaman Tembakau

- Tembakau dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu Voor-Oogst dan Na-Oogst. Voor-Oogst adalah kelompok tembakau yang biasa ditanam pada musim hujan dan dipanen pada musim kemarau. Sedangkan Na-Oogst adalah jenis tembakau yang ditanam pada musim kemarau dan dipanen pada musim hujan.
- Jenis tembakau Voor-Oogst antara lain tembakau Virginia, tembakau rakyat, dan tembakau Lumajang. Jenis tembakau Na-Oogst antara lain Besuki NO dan Vorstenlanden. Sebagian besar tembakau yang ditanam di Indonesia termasuk kelompok Voor-Oogst (di atas 90%) dari tahun 2002 hingga 2007 (tabel 3.5).

3.2.4 Luas Lahan Tembakau Rakyat

- Pada tahun 2007, luas lahan yang ditanami tembakau rakyat mencapai 167 ribu hektar atau 78,7% dari total lahan tembakau (tabel 3.5).
- Dari jenis Voor-Oogst, tembakau rakyat paling banyak ditanam petani. Tembakau rakyat banyak ditanam di Jawa Tengah terutama di Kabupaten Temanggung dan Kendal. Tembakau rakyat sendiri merupakan bahan baku

untuk rokok kretek, selain cengkeh dan saos.

3.2.5 Luas Lahan Tembakau Virginia

- Luas lahan tembakau Virginia mencapai 36 ribu hektar atau 17,1% dari lahan tembakau di Indonesia (tabel 3.5).
- Tembakau Virginia ini digunakan sebagai bahan baku rokok putih. Adapun sebagian besar tembakau Virginia ditanam di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur.

3.2.6 Luas Lahan Tembakau Na-Oogst

- Luas lahan tembakau yang ditanam di musim kemarau dan dipanen pada musim hujan mencapai 2800 ha (1,3%) tahun 2007. Yang termasuk kelompok tembakau Na-Oogst adalah Deli (2700 ha), Besuki NO (2800 ha) dan Vorstenland (500 ha) (tabel 3.5).

Tabel 3.5

Areal (ha) dan proporsi (%) lahan tembakau menurut jenis tembakau, 2002-2007

No	Jenis tembakau	2002		2003		2004		2005		2006		2007	
		Luas (ha)	%										
I	Voor Oogst	216.093	94,2	231.563	94,0	179.413	92,4	171.773	95,5	171.773	95,3	205.655	97,1
A	Virginia	39.177	17,1	27.389	11,1	26.723	13,8	26.856	14,9	26.856	14,9	36.166	17,1
B	Rakyat	176.701	77,1	201.934	82,0	150.344	77,4	141.063	78,4	141.063	78,3	166.704	78,7
C	Lumajang	215	0,1	323	0,1	540	0,3	336	0,2	336	0,2	101	0,0
D	White Burley	-	-	1.917	0,8	1.806	0,9	3.518	2,0	3.518	2,0	2.734	1,3
II	Na Oogst	13.225	5,8	14.768	6,0	14.764	7,6	8.104	4,5	8.416	4,7	6.060	2,9
E	Deli	2.900	1,3	2.900	1,2	2.424	1,2	2.424	1,3	2.736	1,5	2.736	1,3
F	Vorstenland	825	0,4	764	0,3	706	0,4	680	0,4	680	0,4	517	0,2
G	Besuki NO	9.500	4,1	11.104	4,5	11.634	6,0	5.000	2,8	5.000	2,8	2.807	1,3
	Jumlah (I+II)	229.318	100	246.331	100	194.177	100	179.877	100	180.189	100	211.715	100

Sumber : Paparan Direktur Jenderal Perkebunan yang disampaikan dalam Acara Dialog Dengan Pakar Demografi FEUI, 6 Juli 2009

3.3 Pekerja di Pertanian Tembakau

3.3.1 Pergeseran Pekerja dari Sektor Pertanian ke Sektor Lain

- Berdasarkan tabel 3.6 terlihat bahwa pada tahun 2010 jumlah pekerja di seluruh sektor mencapai 107 juta atau mengalami peningkatan sekitar 44 juta dibandingkan dengan tahun 1985 yang mencapai 62 juta.

Tabel 3.6
Jumlah pekerja menurut lapangan usaha dan menurut proporsi (%) pekerja
di Indonesia, 1985-2010

Tahun	Jumlah pekerja (dalam 000)				Persentase			
	Pertanian	Industri	Jasa	Total	Pertanian	Industri	Jasa	Total
1985*)	34.174,10	10.344,80	17.938,30	62.457,10	54,7	16,6	28,7	100,0
1986	37.644,50	5.606,00	24.956,50	68.338,20	55,1	8,2	36,5	100,0
1987	38.722,10	5.818,50	25.859,00	70.402,40	55,0	8,3	36,7	100,0
1988	40.557,80	5.996,70	25.958,00	72.518,10	55,9	8,3	35,8	100,0
1989	41.284,20	11.929,80	20.210,80	73.424,90	56,2	16,2	27,5	100,0
1990**)	42.378,30	12.728,20	20.744,10	75.850,60	55,9	16,8	27,3	100,0
1991	41.205,80	13.591,60	21.625,80	76.423,20	53,9	17,8	28,3	100,0
1992	42.153,20	14.031,30	22.333,80	78.518,40	53,7	17,9	28,4	100,0
1993	40.071,90	15.350,90	23.777,80	79.200,50	50,7	19,4	30,0	100,0
1994	37.857,50	18.699,40	25.481,20	82.038,10	46,1	22,8	31,1	100,0
1995*)	35.233,30	18.212,70	26.664,00	80.110,10	44,0	22,7	33,3	100,0
1996	37.720,30	19.450,40	28.531,10	85.701,80	44,0	22,7	33,3	100,0
1997	35.848,60	20.682,50	30.518,60	87.049,80	41,2	23,8	35,1	100,0
1998	39.414,80	18.431,50	29.826,20	87.672,40	45,0	21,0	34,0	100,0
1999	38.378,10	20.051,20	30.387,50	88.816,90	43,2	22,6	34,2	100,0
2000	40.676,70	20.215,40	28.945,60	89.837,70	45,3	22,5	32,2	100,0
2001	39.743,90	21.463,10	29.600,40	90.807,40	43,8	23,6	32,6	100,0
2002	40.633,63	21.866,58	29.146,96	91.647,20	44,3	23,9	31,8	100,0
2003	42.001,44	20.896,27	27.887,21	90.784,90	46,3	23,0	30,7	100,0
2004	40.608,02	22.356,71	30.757,31	93.722,00	43,3	23,9	32,8	100,0
2005	41.814,20	22.671,66	30.516,26	94.948,10	44,0	23,8	32,1	100,0
2006	42.323,19	22.573,60	30.280,31	95.177,10	44,5	23,7	31,8	100,0
2007	42.608,76	23.334,56	31.639,82	97.583,14	43,7	23,9	32,4	100,0
2008	42.689,64	24.457,98	34.902,24	102.049,86	41,8	24,0	34,2	100,0
2009	43.029,49	24.522,74	36.933,21	104.485,44	41,2	23,5	35,3	100,0
2010	42.825,81	25.112,02	39.467,75	107.405,57	39,9	23,4	36,8	100,0

Sumber : *) BPS. 1987 dan 1996. Survei Penduduk Antar Sensus 1985 dan 1995

BPS. 1986-2007. Keadaan Angkatan Kerja Indonesia

**) BPS. 1992. Hasil Sensus Penduduk Indonesia 1990

1) Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan

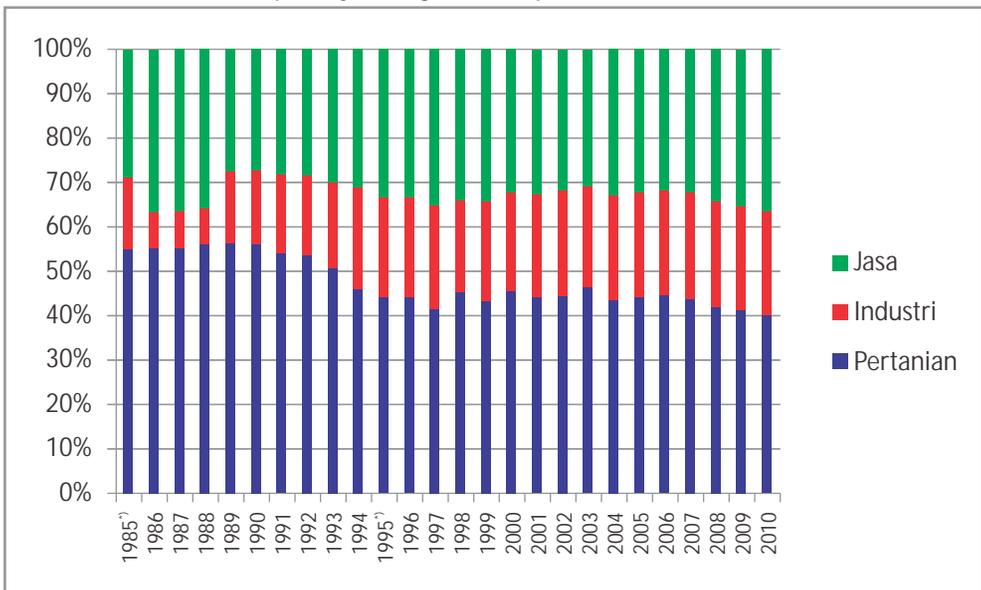
2) Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi; Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi.

3) Perdagangan besar dan ecaran, Restoran and Hotel; Keuangan, Asuransi, Perumahan, Pelayanan bisnis; Kemasyarakatan, sosial dan Pelayanan perorangan; Lainnya

BPS, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 2011.

- Jumlah pekerja tersebut tersebar di sektor pertanian sebanyak 42 juta (40%), sektor industri sebanyak 25 juta (23%) dan sektor jasa sebanyak 39 juta (37%).
- Selama kurun waktu 1985-2010 terjadi transformasi struktural, yaitu terjadi pergeseran secara alamiah sektor-sektor penopang perekonomian. Peran sektor pertanian menurun sedangkan sektor industri dan jasa mengalami kenaikan.
- Jumlah pekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari 55% pada tahun 1985 menjadi 40% pada tahun 2010. Sementara jumlah pekerja sektor industri mengalami kenaikan dari 17% pada tahun 1985 menjadi 23% pada tahun 2010. Begitu juga, jumlah pekerja di sektor jasa mengalami kenaikan dari 29% tahun 1985 menjadi 37% tahun 2010 (tabel 3.6).

Gambar 3.4
Persentase pekerja di tiga sektor perekonomian, 1985-2010



3.3.2 Persentase Petani Tembakau Terhadap Pekerja Sektor Pertanian

- Selama kurun waktu 1996-2010, jumlah petani tembakau berfluktuasi antara 400 ribu hingga 900 ribu orang. Jika dibandingkan dengan jumlah petani di sektor pertanian, maka fluktuasi persentasenya berkisar antara 1,0% hingga 2,6% (tabel 3.7).

- Selama sepuluh tahun terakhir (2000 – 2010) terjadi kenaikan jumlah petani tembakau secara absolut maupun relatif terhadap jumlah seluruh pekerja, dari 665 ribu menjadi 689 ribu atau terjadi kenaikan sebesar 3,61%.
- Proporsi petani tembakau terhadap pekerja sektor pertanian tidak berubah, yaitu tetap pada angka 1,6%. Sementara itu, proporsi petani tembakau terhadap seluruh pekerja menurun dari 0,7% menjadi 0,6%.

Tabel 3.7
Proporsi petani tembakau terhadap jumlah pekerja di sektor pertanian tahun 1996-2010

Tahun	Petani tembakau	Jumlah pekerja di sektor pertanian (000)	Jumlah semua pekerja (000)	% petani tembakau terhadap jumlah pekerja di sektor pertanian	% petani tembakau terhadap seluruh pekerja
1996	668.844	37.720	85.701,80	1,8	0,8
1997	893.620	34.790	87.049,80	2,6	1,0
1998	400.215	39.415	87.672,40	1,0	0,5
1999	636.152	38.378	88.816,90	1,7	0,7
2000	665.292	40.667	89.837,70	1,6	0,7
2001	913.208	39.744	90.807,40	2,3	1,0
2002	808.897	40.634	91.647,20	2,0	0,9
2003	714.699	43.042	90.784,90	1,7	0,8
2004	693.551	40.608	73.722,00	1,7	0,7
2005	683.603	41.814	94.948,10	1,6	0,7
2006	512.338	42.323	95.177,10	1,2	0,5
2007	597.501	42.608	97.583,10	1,4	0,6
2008	595.653	42.689	102.049,80	1,4	0,6
2009	640.998	43.029	104.485,40	1,5	0,6
2010	689.360	42.826	107.405,60	1,6	0,6

Sumber: a) Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012: Tembakau, Kementerian Pertanian, 2011.
b) Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (Sakernas) 1996-2011, BPS, Jakarta

3.3.3 Petani Tembakau Setara Purna Waktu

- Umumnya petani tembakau tidak mencurahkan waktu secara penuh untuk mengelola tanaman tembakau. Selain menanam tembakau petani juga melakukan kegiatan pertanian lain.

- Untuk itu, perlu diketahui berapa jumlah pekerja setara purna waktu (*full time equivalent*=FTE) untuk mengelola pertanian tembakau. Untuk mengestimasi FTE diperlukan data hari orang kerja (HOK) untuk menanam satu hektar tembakau.
- Untuk mengerjakan satu hektar tanaman tembakau, diperkirakan memerlukan 2,54 pekerja setara purna waktu (FTE)¹
- Dengan demikian, jika luas lahan pertanian tembakau pada tahun 2010 mencapai 216 ribu ha maka diperlukan 549 ribu pekerja setara purna waktu.

Tabel 3.8
 Persentase petani tembakau setara purna waktu (*full time equivalent* /FTE),
 1990-2010

Tahun	Lahan tembakau (ha)*	Petani tembakau FTE	% petani tembakau FTE terhadap total pekerja di sektor pertanian	% petani tembakau FTE terhadap total pekerja di seluruh sektor
1990	235,866	599,099	1.41	0.79
1991	214,838	545,688	1.32	0.71
1992	166,847	423,791	1.01	0.54
1993	178,496	453,379	1.13	0.57
1994	193,095	490,461	1.30	0.60
1995	220,944	561,198	1.59	0.70
1996	225,475	572,706	1.52	0.67
1997	248,877	632,148	1.76	0.73
1998	165,487	420,337	1.07	0.48
1999	167,271	424,868	1.11	0.48
2000	239,737	608,932	1.50	0.68
2001	260,738	662,274	1.67	0.73
2002	256,081	650,446	1.60	0.71
2003	256,801	652,274	1.55	0.72
2004	200,973	510,471	1.26	0.54
2005	198,212	503,458	1.20	0.53
2006	172,234	546,130	1.29	0.46
2007	198,054	503,057	1.18	0.52
2008	196,627	499,433	1.17	0.49
2009	204,405	519,189	1.21	0.50
2010	216,271	549,328	1.28	0.51

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012: Tembakau, Kementerian Pertanian, 2011.

- Selama kurun waktu 1990-2010, rata-rata jumlah petani tembakau setara purna waktu berkisar di jumlah setengah juta orang. Dibandingkan dengan jumlah pekerja pertanian di sektor pertanian, persentasenya berkisar antara 1% hingga 1,6%. Sementara itu, dibandingkan dengan pekerja seluruh sektor, maka persentasenya lebih kecil lagi yaitu antara 0,48% hingga 0,79% (tabel 3.8).

3.4 Harga Tembakau

- Harga riil daun tembakau mengalami peningkatan hingga tujuh kali lipat dari Rp 1.016 per kg pada tahun 1996 menjadi Rp 7.580 per kg pada tahun 2006 (tabel 3.9).
- Namun, hal ini tidak berimplikasi pada kesejahteraan petani. Hal ini karena harga daun tembakau ditentukan oleh berbagai faktor seperti kualitas daun, jenis tembakau, dan persediaan daun tembakau di pabrik rokok.
- Dari semua faktor tersebut, faktor yang paling menentukan adalah para *grader*. *Grade* (kualitas) harga daun tembakau ditentukan secara sepihak.
- Petani tidak pernah tahu bagaimana *grader* menentukan harga daun tembakau², sehingga posisi tawar petani berada pada posisi yang lemah. Harga tembakau berlapis-lapis tergantung dari kualitas daun, bahkan ada yang sampai 40 tingkatan mulai dari harga Rp 500 hingga Rp 25 ribu per kg, tergantung penilaian *grader*-nya.

Tabel 3.9
Rata-rata harga daun tembakau kering (Rp/kg), 1996-2006

Tahun	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 ^c
Harga nominal ^a	4.053	4.096	4.295	7.152	12.990	13.688	11.071	19.022	22.302	23.217	20.478	n.a
Harga riil ^b	1.016	2.409	1.441	1.744	2.830	2.413	1.802	3.099	3.516	3.413	7.580	n.a

Keterangan:

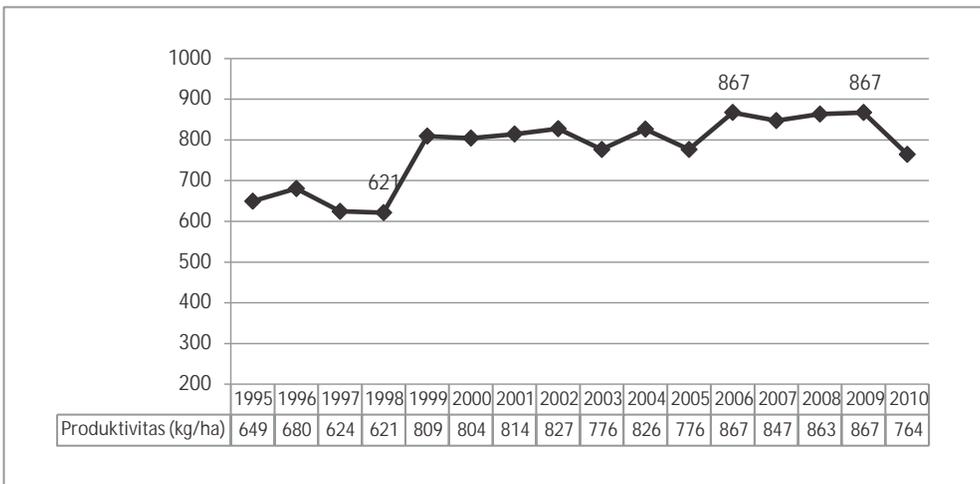
- Untuk harga 1996-2000 berasal dari Statistik Harga Produsen Sektor Pertanian di Indonesia 1996-2000, untuk tahun 2001-2006 berasal dari Statistik Perkebunan Indonesia (Tree Crop Estate Statistic of Indonesia) 2007-2009: Tembakau/Tobacco, Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, 2008
- Indeks Harga Perdagangan Besar Sektor Pertanian (1993=100) berasal dari website Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan+Indonesia/Versi+HTML/statcat.htm?head=10>
- sejak tahun 2007, Ditjen Perkebunan Deptan tidak mengeluarkan harga daun tembakau

3.5 Pendapatan Usaha Tani Tembakau

3.5.1 Produktivitas Lahan Tembakau

- Produktivitas lahan tembakau Indonesia mengalami kenaikan dari 649 kg/ha pada tahun 1995 menjadi 867 kg/ha pada tahun 2009, namun kembali menurun pada tahun 2010 menjadi 764 kg/ha (gambar 3.5).
- Produktivitas lahan tembakau sendiri ditentukan oleh berbagai faktor antara lain: pupuk dan pestisida, bibit, cuaca, dan air yang cukup.
- Sementara itu, mengingat sifat tanaman tembakau yang sangat sensitif, naik turunnya produktivitas tanaman tembakau juga tergantung pada cuaca terutama curah hujan yang tinggi yang dapat merusak daun tembakau dan yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas.

Gambar 3.5
Produktivitas lahan tembakau, 1995-2010



Sumber: Indikator Pertanian, 2011, Badan Pusat Statistik, Jakarta

3.5.2 Keuntungan Usaha Tani Tembakau

- Hasil penelitian Keyser dan Juita (2005) menunjukkan bahwa keuntungan usaha tani tembakau Virginia di Jawa Tengah bervariasi antara Rp 4 juta hingga Rp 10 juta per ha, tergantung dari tingkat pengelolaan tembakau.
- Hasil penelitian lain mengenai analisis usaha tani tembakau rakyat di Klaten tahun 2001 menunjukkan bahwa keuntungan petani tergantung dari jenis irigasi yang digunakan.

Tabel 3.10
 Analisis usaha tani tembakau Virginia di Jawa Tengah (Temanggung dan Klaten),
 2005, dalam Rp (000)

	Tingkat manajemen pengelolaan tembakau*		
	Rendah	Menengah	Tinggi
Hasil panen (kg rajangan kering per ha)			
Biaya produksi (per ha)	600	950	1,200
Biaya input (pupuk, obat dsb)	7.605	9.873	12.907
Total biaya variabel	8.404	10.844	14.162
Total biaya produksi	9.029	11.571	14.911
Total biaya per ton	15.048	12.180	12.426
Pekerja			
Upah buruh non keluarga (hari/ha)	316	430	568
Upah buruh keluarga (hari/ha)	205	263	350
Total upah pekerja (hari/ha)	521	693	918
Keuntungan petani (per ha)			
Keuntungan kotor	4.766	9.471	10.822
Keuntungan bersih	4.141	8.745	10.073

Catatan: Manajemen rendah: petani tradisional yang lebih sedikit membeli input, lebih banyak menggunakan pekerja keluarga. Manajemen sedang: petani yang sudah menggunakan input pertanian dan adanya perbaikan dalam pengelolaan hasil panen. Manajemen tinggi: petani yang telah menggunakan input yang disarankan oleh petugas dan adanya pengelolaan hasil panen yang lebih baik.

Sumber: Keyser, JC and NR Juita, 2005, Smallholder Tobacco Growing in Indonesia: Cost and profitability compared with other agricultural enterprises, HNP Discussion Paper, World Bank

- Keuntungan petani bervariasi yaitu antara Rp. 2 juta per ha per musim hingga Rp. 3 juta per ha per musim³. Jika satu musim tanam tembakau diperkirakan sekitar 4 bulan, maka keuntungan bersih petani tembakau rakyat per bulan berkisar antara Rp. 500 ribu hingga Rp. 750 ribu.
- Pada tabel 3.11 terlihat bahwa jika dibandingkan keuntungan tanaman tembakau dengan tanaman lain, tembakau bukan tanaman yang memberikan keuntungan paling besar, baik dataran rendah maupun dataran tinggi.
- Di dataran rendah, bawang merah, cabe merah, dan melon memberikan keuntungan lebih besar daripada tembakau. Sedangkan, di dataran tinggi, kentang dan cabe merah lebih menguntungkan untuk ditanam sebagai alternatif pengganti tembakau (tabel 3.11)

Tabel 3.11
Perbandingan keuntungan usaha tani beberapa tanaman substitusi tembakau
(Rp 000 /hektar/musim)

Tahun	Komoditas	Pengeluaran	Penerimaan	Keuntungan
Dataran rendah dan medium (0-900 mdpl)	1. Bawang merah	21.140	90.000	68.860
	2. Melon	35.760	87.480	51.720
	3. Cabe merah	19.590	35.000	15.410
	4. Tembakau	19.920	34.720	14.800
	5. Tomat	11.570	21.000	9.430
	6. Semangka	24.540	33.210	8.670
	7. Padi sawah	3.930	10.940	7.010
	8. Jagung hibrida	3.650	9.370	5.720
Dataran tinggi (> 900 mdpl)	1. Kentang	29.590	79.330	49.740
	2. Cabe merah	35.100	85.800	40.700
	3. Tembakau	27.800	67.900	40.100
	4. Tomat	57.600	25.030	32.570
	5. Wortel	14.240	32.400	18.160
	6. Kubis	7.070	16.870	9.800

Sumber: Rachmat, Muchjidin, 2009, *Pertanaman Tembakau di Indonesia dan Alternatif Substitusinya*, Makalah disampaikan dalam Seminar "Substitusi Pertanian Tembakau dalam Merespon Bahaya dan Hukum Merokok" Jakarta, 20 Mei 2009,

3.6 Perdagangan Tembakau

3.6.1 Ekspor Daun Tembakau dan Semua Jenis Produk Terhadap Ekspor Total

- Nilai ekspor tembakau (dalam US\$) mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 142% selama 18 tahun dari US\$ 80,9 juta tahun 1992 menjadi US\$ 195,63 juta tahun 2010.
- Namun, jika dibandingkan dengan total ekspor Indonesia, persentasenya cenderung menurun dari 0,24% tahun 1992 menjadi 0,12% tahun 2010 (tabel 3.12).

3.6.2 Ekspor Tembakau Dibandingkan dengan Hasil Pertanian Lainnya

- Nilai ekspor tembakau mencapai US\$ 57,2 juta dan US\$ 57,7 juta masing-masing untuk tahun 2006 dan 2007 (tabel 3.13).
- Dibandingkan dengan total ekspor sektor pertanian, persentase ekspor tembakau hanya 1,69% tahun 2006 dan 1,55% tahun 2007.

Tabel 3.12
 Nilai ekspor daun tembakau, ekspor migas dan migas (Juta US\$), 1992-2010

Tahun	Ekspor migas	Ekspor non migas	Total ekspor	Ekspor daun tembakau	% Ekspor daun tembakau terhadap total ekspor
1992	10.670,90	23.296,10	33.967,00	80,9	0,24
1993	9.745,80	27.077,20	36.823,00	66	0,18
1994	9.693,60	30.359,40	40.053,00	53,3	0,13
1995	10.464,60	34.953,40	45.418,00	61,5	0,14
1996	11.721,80	38.092,20	49.814,00	85,6	0,17
1997	11.622,50	41.821,10	53.443,60	104,7	0,2
1998	7.872,20	40.975,40	48.847,60	147,6	0,3
1999	9.792,30	38.873,20	48.665,50	91,8	0,19
2000	14.366,60	47.757,40	62.124,00	71,3	0,11
2001	12.636,30	43.684,60	56.320,90	91,4	0,16
2002	12.112,70	45.046,10	57.158,80	76,7	0,13
2003	13.651,40	47.406,80	61.058,20	62,9	0,1
2004	15.645,30	55.939,30	71.584,60	90,6	0,13
2005	19.231,60	66.428,40	85.660,00	117,4	0,14
2006	21.219,90	79.578,70	100.798,60	107,8	0,11
2007	22.088,60	92.012,30	114.100,90	124,4	0,11
2008	29.126,25	107.894,23	137.020,48	133,2	0,1
2009	19.018,30	97.491,70	116.510,00	172,6	0,15
2010	28.039,60	129.739,50	157.779,10	195,63	0,12

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia (*Tree Crop Estate Statistic of Indonesia*) 2010-2011: Tembakau, Kementerian Pertanian, 2011
http://www.kemendag.go.id/statistik_perkembangan_ekspor_impор_indonesia/ (diakses Mei 2012)

- Komoditas pertanian/perikanan lainnya yang nilai ekspornya cukup besar adalah udang (US\$ 920 atau 25%), kopi (US\$ 634 atau 17,3%) dan biji coklat (US\$ 623 atau 17,0%) untuk tahun 2007 (tabel 3.13).

3.6.3 Nilai Ekspor Netto Daun Tembakau

- Selama 20 tahun dari 1990 hingga 2010 ada kecenderungan terjadi peningkatan impor, ekspor daun tembakau.
- Tahun 2010, Indonesia mengimpor 65,7 ton daun tembakau atau 48% dari total produksi, dan mengekspor 57 ton atau sekitar 42% dari total produksi (tabel 3.16).

Tabel 3.13

Nilai dan proporsi ekspor tembakau dibandingkan komoditas pertanian lainnya, 2006 dan 2007 (dalam US\$ juta)

No	Hasil sektor pertanian	2006		2007	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kopi	985,6	29,15	920,5	25,17
2	Udang	620,3	18,34	633,9	17,33
3	Rempah-rempah	583,2	17,25	623,3	17,04
4	The	474,6	14,04	578,0	15,80
5	Ikan dan lain-lain	421,1	12,45	513,7	14,04
6	Biji coklat	188,4	5,57	258,4	7,06
7	Tembakau	57,2	1,69	73,3	2,00
8	Lainnya	51,1	1,51	56,7	1,55
	Jumlah	3381,5	100,00	3657,8	100,00

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Impor (Jilid 1), 2007, BPS, Jakarta

- Pada tahun 2010, meskipun kuantitas ekspor dan impor tidak berbeda jauh tapi nilai impor daun tembakau jauh lebih besar yaitu US\$ 378.710 juta daripada nilai ekspor yaitu US\$ 195.633 juta (tabel 3.12). Dengan demikian, Indonesia defisit US\$ 183.077 juta dalam perdagangan daun tembakau.

3.6.4 Rasio Ekspor Impor Daun Tembakau

- Selama tahun 1990-2009 (20 tahun), Indonesia mengekspor daun tembakau berkisar antara 11,1%-47,3% dari total produksi, tapi juga mengimpor daun tembakau untuk memenuhi kebutuhan industri rokok dalam negeri sebesar 17-48,4% dari total produksi (tabel 3.14).
- Impor daun tembakau terhadap konsumsi berkisar antara 14% hingga 54,8% selama 19 tahun. Dilihat dari rasio impor terhadap ekspor, terlihat bahwa selama 12 tahun Indonesia lebih banyak mengimpor daripada mengekspor (rasio di atas 100), sedangkan 7 tahun sisanya Indonesia lebih banyak mengeskpor daun tembakau (rasio di bawah 100) (tabel 3.14).
- Tabel 3.15 menunjukkan bahwa nilai net ekspor selama 20 tahun (1990-2010) Indonesia selalu mengalami net ekspor negatif yang berarti lebih banyak mengimpor dibandingkan mengekspor (kecuali 1990, 1992 dan 1998).
- Walaupun nilai net ekspor negatif tersebut besarnya cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, akan tetapi lima tahun terakhir nilainya semakin negatif

Tabel 3.14
Proporsi ekspor dan impor daun tembakau terhadap total produksi Indonesia, 1990-2010

Tahun	Impor (ton)	Ekspor (ton)	Produksi (ton)	Konsumsi (ton)	% Impor thd konsumsi	% Impor thd produksi	% Ekspor thd produksi	% Impor thd Ekspor
1990	26.546	17.401	156.432	165.577	18,0	17,0	11,1	152,6
1991	28.542	22.403	140.283	146.422	21,3	20,4	16,0	127,4
1992	25.108	32.365	111.655	104.398	21,1	22,5	29,0	77,6
1993	30.226	37.259	121.370	114.337	23,5	24,9	30,7	81,1
1994	40.321	30.926	130.134	139.529	33,4	31,0	23,8	130,4
1995	47.953	21.989	140.169	166.133	42,0	34,2	15,7	218,1
1996	45.060	33.240	151.025	162.485	32,4	29,8	22,0	135,6
1997	47.108	42.281	209.626	214.453	23,0	22,5	20,2	11,4
1998	23.219	49.960	105.580	78.839	17,5	22,0	47,3	46,5
1999	40.914	37.096	135.384	139.202	31,1	30,2	27,4	110,3
2000	34.248	35.957	204.329	202.620	16,6	16,8	17,6	95,3
2001	44.346	43.030	199.103	200.419	22,4	22,3	21,6	103,1
2002	33.289	42.686	192.082	182.685	16,5	17,3	22,2	78,0
2003	29.579	40.638	200.875	189.816	14,0	14,7	20,2	72,8
2004	35.171	46.463	165.108	153.816	19,9	21,3	28,1	75,7
2005	48.142	53.729	153.470	147.883	30,3	31,4	35,0	89,6
2006	54.514	43.729	146.265	147.050	37,5	37,3	36,7	101,5
2007	69.742	46.834	164.851	187.759	49,1	42,3	28,4	148,9
2008	77.302	50.269	168.037	195.070	54,8	46,0	29,9	153,8
2009	53.199	52.515	176.510	177.194	30,3	30,1	29,8	101,3
2010	65.685	57.408	135.678	143.955	51,6	48,4	42,3	114,4

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012: Tembakau, Kementerian Pertanian, 2011

yang artinya Indonesia semakin banyak mengimpor daun tembakau dimana pada tahun 2010 jumlahnya mencapai US\$ 183.077 juta (tabel 3.15).

3.6.5 Nilai Impor Tembakau Virginia

- Secara keseluruhan nilai impor tembakau Virginia tahun 2010 mencapai US\$ 202 juta (tabel 3.16).
- Pada tahun 2010, urutan nilai impor tembakau Virginia adalah sebagai berikut: China sebesar US\$ 102 juta (51%), Brazil sebesar US\$ 30,1 juta (15%) dan Amerika Serikat sebesar US\$ 24,5 juta (12,1%) (tabel 3.16).

Tabel 3.15
 Nilai ekspor, impor dan nilai ekspor bersih daun tembakau,
 Indonesia 1990-2010

Tahun	Nilai ekspor US\$ (000)	Nilai impor US\$ (000)	Nilai net ekspor US\$ (000)
1990	58.612	41.963	16.649
1991	57.862	58.430	-568
1992	80.949	64.547	16.402
1993	66.014	76.995	-10.981
1994	53.261	100.217	-46.956
1995	61.456	104.474	-43.018
1996	84.623	134.153	-49.530
1997	104.743	157.767	-53.024
1998	147.552	108.464	39.088
1999	91.833	128.021	-36.188
2000	71.287	114.834	-43.547
2001	91.404	139.608	-48.204
2002	76.684	105.953	-29.269
2003	62.874	95.190	-32.316
2004	90.618	120.854	-30.236
2005	117.433	179.201	-61.768
2006	107.787	189.915	-82.128
2007	124.423	267.083	-142.660
2008	133.196	330.510	-197.314
2009	172.629	290.170	-117.541
2010	195.633	378.710	-183.077

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2011: Tembakau, Kementerian Pertanian, 2011.

3.7 Produksi Cengkeh

3.7.1 Produksi Cengkeh Dunia

- Cengkeh merupakan salah satu bahan baku rokok kretek selain tembakau dan saos. Adapun Indonesia, merupakan salah satu negara penghasil cengkeh terbesar di dunia.
- Tabel 3.17 menunjukkan bahwa dua pertiga cengkeh di dunia dihasilkan di Indonesia yang jumlahnya mencapai 84 ribu ton atau 75% (tahun 2007). Namun pada tahun berikutnya, produksi cengkeh Indonesia menurun menjadi 57 ribu ton atau 69% (tahun 2010).

Tabel 3.16
 Impor tembakau Virginia* menurut negara asal, kuantitas dan nilai,
 2009-2010

No	Negara asal	2009				Negara asal	2010			
		Kuantitas (000 kg)		Nilai impor (US\$ 000)			Kuantitas (000 kg)		Nilai impor (US\$ 000)	
		Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%
1	China	16.165	55,5	91.683	51,9	China	17.302	53,6	102.933	50,9
2	Brazil	4.976	17,1	28.957	16,4	Brazil	3.723	11,5	30.128	14,9
3	Amerika Serikat	2.376	8,2	20.775	11,8	Amerika Serikat	3.009	9,3	24.547	12,1
4	Turki	1.325	4,6	9.022	5,1	India	2.536	7,9	11.558	5,7
5	Zimbabwe	986	3,4	6.814	3,9	Filipina	1.202	3,7	4.289	2,1
6	Switzerland	718	2,5	4.639	2,6	Afrika Selatan	752	2,3	5.300	2,6
7	Lainnya	2.567	8,8	14.738	8,3	Lainnya	3.761	11,7	23.346	11,6
	Total	29.113	100	176.628	100	Total	32.288	100	202.106	100

*Keterangan: Tembakau virginia yang dihitung dalam tabel ini meliputi:

a) virginia tobacco, not stemmed/strip/flue cured dan

b) Virginia tobacco partly/wholly stemmed/stripped, flue cured

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012: Tembakau, Kementerian Pertanian, 2011.

Tabel 3.17
 Negara-negara penghasil cengkeh dunia, 2007 dan 2010

No	Negara	2006		2007	
		Dalam ton	%	Dalam ton	%
1	Indonesia	800.404*	71,9	98.386*	79,7
2	Madagaskar	10.000	8,9	8.100	6,6
3	Tanzania	9.900	8,8	8.000	6,5
4	Sri Lanka	3.070	2,7	3.770	3,1
5	Komoro	2.500	2,2	2.800	2,3
6	Lainnya	2.020	1,8	2.410	2,0
	Dunia	111.894	100,0	123.466	100,0

Sumber: <http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor>

* Statistik Perkebunan Indonesia 2007-2009 dan 2010-2012: Cengkeh, Kementerian Pertanian, 2008 dan 2011.

- Tahun 2010 negara penghasil cengkeh selain Indonesia adalah Madagaskar yang memproduksi sebanyak 8.100 ton (10%), Tanzania sebanyak 8.000 ton (9,7%) dan Sri Lanka sebanyak 3 ribu ton (4,6%) (tabel 3.17).

3.7.2 Tren Produksi Cengkeh di Indonesia

- Produksi cengkeh Indonesia selama periode 1990-2010 cenderung mengalami peningkatan dari 66,9 ribu ton tahun 1990 menjadi 98,3 ribu ton tahun 2010, walaupun luas lahan menurun (tabel 3.18).
- Menurut kegunaannya, sebagian besar (80%) produksi cengkeh dipergunakan sebagai bahan baku rokok kretek nasional⁴. Di samping itu, cengkeh bisa juga dipakai sebagai bahan minyak dan obat-obatan.
- Konsumsi cengkeh diestimasi dengan menggunakan rumus konsumsi = produksi + (ekspor-impor).

Tabel 3.18
Perkembangan ekspor, impor, produksi dan konsumsi cengkeh, Indonesia, 1990-2010

Tahun	Ekspor (ton)	Impor (ton)	Produksi (ton)	Konsumsi (ton)
1	2	3	4	(5)=(4)+(3)-(2)
1990	1.105	8	66.912	65.815
1991	1.118	3	80.253	79.138
1992	794	6	73.124	72.336
1993	100	5	67.366	66.671
1994	670	3	78.379	77.712
1995	490	4	90.007	89.521
1996	230	0	59.479	59.249
1997	356	0	59.192	58.836
1998	20.157	1	67.177	47.021
1999	1.776	22.610	52.903	73.737
2000	4.655	20.873	59.878	76.096
2001	6.324	16.899	72.685	83.260
2002	9.399	796	79.009	70.406
2003	15.688	172	76.471	60.955
2004	9.060	9	73.837	64.786
2005	7.680	1	78.350	70.671
2006	11.270	1	61.408	50.139
2007	14.094	0	80.404	66.310
2008	4.251	0	70.535	66.284
2009	5.142	31	81.988	76.877
2010	6.008	277	98.386	92.655

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012: Cengkeh, Kementerian Pertanian, 2011.

- Terjadinya peningkatan impor cengkeh yang drastis setelah krisis ekonomi 1998 yaitu periode 1999-2001. Hal ini terjadi mungkin karena dibubarkannya Badan Penyangga Perdagangan Cengkeh (BPPC).
- Selama periode 1990-2010, konsumsi cengkeh berfluktuasi dari tahun ke tahun antara 50 ribu ton hingga 98 ribu ton (tabel 3.18).

3.8 Lahan dan Pekerja di Perkebunan Cengkeh

3.8.1 Luas Lahan Cengkeh

- Dari tabel 3.19 tampak bahwa selama periode 1990 – 2010, terdapat kecenderungan menurun dari luas lahan cengkeh, yaitu dari 693 ribu ha

Tabel 3.19
Persentase luas lahan cengkeh terhadap luas *arable land*, tahun 1990-2010

Tahun	Lahan cengkeh ^a (ha)	<i>Arable land</i> ^b (1000)(ha)	% Lahan cengkeh thd <i>arable land</i>
1990	692.682	20.253	3,42
1991	668.204	18.081	3,70
1992	608.350	18.100	3,36
1993	571.047	18.129	3,15
1994	534.376	17.126	3,15
1995	501.823	17.342	2,89
1996	491.713	17.941	2,74
1997	457.542	18.200	2,51
1998	428.735	18.700	2,29
1999	415.859	19.700	2,11
2000	415.598	20.500	2,03
2001	429.300	20.200	2,13
2002	430.212	20.081	2,14
2003	442.333	22.406	1,97
2004	438.253	24.666	1,78
2005	448.858	21.946	2,05
2006	444.698	22.000	2,02
2007	453.292	22.000	2,06
2008	456.471	22.700	2,01
2009	467.316	23.600	1,98

Catatan: *arable land* adalah lahan pertanian semusim

Sumber: a) Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012: Cengkeh, Kementerian Pertanian, 2011.

b) <http://faostat.fao.org/site/377/DesktopDefault.aspx?PageID=377#ancor> (diakses Mei 2012)

tahun 1990 menjadi 467 ribu ha tahun 2009.

- Dibandingkan dengan luas lahan pertanian (*arable land*), persentasenya luas lahan cengkeh hanya berkisar antara 2-4% (tabel 3.19).

3.8.2 Luas Lahan Berdasarkan Kepemilikan

- Selama periode 1990-2010, petani kecil menguasai sebagian besar lahan cengkeh, sementara pemerintah dan swasta menguasai lahan lebih sedikit.
- Pada tahun 2010, 98% (461.587 ha) lahan cengkeh dimiliki petani kecil (tabel 3.20).

Tabel 3.20
Luas lahan cengkeh menurut kepemilikan, Indonesia, 1990-2010

Tahun	Luas lahan (ha)			
	Petani kecil	Pemerintah	Swasta	Total
1990	672.607	3.968	16.107	692.682
1991	650.407	3.298	14.499	668.204
1992	592.446	3.086	12.818	608.350
1993	556.496	2.307	12.244	571.047
1994	520.012	2.221	12.143	534.376
1995	491.563	504	9.756	501.823
1996	479.379	1.914	10.420	491.713
1997	447.549	1.928	8.065	457.542
1998	419.827	1.860	7.048	428.735
1999	407.149	1.860	6.850	415.859
2000	407.010	1.860	6.728	415.598
2001	420.341	1.860	7.099	429.300
2002	421.589	1.865	6.758	430.212
2003	433.885	1.865	6.583	442.333
2004	429.728	1.865	6.660	438.253
2005	438.771	1.865	8.221	448.858
2006	436.091	1.905	6.702	444.698
2007	444.683	1.865	6.744	453.292
2008	447.702	1.865	6.905	456.472
2009	458.742	1.905	6.670	467.317
2010	461.587	1.905	6.550	470.042

Sumber : Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012: Cengkeh, Kementerian Pertanian, 2011.

3.8.3 Distribusi Lahan Cengkeh Menurut Pulau dan Provinsi

- Lahan cengkeh terkonsentrasi di dua pulau yaitu Sulawesi (34%) dan Jawa (24%).
- Sementara berdasarkan provinsi, ada 10 provinsi yang mendominasi penanaman cengkeh (80%). Di antaranya Sulawesi Utara (15,7%), Sulawesi Tengah (9,2%), Sulawesi Selatan (9,5%), Jawa Timur (8,9%), serta Jawa Tengah (8,3%) (tabel 3.21).

Tabel 3.21
Distribusi lahan cengkeh (ha) menurut provinsi, tahun 2010

No	Provinsi	Luas (ha)	%
1	Sulawesi Utara	73.891	15,7
2	Sulawesi Tengah	43.438	9,2
3	Sulawesi Selatan	44.542	9,5
4	Jawa Timur	41.964	8,9
5	Jawa Tengah	38.972	8,3
6	Maluku	35.796	7,6
7	Jawa Barat	33.323	7,1
8	Nanggroe Aceh Darusalam	22.609	4,8
9	Maluku Utara	18.352	3,9
10	Bali	15.496	3,3
	Lainnya	101.658	21,6
	Jumlah	470.041	100

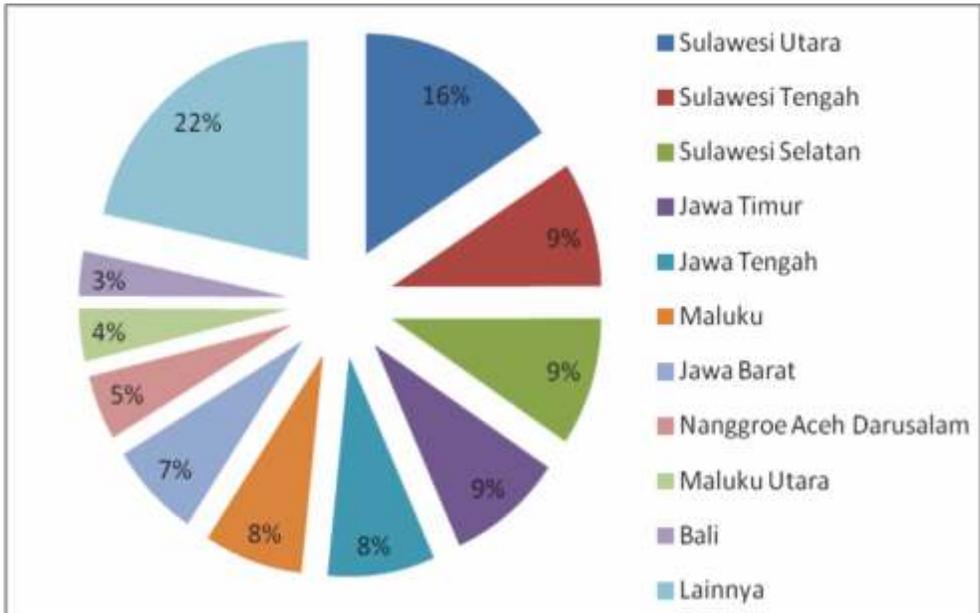
Sumber : Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012: Cengkeh, Kementerian Pertanian, 2011.

3.8.4 Jumlah Petani Cengkeh Menurut Provinsi

- Jumlah petani cengkeh tahun 2010 mencapai 1,039,801 orang atau 2,43% dari total pekerja di sektor pertanian atau 1% terhadap total pekerja.
- Lebih dari 50% petani cengkeh berada di tiga provinsi yaitu Jawa Timur (20,4%), Jawa Tengah (18,9%) dan Jawa Barat (16,5%) (tabel 3.22).
- Berdasarkan luas lahan, lahan cengkeh yang terluas berada di Provinsi Sulawesi Utara (tabel 3.21). Namun berdasarkan jumlah petani cengkeh, jumlah petani terbanyak justru berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kondisi ini terjadi sehubungan dengan kepadatan penduduk yang terpusat di Jawa. Akibatnya, petani di luar Jawa bisa menanam cengkeh pada lahan yang lebih luas dibandingkan dengan petani di Jawa.

- Berdasarkan data jumlah petani cengkeh dari tahun 2004-2010, terdapat penurunan jumlah petani dari 1,1 juta menjadi satu juta (gambar 3.7).

Gambar 3.6
Persentase distribusi lahan cengkeh (ha) menurut provinsi, 2010

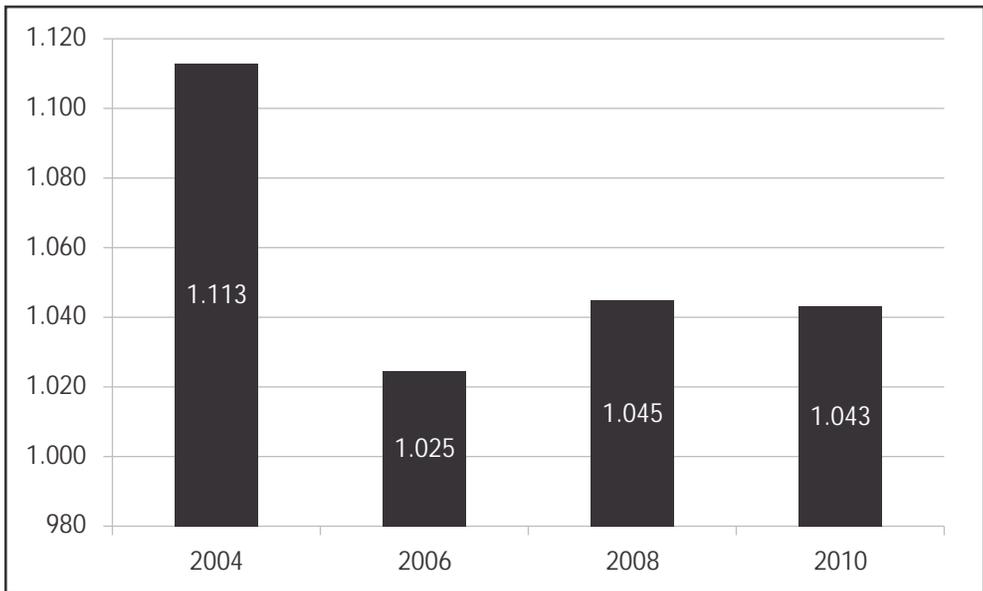


Tabel 3.22
Jumlah petani perkebunan cengkeh menurut provinsi, Indonesia, 2010

No	Provinsi	Jumlah Petani	%
1	Jawa Timur	212.317	20,4
2	Jawa Tengah	196.803	18,9
3	Jawa Barat	171.804	16,5
4	Sulawesi Utara	71.907	6,9
5	Sulawesi Selatan	65.718	6,3
6	Bali	55.641	5,4
7	Maluku	41.908	4,0
8	Sulawesi Tengah	37.485	3,6
9	NTT	23.096	2,2
10	Sumatera Barat	22.492	2,2
	Lainnya	140.630	13,5
	Jumlah	1.039.801	100

Sumber : Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012: Cengkeh, Kementerian Pertanian, 2011

Gambar 3.7
Jumlah petani cengkeh di Indonesia (dalam juta), 2004-2010



3.9 Harga Cengkeh

3.9.1 Tata Niaga Cengkeh

- Dalam upaya untuk mengatur dan menstabilkan harga cengkeh yang kelebihan pasokan 20,000 ton per tahun⁴, pemerintah membentuk Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) melalui Keppres No. 20 tahun 1992.
- Tujuan dibentuknya BPPC adalah untuk memelihara stabilitas harga cengkeh di tingkat petani, melalui kegiatan: a) pembelian dan pengadaan cengkeh hasil produksi dalam negeri milik petani melalui KUD dan; b) penjualan cengkeh kepada pengguna.
- Dalam tata niaga cengkeh ini, harga cengkeh ditetapkan oleh presiden. Petani wajib menjual cengkeh melalui KUD. Selain itu, petani juga wajib membayar sumbangan wajib khusus petani dan dana penyertaan modal yang mekanismenya langsung dipotong dari penjualan cengkeh dari petani.
- Hal ini menyebabkan petani tidak bisa menikmati hasil penjualan cengkeh mereka dan membuat petani cengkeh rugi sehingga banyak petani yang tidak merawat pohon cengkehnya.

3.10 Perdagangan Cengkeh

3.10.1 Ekspor Cengkeh

- Sebagai negara produsen cengkeh terbesar di dunia, Indonesia ternyata tidak banyak mengekspor cengkeh.
- Tabel 3.23 menggambarkan bahwa dari tahun 1990 hingga 1997 ekspor cengkeh Indonesia hanya sekitar satu persen (1%) dari produksi. Pada tahun 1998 terdapat lonjakan kenaikan ekspor hingga mencapai 30%. Namun pada tahun-tahun berikutnya, jumlah ekspor cengkeh berfluktuasi dari 3% hingga 20%. Sementara pada tiga tahun terakhir (2007-2010), produksi cengkeh berada di kisaran yang sama, yaitu 6%.
- Kecenderungan ini menunjukkan bahwa sebagian besar produksi cengkeh diserap untuk konsumsi dalam negeri terutama untuk produksi rokok kretek.

3.10.2 Impor Cengkeh

- Indonesia mulai mengimpor cengkeh dengan jumlah besar sejak tahun 1999 yang mencapai 22,6 ribu ton (42,7% dari total produksi) hingga tahun 2001 yang mencapai 16,9 ribu ton (23,2%).
- Namun sejak tahun 2002 impor cengkeh mulai menurun hingga mencapai 0% tahun 2007, dan sedikit meningkat menjadi 0,28% pada tahun 2010.
- Dilihat dari rasio ekspor impor, hanya selama 3 tahun (1999-2001) Indonesia lebih banyak mengimpor daripada mengekspor, yang ditunjukkan dengan rasio di atas 100. Sebelum dan setelah periode itu, rasio impor dan ekspor nilainya satu persen atau kurang (kecuali tahun 2002 sebesar 8,5% dan tahun 2010 sebesar 4,6%) (Tabel 3.23).
- Kondisi ini tampaknya berkaitan dengan adanya larangan impor cengkeh yang dilakukan oleh pemerintah melalui SK Menteri Perdagangan dan Industri No. 538/2008 tanggal 5 Juli 2002.

Tabel 3.23

Proporsi ekspor dan impor cengkeh terhadap total produksi, Indonesia, 1990-2010

Tahun	Ekspor (ton)	Impor (ton)	Produksi (ton)	% Ekspor thd produksi	% Impor thd produksi	% Impor thd Ekspor
1990	1.105	8	66.912	1,65	0,01	0,72
1991	1.118	3	80.253	1,38	0,00	0,27
1992	794	6	73.124	1,09	0,01	0,76
1993	700	5	67.366	1,04	0,01	0,71
1994	670	3	78.379	0,85	0,00	0,45
1995	490	4	90.007	0,54	0,00	0,82
1996	230	0	59.479	0,39	0,00	0,00
1997	356	0	59.192	0,60	0,00	0,00
1998	20.157	1	67.177	30,01	0,00	0,00
1999	1.776	22.610	52.903	3,36	42,74	1273,09
2000	4.655	20.873	59.878	7,77	34,86	448,40
2001	6.324	16.899	72.685	8,70	23,25	267,22
2002	9.399	796	79.009	11,90	1,01	8,47
2003	15.688	172	76.471	20,51	0,22	1,10
2004	9.060	9	73.837	12,27	0,01	0,10
2005	7.680	1	78.350	9,80	0,00	0,01
2006	11.270	1	61.408	18,35	0,00	0,01
2007	14.094	0	80.404	17,53	0,00	0,00
2008	4.251	0	70.535	6,03	0,00	0,00
2009	5.142	31	81.988	6,27	0,04	0,6
2010	6.008	277	98.386	6,11	0,28	4,6

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012: Cengkeh, Kementerian Pertanian, 2011

KESIMPULAN

Indonesia pada 2010 hanya berkontribusi 1,9% dari produksi dunia. Terjadi penurunan kontribusi dimana pada 2009 kontribusinya sebesar 2,45%. Cina sebagai produsen tembakau terbesar (42%) sudah meratifikasi *Framework Convention Tobacco Center (FCTC)* sebagai komitmen untuk melindungi kesehatan warga.

Untuk periode 2000-2010 produksi tembakau menurun 34%, jumlah petani tembakau stagnan di kisaran 680 ribuan, produktivitas menurun dari 804 kg/ha menjadi 764 kg/ha, dan impor meningkat 2 kali lipat dari 34 ribu ton menjadi 65 ribu ton.

Petani tembakau bukanlah pekerjaan penuh waktu di sepanjang tahun. Mereka hanya bekerja di pertanian tembakau pada musim tembakau. Di musim lainnya mereka bekerja di sektor lain.

KEPUSTAKAAN

1. Perhitungan untuk memperoleh FTE dilakukan dengan menggunakan data dari Temanggung. Penggunaan pekerja per hektar di pertanian tembakau di Temanggung sekitar 254 hari orang kerja (HOK) (Mukani et al, 1991a, 1991b). Jika diasumsikan satu kali panen tembakau memerlukan waktu 4 bulan kerja maka ini setara dengan 100 hari kerja per musim (4 bulan x 25 hari/per bulan=100 hari per musim tanam). Jadi 254 HOK setara dengan 2,54 pekerja purna waktu per hektar per hari (254HOK dibagi 100 hari=2,54 pekerja).

(Sumber: Departemen Kesehatan, 2004, *Fakta Tembakau di Indonesia: Data Empiris untuk Strategi Penanggulangan Masalah Tembakau*)

2. Ahsan, Abdillah et al. 2008, *Kondisi Petani Tembakau di Indonesia: Studi di Tiga Wilayah Penghasil Utama Tembakau*, Kerja sama Lembaga Demografi FEUI dan Tobacco Control Support Center - IAKMI.
3. Saptana, Supena Friyatno Dan Tri Bastuti P. n.d. *Analisis Daya Saing Komoditi Tembakau Rakyat di Klaten Jawa Tengah*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Bogor, website: <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/%287%29%20soca-saptana-supena-daya%20saing%20komoditas%281%29.pdf>.
4. *Prospek Dan Arah Pengembangan Agribisnis Cengkeh'*, edisi ke-2 Badan Litbang Departemen Pertanian, 2007.

Badan Pusat Statistik. 1987 dan 1996. Survei Penduduk Antar Sensus 1985 dan 1995.

Badan Pusat Statistik. 1986-2007. Keadaan Angkatan Kerja Indonesia.

Badan Pusat Statistik. 1992. Hasil Sensus Penduduk Indonesia 1990.

Badan Pusat Statistik. 2011. Indikator Pertanian 2011. Jakarta.

Statistik Perkebunan Indonesia 2008-2009: Tembakau, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI.

Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011: Tembakau, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI.

Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012: Cengkeh, Kementerian Pertanian, 2011.

<http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx>

<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan+Indonesia>

http://www.kemendag.go.id/statistik_perkembangan_ekspor_impор_indonesia

4

Industri Tembakau

Produksi rokok Indonesia meningkat antara tahun 2005 sampai 2011, yakni dari 220 miliar batang menjadi 300 miliar batang (nilai estimasi). Produksi rokok tersebut didominasi oleh rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) sebesar rata-rata 57,7% per tahunnya, kemudian diikuti oleh SKT (Sigaret Kretek Tangan) sekitar 35,5% per tahunnya dan SPM (Sigaret Putih Mesin) rata-rata 6,8 per tahunnya. Krisis moneter yang melanda kawasan negara-negara di Asia Tenggara ternyata tidak mempengaruhi produksi rokok di Indonesia. Tahun 1997-1998, saat inflasi di Indonesia mencapai 70%, produksi rokok di Indonesia tidak terpengaruh oleh inflasi dan tetap tinggi pada 269,8 milyar batang rokok. Pangsa pasar rokok didominasi oleh tiga perusahaan besar yaitu Philip Morris International (PMI) - HM Sampoerna Tbk, Gudang Garam dan Djarum. Sebesar 37% pasar rokok Indonesia dikuasai oleh asing (Philip Morris dan BAT). Untuk jumlah pabrik pengolahan hasil tembakau, terjadi penurunan dari tahun 2009 ke tahun 2011.

Kontribusi industri rokok pada perekonomian tidak signifikan dan cenderung menurun. Antara tahun 1995-2008 kontribusi industri rokok menurun peringkatnya, masing-masing pada tahun 1995, 2000, 2005 dan 2008 dari urutan ke 15, 19, 20 dan 23. Jumlah pekerja industri pengolahan tembakau meningkat lebih dari 70% dari 194.650 pada tahun 1985 menjadi 331.590 pada tahun 2000. Proporsi pekerja sektor industri pengolahan tembakau terhadap total tenaga kerja Indonesia selalu dibawah 1%. Pertumbuhan pekerja industri pengolahan tembakau dibandingkan dengan total pekerja industri seringkali tidak sejalan. Pada tahun 2008-2009, pekerja di sektor pengolahan tembakau menurun 4,18% namun kebalikannya total pekerja industri justru meningkat. Pekerja di industri pengolahan tembakau didominasi oleh perempuan. Perbandingan berkisar 4 : 1 antara perempuan banding laki-laki. Sejak tahun 2000 sampai dengan 2011, rata-rata upah nominal per bulan pekerja industri rokok selalu lebih rendah dari rata-rata upah pekerja industri. Dibandingkan dengan rata-rata upah pekerja di industri makanan, rata-rata upah nominal per bulan pekerja industri rokok juga selalu lebih rendah.

Ekspor rokok merupakan bagian kecil (0,28% – 0,42%) dari total nilai ekspor produk non migas. Dari tahun 2005 sampai 2011, persentase ekspor rokok terhadap produksi selalu di bawah 0,03%. Demikian dengan presentase impor rokok terhadap produksi, presentasinya bahkan kurang dari 0,0002%. Dengan demikian sebagian besar produksi rokok Indonesia adalah untuk konsumsi domestik. Pada tahun 2011, nilai ekspor rokok Indonesia adalah sebesar US\$ 549,8 juta atau sekitar 78,5% nilai

ekspor produk tembakau. Kuantitas rokok yang diekspor sebanyak 59,1 juta kilogram atau sekitar 60% dari total kuantitas ekspor produk tembakau. Pada tahun 2011, nilai ekspor netto dari rokok adalah positif US\$ 543.515.020 dengan nilai ekspor US\$ 549.765.664 dan nilai impor US\$ 6.250.644. Dari enam jenis rokok yang di ekspor oleh Indonesia, nilai ekspor terbesar adalah dari sigaret mengandung tembakau (rokok putih), kedua sigaret kretek, dan ketiga adalah cerutu, cheroots dan cerutu kecil mengandung tembakau. Tahun 2010, tiga besar negara penerima ekspor sigaret kretek dari Indonesia adalah Singapura, Malaysia dan Timor Leste. Sedangkan untuk ekspor rokok selain kretek, negara tujuan ekspor rokok jenis ini didominasi oleh Kamboja, Malaysia, Thailand, Turki dan Singapura. Pada tahun 2010, rokok dari Indonesia paling banyak diekspor ke Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand dan Turki. Sedangkan untuk impor, Indonesia paling banyak mengimpor rokok dari Jerman dan Cina.

4.1 Produksi Rokok

4.1.1 Tren Produksi Rokok

- Berdasarkan pengklasifikasian jenis rokok, dalam periode 2005 – 2010, produksi rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) berada di kisaran 57,7% dari total produksi rokok nasional, diikuti dengan SKT (Sigaret Kretek Tangan) sekitar 35,5% dan SPM (Sigaret Putih Mesin) sekitar 6,8% tiap tahunnya (tabel 4.1)
- Pada tahun 2010, total produksi rokok mencapai 248,4 miliar batang, meningkat 2,48% jika dibandingkan dengan tahun 2009 dimana produksi rokok sebesar 242,4% miliar batang.
- Bila dibandingkan dengan total produksi rokok pada tahun 2008 yang mencapai 249,7 miliar batang, total produksi rokok pada tahun 2009 turun sebesar 2,92%.

Tabel 4.1
Produksi rokok berdasarkan jenis rokoknya, 2005-2010 (miliar batang/tahun)

	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%
a. SKM	126,6	57,5	125,3	57,8	131,7	56,8	144,5	57,9	141,2	58,3	144,2	58,1
b. SKT	78,2	35,5	77,9	35,9	84,3	36,3	88,2	35,3	84,7	34,9	87,2	35,1
c. SPM	15,3	7,0	13,5	6,2	16,0	6,9	17,0	6,8	16,5	6,8	17,0	6,8
	220,1	100,0	216,7	100,0	232,0	100,0	249,7	100,0	242,4	100,0	248,4	100,0

Sumber : Kementerian Keuangan. Nota Keuangan dan RAPBN 2011

- Dari tahun 2010 ke tahun 2011, produksi rokok mengalami kenaikan dari 270 miliar batang menjadi 300 miliar batang.

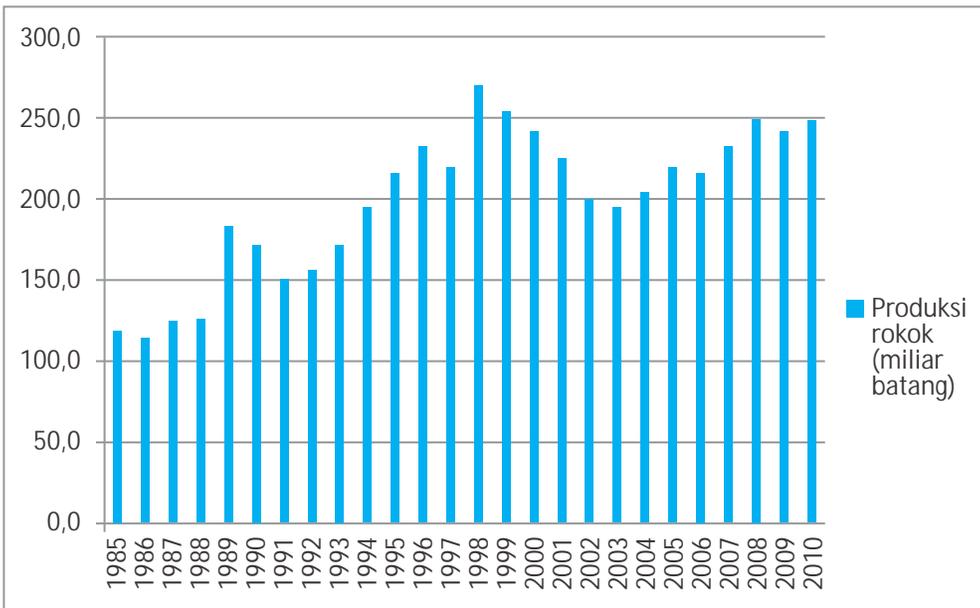
Gambar 4.1
Produksi rokok Indonesia (miliar batang)



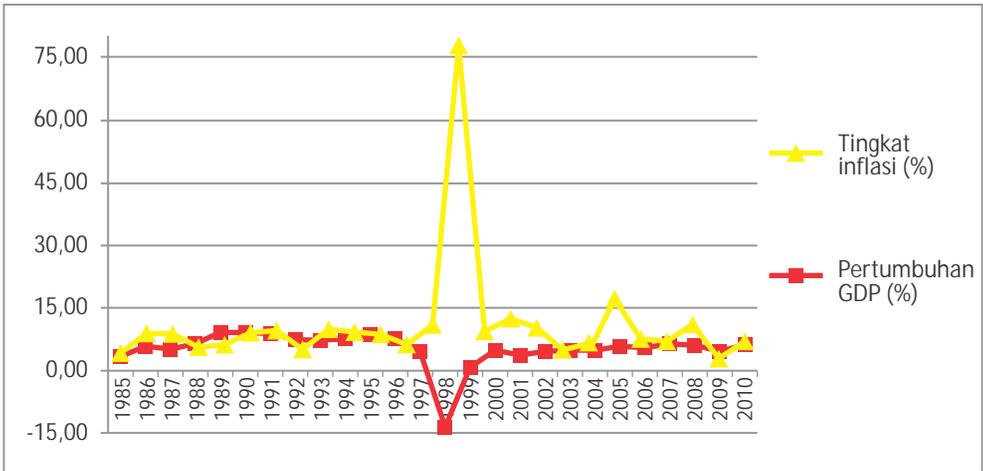
Sumber : Kementerian Perindustrian,

* Kementerian Keuangan, ** Gabungan Perserikatan Produsen Rokok Indonesia

Gambar 4.2
Produksi rokok di Indonesia, 1985-2010



Gambar 4.3
Tingkat inflasi dan pertumbuhan GDP, Indonesia, 1985-2010



Sumber:

- Kementerian Keuangan. *Nota Keuangan dan RAPBN 2011*
- Kementerian Keuangan. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Vol. 7 No. 2, Juni 2003*
- USDA. *Global Agriculture Information Network Report, Indonesia Tobacco and Products Annual 2002-2004*
- BPS. *Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Indonesia, 1985-2010*
- Bank Dunia. *Tingkat Pertumbuhan PDB Indonesia 1985-2010*

4.1.2 Tren Produksi Rokok vs Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

- Krisis moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara tidak mempengaruhi produksi rokok di Indonesia.
- Tahun 1997-1998, saat inflasi di Indonesia mencapai 70%, produksi rokok di Indonesia tidak terpengaruh oleh inflasi dan tetap tinggi pada 269,8 milyar batang rokok (gambar 4.2).
- Pertumbuhan ekonomi minus 13% tidak mengurangi produksi rokok. Setelah krisis berlalu, produksi rokok masih tetap tinggi seperti tahun-tahun saat krisis dimulai (gambar 4.3).
- Tahun 2008, saat tingkat inflasi kembali menunjukkan angka yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yakni mencapai 11%, produksi rokok justru mengalami kenaikan pada 249,7 miliar batang.

4.2 Pangsa Pasar Rokok

4.2.1 Dominasi Industri Besar

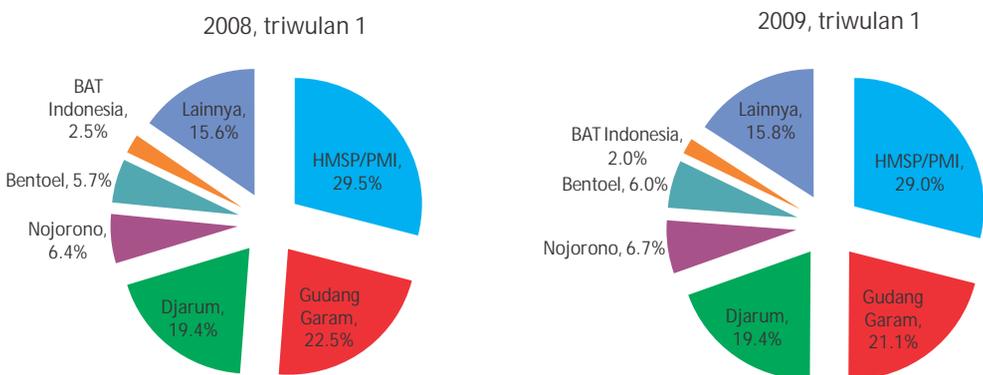
- Pangsa pasar rokok didominasi oleh tiga perusahaan besar yaitu Philip Morris International (PMI) - HM Sampoerna Tbk, Gudang Garam dan Djarum. Secara keseluruhan ketiga perusahaan ini mencakup sekitar 65 persen pangsa pasar.
- Pangsa pasar yang dipegang tiga besar ini, masing-masing adalah 29 persen oleh HM Sampoerna, disusul Gudang Garam dengan 21,1 persen dan Djarum dengan 19,4 persen. BAT dan Bentoel menguasai 8%.
- Sehingga dapat disimpulkan bahwa 37% pasar rokok Indonesia dikuasai oleh Asing (Philip Morris dan BAT)

4.3 Jumlah Industri Rokok

4.3.1 Definisi Skala Industri

Terdapat dua pengelompokan definisi skala industri: 1. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), batasan skala industri adalah sebagai berikut: (a) Industri Besar: jumlah pekerja 100 orang atau lebih; (b) Industri Sedang: jumlah pekerja 20-99 orang; (c) Industri Kecil: jumlah pekerja 5-19 orang; (d) Industri Rumah Tangga: jumlah pekerja 1-4 orang. 2. Menurut Direktorat Cukai, (a) Industri Besar (skala produksi > 2 milyar batang pertahun); (b) Industri Sedang (skala produksi > 500 juta – 2 milyar batang pertahun); (c) Industri Kecil sampai dengan 500 juta batang pertahun. Untuk selanjutnya, dalam buku ini sebagian besar akan menggunakan definisi skala industri menurut Direktorat Cukai.

Gambar 4.4
Pangsa pasar menurut industri rokok, 2008 dan 2009



Sumber: Koran Neraca, 29 Juni 2009

4.3.2. Tren Perkembangan Jumlah Perusahaan Pengolahan Tembakau

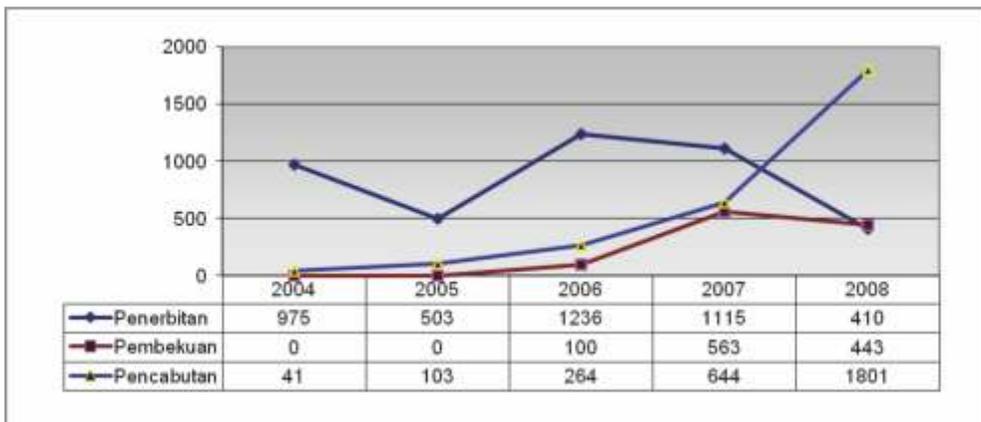
- Pada tahun 2011, terdapat 1.132 pabrik pengolahan tembakau yang terdiri dari 871 pabrik jenis SKT, 242 pabrik jenis SKM dan 19 pabrik jenis SPM (tabel 4.2)
- Pada tahun 2009, terdapat 1.555 pabrik pengolahan tembakau. Jadi dari 2009 ke 2011 pabrik pengolahan tembakau berkurang sebesar 423 pabrik.

Tabel 4.2
Jumlah industri rokok berdasarkan jenis rokok, 2011

Jenis HT	Jumlah pabrik	Jumlah tenaga kerja
SKT	871	579.000
SKM	242	20.400
SPM	19	600
JUMLAH	1.132	600.000

Sumber: Direktorat Cukai, 2011

Gambar 4.5
Jumlah perusahaan baru, pembekuan dan pencabutan ijin usaha, 2004-2008



Sumber: Direktorat Cukai, 2009

- Antara tahun 2004 sampai dengan 2008 jumlah perusahaan pengolahan tembakau mengalami peningkatan dan penurunan yang tajam, hal ini disebabkan pencabutan dan pembekuan ijin usaha industri tembakau.

4.3.3 Kontribusi Industri Rokok pada Perekonomian

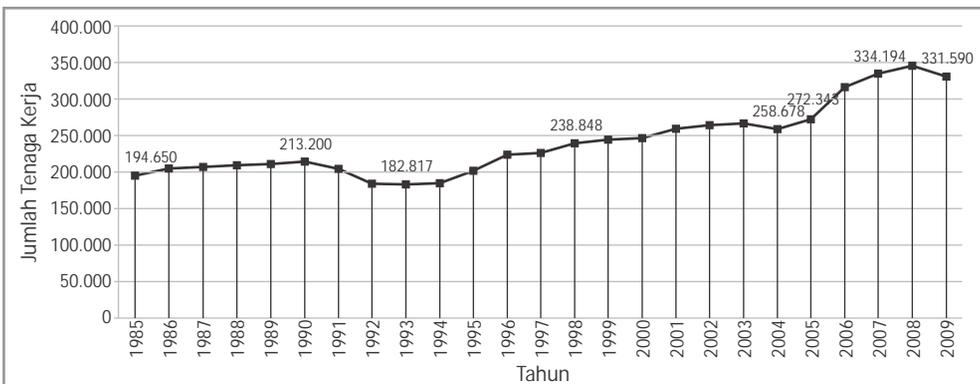
- Kontribusi industri rokok pada perekonomian tidak signifikan dan cenderung menurun.

- Antara tahun 1995-2008 kontribusi industri rokok menurun peringkatnya, masing-masing pada tahun 1995, 2000, 2005 dan 2008 dari urutan ke 15, 19, 20 dan 23.
- Secara nominal kontribusi industri rokok, cengkeh dan perkebunan tembakau meningkat, namun laju peningkatannya tidak secepat dan sebesar sektor lainnya sehingga persentase kontribusinya menurun.
- Secara bersama-sama kontribusi industri rokok, pertanian tembakau dan cengkeh menurun terhadap total penerimaan dalam negeri di tahun 1995, 2000, 2005 dan 2008 masing-masing adalah 2,18%; 1,74%; 1,64% dan 1,49% (tabel 4.3).

4.4 Pekerja di Industri Pengolahan Produk Tembakau

4.4.1 Tren Jumlah Pekerja

Gambar 4.6
Pekerja industri pengolahan tembakau, 1985-2009



Sumber: BPS. Indikator Industri Besar dan Sedang 1985-2009

- Jumlah pekerja industri pengolahan tembakau meningkat lebih dari 70% dari 194.650 pada tahun 1985 menjadi 331.590 pada tahun 2009.
- Tabel 4.4 menggambarkan bahwa proporsi pekerja sektor industri pengolahan tembakau terhadap total tenaga kerja Indonesia selalu dibawah 1%.
- Sejak tahun 1985 sampai 2009 penyerapan pekerja oleh industri pengolahan tembakau hanya berkisar pada angka 0,23% (pada tahun 1992-1994) sampai 0,34% (tahun 2008).

Tabel 4.3
Sumbangan sektor rokok terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk 66 sektor, Indonesia 1995-2008

Kode I-O	Sektor	1995			2000			2005			2008		
		Nominal (Rp. T)	%	Peringkat									
53	Perdagangan	62,645	11,71	1	186,188	13,63	1	331,987	11,54	1	533,55	10,27	1
52	Bangunan	35,748	6,68	3	76,573	5,61	3	206,862	7,19	2	441,64	8,70	2
25	Penambahan minyak gas & panas bumi	25,41	4,75	4	117,156	8,58	2	185,919	6,46	3	312,18	6,01	3
41	Pengilangan minyak bumi	11,399	2,13	13	54,28	3,97	5	135,665	4,72	4	237,67	4,58	4
62	Usaha bangunan dan jasa perusahaan	38,699	7,23	2	51,149	3,74	6	125,356	4,36	5	207,52	4,00	5
34	Industri rokok	10,419	1,95	15	21,859	1,6	19	44,784	1,56	20	73,21	1,41	23
14	Cengkeh	0,512	0,1	61	1,322	0,1	59	1,29	0,04	62	2,42	0,05	60
11	Tembakau	0,682	0,13	60	0,517	0,04	62	1,043	0,04	64	1,83	0,04	63
	Total	535			1.366			2.876			5.193		
	Rokok + tembakau + cengkeh		2,18			1,74			1,64			1,49	

Sumber : BPS. Tabel Input-Output 1995, 2000, 2005 dan 2008 (diolah)

Tabel 4.4
Perbandingan pekerja sektor industri pengolahan tembakau dengan
seluruh pekerja dan pekerja sektor industri, Indonesia 1985-2009

Tahun	Pekerja sektor industri pengolahan tembakau	Jumlah seluruh pekerja	% terhadap seluruh pekerja	Pekerja sektor industri	% terhadap sektor industri
1985	194.650	62.457.100	0,31	10.344.800	1,88
1986	203.800	68.338.200	0,30	5.606.000	3,64
1987	206.150	70.402.400	0,29	5.818.500	3,54
1988	208.500	72.518.100	0,29	5.996.700	3,48
1989	210.850	73.424.900	0,29	11.929.800	1,77
1990	213.200	75.850.600	0,28	12.728.200	1,68
1991	203.072	76.423.200	0,27	13.591.600	1,49
1992	183.817	78.518.400	0,23	14.031.300	1,31
1993	182.817	79.200.500	0,23	15.350.900	1,19
1994	184.817	82.038.100	0,23	18.699.400	0,99
1995	200.770	80.110.100	0,25	18.212.700	1,10
1996	223.307	85.701.800	0,26	19.450.400	1,15
1997	225.640	87.049.800	0,26	20.682.500	1,09
1998	238.848	87.672.400	0,27	18.431.500	1,30
1999	244.457	88.816.900	0,28	20.051.200	1,22
2000	245.626	89.837.700	0,27	20.215.400	1,22
2001	258.747	90.807.400	0,28	21.463.100	1,21
2002	265.378	91.647.200	0,29	21.866.576	1,21
2003	265.666	92.810.800	0,29	20.896.270	1,27
2004	258.678	93.722.036	0,28	22.356.712	1,16
2005	272.343	93.958.387	0,29	22.617.661	1,20
2006	316.991	95.456.935	0,33	22.573.598	1,40
2007	334.194	99.930.217	0,33	23.334.560	1,43
2008	346.042	102.552.750	0,34	24.457.980	1,41
2009	331.590	104.870.663	0,35	24.522.740	1,35

Sumber:

- BPS. Indikator Industri Besar dan Sedang 1985-2009
- BPS. Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 1985-2009

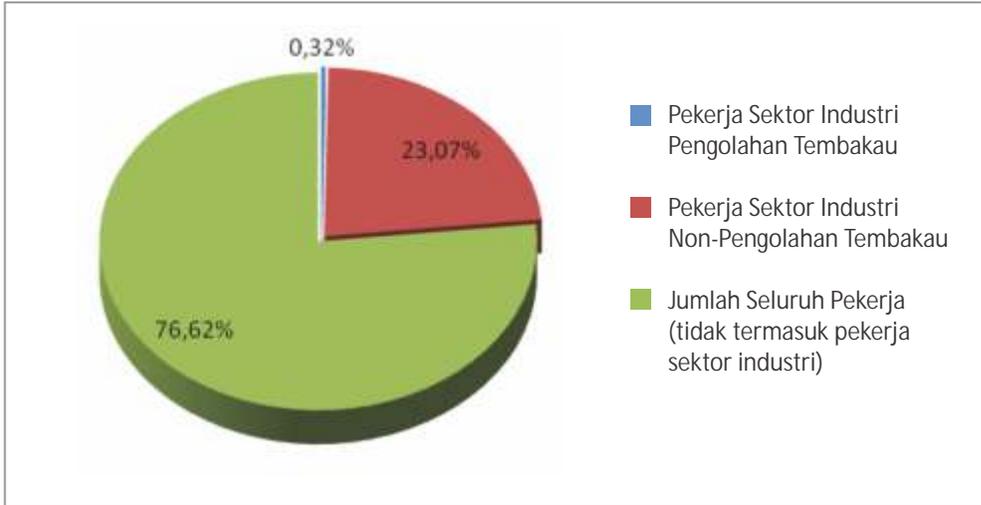
- Jika dilihat dari proporsi pekerja sektor pengolahan tembakau terhadap pekerja sektor industri, daya serap industri pengolahan tembakau terbesar terjadi pada tahun 1986 (3,64%), selanjutnya penyerapan tenaga kerja tersebut cenderung menurun dari tahun ke tahun, menjadi 1,35% pada tahun 2009.

4.4.2 Proporsi Pekerja Industri Pengolahan Produk Tembakau

- Pada tahun 2009, proporsi pekerja industri pengolahan tembakau terhadap keseluruhan tenaga kerja hanya 0,32%.
- Dari 23,39% jumlah pekerja yang bekerja di sektor industri, 1,35% di antaranya bekerja di industri pengolahan tembakau.

Gambar 4.7

Pekerja pengolahan tembakau sebagai proporsi dari seluruh pekerja industri, 2009



Sumber:

- BPS. Indikator Industri Besar dan Sedang 1985-2009

- BPS. Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 1985-2009

4.4.3 Pertumbuhan Pekerja Industri Pengolahan Tembakau

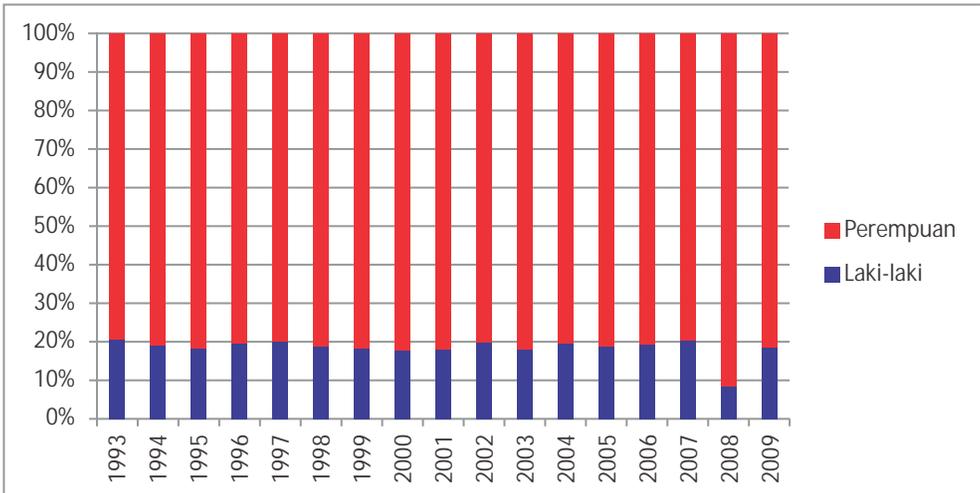
- Pertumbuhan pekerja industri pengolahan tembakau dibandingkan dengan total pekerja industri seringkali tidak sejalan.
- Pada tahun 1997-1998, pekerja industri pengolahan tembakau mengalami pertumbuhan positif (5,53%) sedangkan total pekerja industri mengalami pertumbuhan negatif sebesar 10,88% sebagai akibat krisis moneter.
- Kondisi ini berubah pada tahun 1998 dan 1999. Terjadi penurunan pertumbuhan pekerja di sektor industri pengolahan tembakau sebesar 2,35%. Namun dalam kurun waktu yang sama pertumbuhan total pekerja industri meningkat sebesar 8,79%.
- Hal serupa juga terjadi pada tahun 2008-2009. Pada periode tersebut, pekerja di sektor pengolahan tembakau menurun 4,18% namun kebalikannya total pekerja industri justru meningkat (tabel 4.4).

4.4.4 Pekerja Industri Pengolahan Tembakau Menurut Jenis Kelamin

- Dari tahun 1993-2009, sebagian besar pekerja yang bekerja di industri pengolahan tembakau adalah perempuan (tabel 4.5).
- Perbandingan berkisar 4 : 1 antara perempuan banding laki-laki atau 82% perempuan dan 18% laki-laki.

Gambar 4.8

Tren pekerja perusahaan produk tembakau menurut jenis kelamin, 1993-2009



Sumber: BPS. Statistik Industri Sedang dan Besar 1993-2009 (diolah)

- Pengamatan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa walaupun jumlah total pekerja di industri pengolahan tembakau meningkat, jumlah pekerja perempuan selalu dominan (gambar 4.7).
- Pada tahun 2008, perbandingan pekerja perempuan terhadap pekerja laki-laki sangat signifikan berbeda (laki-laki : perempuan = 1 : 11).

4.4.5 Penghasilan Rata-rata

- Sejak tahun 2000 sampai dengan 2011, rata-rata upah nominal per bulan pekerja industri rokok selalu lebih rendah dari rata-rata upah pekerja industri (gambar 4.8).
- Dibandingkan dengan rata-rata upah pekerja di industri makanan, rata-rata upah nominal per bulan pekerja industri rokok juga selalu lebih rendah.
- Rata-rata upah nominal bulanan pekerja di industri rokok adalah Rp 615,7 ribu, sedangkan di industri makanan Rp 751,6 ribu dan di seluruh industri Rp 901 ribu.

Tabel 4.5
Distribusi pekerja di perusahaan produk tembakau menurut jenis kelamin,
Indonesia 1993-2009

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
	(dalam orang)			(dalam %)		
1993	38.411	147.201	185.612	20,70	79,30	100
1994	41.193	174.836	216.029	19,07	80,90	100
1995	45.046	200.960	246.006	18,31	81,69	100
1996	43.372	179.935	223.307	19,40	80,60	100
1997	45.439	180.904	226.343	20,10	79,90	100
1998	44.793	194.055	238.848	18,80	81,20	100
1999	44.277	200.245	244.522	18,10	81,90	100
2000	43.549	202.077	245.626	17,73	82,27	100
2001	46.037	212.710	258.747	17,79	82,21	100
2002	53.227	212.151	265.378	20,06	79,94	100
2003	47.529	218.137	265.666	17,89	82,11	100
2004	49.948	208.730	258.678	19,31	80,69	100
2005	51.120	221.193	272.313	18,77	81,23	100
2006	60.325	256.666	316.991	19,03	80,97	100
2007	68.075	266.119	334.194	20,37	79,63	100
2008	30.069	346.042	376.111	7,99	92,01	100
2009	61.730	269.860	331.590	18,62	81,38	100

Sumber: BPS. Statistik Industri Sedang dan Besar 1993-2009

Gambar 4.9
Tren rata-rata upah nominal buruh di bawah mandor pada industri
tembakau/rokok, industri makanan dan seluruh industri menurut kuartal,
2000-2011 (dalam ribuan)



Sumber: BPS. Statistik Upah 2000-2011

Tabel 4.6
Rata-rata upah nominal per bulan buruh industri di bawah mandor,
Indonesia 2000-2011 (dalam ribuan)

Tahun/ kuartal	Tembakau/ rokok	Makanan	Seluruh industri	% tembakau terhadap makanan	% tembakau terhadap seluruh industri
2000/2	223,3	265,7	384,0	84,0	58,2
2000/3	247,3	323,6	412,3	76,4	60,0
2000/4	246,4	315,9	420,0	78,0	58,7
2001/1	283,3	353,1	473,6	80,2	59,8
2001/2	283,7	380,6	522,9	74,5	54,3
2001/3	290,6	384,4	539,6	75,6	53,9
2001/4	319,3	401,1	539,1	79,6	59,2
2002/1	348,4	453,9	617,1	76,8	56,5
2002/2	384,4	504,9	666,4	76,1	57,7
2002/3	324,9	483,4	653,6	67,2	49,7
2002/4	329,6	477,0	676,3	69,1	48,7
2003/1	384,4	458,1	727,7	83,9	52,8
2003/2	451,2	535,0	722,3	84,3	62,5
2003/3	443,7	560,7	713,9	79,1	62,2
2003/4	431,5	504,3	730,8	85,6	59,0
2004/1	505,8	586,0	819,1	86,3	61,8
2004/2	492,5	609,6	853,2	80,8	57,7
2004/3	502,7	584,7	839,9	86,0	59,9
2004/4	541,4	613,3	851,8	88,3	63,6
2005/1	505,3	620,3	876,6	81,5	57,6
2005/2	632,2	667,3	911,6	94,7	69,4
2005/3	744,2	799,9	939,4	93,0	79,2
2005/4	610,7	812,9	940,0	75,1	65,0
2006/1	802,2	894,3	982,2	89,7	81,7
2006/2	740,0	922,7	993,6	80,2	74,5
2006/3	738,1	918,0	954,2	80,4	77,4
2006/4	793,1	924,4	957,4	85,8	82,8
2007/1	803,1	932,2	876,4	86,2	91,6
2007/2	739,8	926,2	906,3	79,9	81,6
2007/3	778,8	937,1	938,9	83,1	82,9
2007/4	807,6	900,7	940,0	89,7	85,9
2008/1	747,0	870,0	1.093,4	85,9	68,3

Lanjutan Tabel 4.6
Rata-rata upah nominal per bulan buruh industri di bawah mandor,
Indonesia 2000-2011 (dalam ribuan)

Tahun/ kuartal	Tembakau/ rokok	Makanan	Seluruh industri	% tembakau terhadap makanan	% tembakau terhadap seluruh industri
2008/2	783,9	873,0	1.091,0	89,8	71,9
2008/3	781,9	889,9	1.098,1	87,9	71,2
2008/4	785,8	886,5	1.103,4	88,6	71,2
2009/1	753,9	980,5	1.134,7	76,9	66,4
2009/2	766,0	985,9	1.148,6	77,7	66,7
2009/3	763,7	1.000,5	1.160,1	76,4	65,8
2009/4	763,6	1.003,5	1.172,8	76,1	65,1
2010/1	799,3	1.013,4	1.182,4	78,9	67,6
2010/2	911,0	1.091,5	1.222,2	83,5	74,5
2010/3	922,7	1.146,1	1.386,4	80,5	66,6
2010/4	943,3	1.139,9	1.386,9	82,8	68,0
2011/1*	968,3	1.145,0	1.353,5	84,6	71,5
2011/2*	940,2	1.233,4	1.284,7	76,2	73,2
2011/3*	962,7	1.264,3	1.246,3	76,1	77,2

Sumber: BPS. Statistik Upah 2000-2011

Catatan: *) Angka Sementara

- Selama periode 2000-2011, proporsi rata-rata upah nominal pekerja industri rokok dibandingkan dengan pekerja industri makanan adalah 81,6%, dibandingkan dengan pekerja seluruh industri adalah 66,8%.

4.5 Perdagangan Tembakau

4.5.1 Nilai Ekspor Rokok Terhadap Total Nilai Ekspor

- Tabel 4.7 menunjukkan bahwa ekspor rokok merupakan bagian kecil (0,28% – 0,42%) dari total nilai ekspor produk non migas.
- Dibandingkan terhadap jumlah seluruh nilai ekspor, produk rokok hanya memberikan kontribusi pemasukan 0,22% sampai 0,35% antara tahun 1999-2011.

4.5.2 Kuantitas Ekspor Rokok

- Tabel 4.8 menggambarkan bahwa dari tahun 2005 sampai 2011, persentase ekspor rokok terhadap produksi selalu di bawah 0,03%. Demikian dengan presentase impor rokok terhadap produksi, presentasinya bahkan kurang dari 0,0002%

Tabel 4.7
 Nilai ekspor rokok dan produk industri lainnya (dalam juta US\$), 1999-2011

Tahun	Ekspor migas	Ekspor non migas	Total ekspor	Ekspor rokok	% ekspor rokok terhadap total ekspor	% ekspor rokok terhadap ekspor non migas
1999	9.792,3	38.873,2	48.665,5	116,8	0,24	0,30
2000	14.366,6	47.757,4	62.124,0	143,6	0,23	0,30
2001	12.636,3	43.684,6	56.320,9	176,9	0,31	0,41
2002	12.112,7	45.046,1	57.158,8	162,2	0,28	0,36
2003	13.651,4	47.406,8	61.058,2	140,2	0,23	0,30
2004	15.645,3	55.939,3	71.584,6	156,9	0,22	0,28
2005	19.231,6	66.428,4	85.660,0	200,3	0,23	0,30
2006	21.219,9	79.578,7	100.798,6	223,2	0,22	0,28
2007	22.088,6	92.012,3	114.100,9	291,0	0,25	0,32
2008	29.126,2	107.894,2	137.020,4	357,8	0,26	0,33
2009	19.018,3	97.491,7	116.510,0	410,5	0,35	0,42
2010	28.052,7	129.679,9	157.732,6	465,1	0,29	0,36
2011	41.477,0	162.019,6	203.496,6	549,8	0,27	0,34

Sumber: BPS. Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor 1999-2011

Tabel 4.8
 Rasio ekspor dan impor rokok terhadap produksi, Indonesia, 2005-2011

Tahun	Impor (KG)	Impor (ribu batang)	Ekspor (KG)	Ekspor (ribu batang)	Produksi (ribu batang)	% impor terhadap produksi	% ekspor terhadap produksi
2005	247.338	0,25	37.024.070	37,02	220.100	0,00011	0,01682
2006	147.624	0,15	42.002.602	42,00	216.700	0,00007	0,01938
2007	69.198	0,07	48.148.869	48,15	232.000	0,00003	0,02075
2008	363.628	0,36	58.387.937	58,39	249.700	0,00015	0,02338
2009	313.823	0,31	56.698.101	56,70	242.400	0,00013	0,02339
2010	358.008	0,36	55.181.992	55,18	248.400	0,00014	0,02221
2011	372.494	0,37	59.045.788	59,05	300.000	0,00012	0,01968

Sumber:

- BPS. Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor dan Impor 2005-2011

- Kementerian Keuangan. Nota Keuangan dan RAPBN 2011

Catatan:

*1 batang rokok = 1 gram

- Dengan demikian sebagian besar produksi rokok Indonesia adalah untuk konsumsi domestik.

4.5.3 Nilai Ekspor Rokok

- Pada tahun 2011, nilai ekspor rokok Indonesia adalah sebesar US\$ 549,8 juta atau sekitar 78,5% nilai ekspor seluruh produk tembakau (tabel 4.9).
- Kuantitas rokok yang diekspor sebanyak 59,1 juta kilogram atau sekitar 60% dari total kuantitas ekspor seluruh produk tembakau.

4.5.4 Nilai Ekspor Rokok Netto

- Pada tahun 2011, nilai ekspor netto dari rokok adalah positif US\$ 543.515.020 dengan nilai ekspor US\$ 549.765.664 dan nilai impor US\$ 6.250.644 (tabel 4.9).
- Dari enam jenis rokok yang di ekspor oleh Indonesia, nilai ekspor terbesar adalah dari sigaret mengandung tembakau (rokok putih) yaitu sebesar US\$ 418.538.365, kedua sigaret kretek (US\$ 89.062.834), dan ketiga adalah cerutu, cheroots dan cerutu kecil mengandung tembakau US\$ 36.355.704 (Tabel 4.9).

Tabel 4.10
Negara tujuan ekspor kretek menurut kuantitas dan nilai, Indonesia 2010

No	Negara	Sigaret kretek (HS 2402209010)					
		Berat bersih (KG)	%	% kumulatif terbesar ke	Nilai (US\$)	%	% kumulatif terbesar ke
1	Singapura	4.272.067	52,3	tiga terbesar 85,4	52.427.890	57,3	tiga terbesar 83,3
2	Malaysia	2.185.728	26,8		19.331.080	21,1	
3	Timor Leste	515.264	6,3		4.447.926	4,9	
4	Saudi Arabia	300.099	3,7	lima terbesar 92,3	4.423.428	4,8	lima terbesar 92,4
5	Paraguay	262.750	3,2		3.945.810	4,3	
6	United Arab Emirates	157.053	1,9	sepuluh terbesar 98,0	1.813.880	2,0	sepuluh terbesar 97,7
7	Filipina	132.870	1,6		1.035.000	1,1	
8	Jepang	81.089	1,0		1.151.337	1,3	
9	Brunei Darussalam	0.469	0,7		547.667	0,6	
10	India	4.176	0,4		325.872	0,4	
	Lainnya	162.246	2,0		2.087.373	2,3	
	Total	8.163.811	100		91.537.263	100	

Sumber: BPS. Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor 2010

Tabel 4.9
Ekspor dan impor rokok Indonesia, Januari-Desember 2011

HS	Deskripsi Komoditas	Ekspor		Impor		Netto = Ekspor-Impor	
		Berat bersih (KG)	Nilai (US\$)	Berat bersih (KG)	Nilai (US\$)	Berat bersih (KG)	Nilai (US\$)
2402100000	Cerutu, cheroots dan cerutu kecil mengandung tembakau	2.351.190	\$ 36.355.704	101.414	\$ 1.343.301	2.249.776	\$ 35.012.403
2402201000	Beedies	523.018	\$ 5.313.401	4.987	\$ 157.634	518.031	\$ 5.155.767
2402209010	Sigaret kretek	6.882.321	\$ 89.062.834	13.469	\$ 89.764	6.868.852	\$ 88.973.070
2402209090	Sigaret mengandung tembakau	48.797.041	\$ 418.538.365	235.708	\$ 4.633.393	48.561.333	\$ 413.904.972
2402901000	Cerutu, cheroots dan cerutu kecil dari pengganti tembakau	10.525	\$ 107.872	-	-	10.525	\$ 107.872
2402902000	Sigaret dari pengganti tembakau	481.693	\$ 387.488	2.430	\$ 26.552	479.263	\$ 360.936
	TOTAL	59.045.788	\$ 549.765.664	358.008	\$ 6.250.644	58.687.780	\$ 543.515.020
	Total produk tembakau	98.487.740	700.747.346	116.601.076	587.783.896	(18.113.336)	112.963.450
	% Rokok terhadap total produk tembakau	60%	78,5	0,3%	1,1%		

Sumber: BPS. Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor & Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor 2011

Catatan: HS: Homoginized System: sistem pengkodean yang digunakan dalam statistik ekspor dan impor. Antara tahun 2004 sampai dengan 2007 terjadi 2 kali perbedaan kode. Statistik tahun 2004 masih menggunakan kode HS 1996 dengan 9 digit, tahun 2005 dan 2006 menggunakan kode HS 2004 dengan 10 digit dan sejak 2007 dilakukan revisi HS2004 dengan digunakan kode HS 2007 yang juga 10 digit.

4.5.5 Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Rokok Kretek

- Dari tabel 4.10, tampak bahwa pada tahun 2010, tiga besar negara penerima ekspor sigaret kretek dari Indonesia adalah Singapura, Malaysia, dan Timor Leste.
- Menurut kuantitasnya, negara tujuan ekspor sigaret kretek Indonesia pertama adalah Singapura (52,3%) dan diikuti oleh Malaysia (26,8%) dengan nilai ekspor masing-masing adalah 57,3% dan 21,1%.
- Baik dari segi kuantitas maupun nilai ekspor, lebih dari 83% ekspor sigaret kretek adalah ke Singapura dan Malaysia, sedangkan jika ditambahkan dengan Timor Leste, persentase ekspor mencakup 92,3% dari segi kuantitas dan 92,4% dari nilai.

Tabel 4.11

Negara tujuan ekspor rokok selain kretek menurut kuantitas dan nilai Indonesia 2010

No	Negara	Sigaret kretek (HS 2402209090)					
		Berat bersih (KG)	%	% kumulatif terbesar ke	Nilai (US\$)	%	% kumulatif terbesar ke
1	Kamboja	29.527.641	63,3	tiga terbesar 88,8	171.011.873	51,3	tiga terbesar 87,4
2	Malaysia	8.354.447	17,9		99.472.131	29,8	
3	Thailand	3.550.171	7,6		21.058.172	6,3	
4	Turki	2.026.883	4,3	lima terbesar 95,6	8.025.500	2,4	lima terbesar 93,3
5	Singapura	1.135.59	2,4		11.356.081	3,4	
6	Filipina	961.085	2,1	sepuluh terbesar 99,8	7.738.538	2,3	sepuluh terbesar 99,9
7	Vietnam	575.724	1,2		9.858.975	3,0	
8	Lebanon	178.752	0,4		705.600	0,2	
9	Timor Leste	128.734	0,3		3.111.123	0,9	
10	United Arab Emirates	125.274	0,3		586.240	0,2	
	Lainnya	73.373	0,2		486.990	0,1	
	Total	46.637.243	100		333.411.223	100	

Sumber: BPS. Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor 2010

4.5.6 Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Rokok Selain Kretek

- Negara tujuan ekspor rokok selain kretek pada tahun 2010 didominasi oleh Kamboja, Malaysia, Thailand, Turki dan Singapura.
- Tabel 4.11 menunjukkan bahwa tiga besar secara kuantitas urutannya

adalah Kamboja (63,3%), Malaysia (17,9%) dan Thailand (7,6%).

- Secara nilai pun urutannya sama yakni Kamboja (51,3%), Malaysia (29,8%) dan Thailand (6,3%).
- Lima besar negara penerima ekspor sigaret selain kretek dari Indonesia menyumbang lebih dari 95% ekspor dari segi kuantitas atau 93,3% memberi devisa dari ekspor sigaret selain kretek.

Tabel 4.12

Perbandingan ekspor rokok menurut negara tujuan berdasarkan berat dan nilai, Indonesia 2009-2010

2009					
No	Negara	Rokok (HS2402209010 dan 2402209090)			
		Berat bersih (KG)	%	Nilai (US\$)	%
1	Malaysia	8.016.092	35,0	83.755.020	40,8
2	Thailand	5.551.554	24,2	30.370.881	14,8
3	Sngapore	5.116.054	22,3	54.879.871	26,7
4	Turkey	1.684.987	7,4	6.706.100	3,3
5	Philippines	474.708	2,1	6.251.199	3,0
	Lainnya	2.072.322	9,0	23.438.838	11,4
	Total	22.915.717	100	205.401.909	100

2010					
No	Negara	Rokok (HS2402209010 dan 2402209090)			
		Berat bersih (KG)	%	Nilai (US\$)	%
1	Cambodia	29.553.087	53,8	171.309.433	40,3
2	Malaysia	10.540.175	19,2	118.803.211	27,9
3	Singapore	5.407.226	9,8	63.783.971	15,0
4	Thailand	3.564.129	6,5	21.172.917	5,0
5	Turkey	2.042.014	3,7	8.257.870	1,9
	Lainnya	3.812.867	6,9	41.998.115	9,9
	Total	54.919.498	100	425.325.517	100

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor 2009 & 2010

4.5.6.a Perbandingan Nilai Ekspor Tahun 2009 dengan 2010

- Pada tahun 2009 lima besar negara tujuan ekspor rokok dari Indonesia diduduki oleh Malaysia, Thailand, Singapura, Turki dan Filipina.

- Pada tahun 2010, negara tujuan ekspor rokok Indonesia terbesar adalah Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand dan Turki.
- Pada tahun 2009, ekspor rokok Indonesia ke Malaysia secara kuantitas mencapai 35% sehingga Malaysia menjadi negara tujuan ekspor rokok Indonesia yang terbesar, namun pada tahun 2010 presentase tersebut menurun menjadi hanya 19,2%.
- Tahun 2009, Kamboja tidak termasuk lima besar negara tujuan ekspor rokok Indonesia. Namun pada tahun 2010, Kamboja justru menjadi negara pertama tujuan ekspor rokok dari Indonesia dengan presentase ekspor sebesar 53,8% menurut kuantitasnya.

Tabel 4.13

Perbandingan impor rokok menurut negara asal berdasarkan berat dan nilai, Indonesia 2009-2010

2009					
No	Negara	Rokok (HS2402209010 dan 2402209090)			
		Berat bersih (KG)	%	Nilai (US\$)	%
1	Jerman	151.157	55,9	1.158.150	41,1
2	China	49.039	18,1	1.172.117	41,6
3	Indonesia	25.536	9,4	115.920	4,1
4	Brazil	18.900	7,0	144.698	5,1
5	Singapura	17.367	6,4	70.052	2,5
	Lainnya	8.365	3,1	158.401	5,6
	Total	270.364	100	2.819.338	100

2010					
No	Negara	Rokok (HS2402209010 dan 2402209090)			
		Berat bersih (KG)	%	Nilai (US\$)	%
1	Hongkong	150.455	60,4	2.453.603	51,9
2	China	67.977	27,3	1.820.276	38,5
3	Jerman	12.079	4,8	110.595	2,3
4	Singapura	10.747	4,3	144.282	3,1
5	Jepang	4.526	1,8	100.244	2,1
	Lainnya	3.393	1,4	94.157	2,0
	Total	249.177	100	4.723.157	100

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor 2009 & 2010

4.5.6.b Perbandingan Nilai Impor Tahun 2009 dengan 2010

- Pada tahun 2009 Indonesia paling banyak mengimpor rokok dari Jerman (55,9%) dan China (18,1%) (tabel 4.13).
- Tahun 2010, Jerman menjadi negara ketiga yang mengimpor rokok untuk Indonesia, sedangkan posisi pertama digantikan oleh Hongkong dengan presentase 60,4%.
- Posisi kedua tetap diduduki oleh China dengan presentase naik menjadi 27,3%.
- Impor dari kedua negara ini sudah mencakup 87,7% total impor rokok yang masuk Indonesia pada tahun 2010.

KESIMPULAN

Produksi rokok terus meningkat, pada 2011 diperkirakan produksi rokok sebanyak 300 milyar batang yang sudah melebihi batas produksi maksimal yang ditetapkan *roadmap* industri rokok sebanyak 260 milyar batang.

Sebagian besar penutupan perusahaan rokok disebabkan oleh pencabutan dan pembekuan dari Bea dan Cukai. Pada tahun 2008, 1.801 perusahaan dibekukan dan 443 perusahaan rokok dibekukan.

Kontribusi industri rokok pada perekonomian mengecil dan menurun dari 1995-2008. Di tahun 1995 kontribusi industri rokok, pertanian tembakau dan pertanian cengkeh pada perekonomian (Produk Domestik Bruto) sebesar 2,2%, sedangkan pada tahun 2008 turun menjadi 1,5%.

Jumlah pekerja langsung di industri rokok sebanyak 331.590 orang pada tahun 2009. Jumlah ini tidak sebanyak yang diklaim industri rokok yang memasukkan pekerja tidak langsung dalam penghitungannya seperti pedagang dan anggota rumah tangga yang ditanggung.

Rata-rata upah buruh industri rokok di bawah mandor lebih rendah dari rata-rata upah industri makanan dan industri lainnya. Hal ini terjadi secara konsisten untuk periode 2000-2011. Di tahun 2011, upah rata-rata bulanan industri rokok sebesar Rp. 962 ribu sedangkan rata-rata upah industri makanan Rp. 1,26 juta dan rata-rata upah keseluruhan industri sebesar Rp. 1,25 juta per bulan.

KEPUSTAKAAN

Bank Dunia. Tingkat Pertumbuhan PDB Indonesia 1985-2010

Badan Pusat Statistik. Indeks Harga Konsumen Dan Inflasi Indonesia, 1985-2010

Badan Pusat Statistik. Indikator Industri Besar Dan Sedang 2009

Badan Pusat Statistik. Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 2009

Badan Pusat Statistik. Statistik Industri Sedang Dan Besar 2009

Badan Pusat Statistik. Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor 2009

Badan Pusat Statistik. Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor 2009

Badan Pusat Statistik. Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor 2010

Badan Pusat Statistik. Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor 2010

Badan Pusat Statistik. Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor 2011

Badan Pusat Statistik. Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor 2011

Badan Pusat Statistik. Statistik Upah 2000-2011

Badan Pusat Statistik. Tabel Input-Output 1995

Badan Pusat Statistik. Tabel Input-Output 2000

Badan Pusat Statistik. Tabel Input-Output 2005

Badan Pusat Statistik. Tabel Input-Output 2008

Badan Pusat Statistik. Statistik Upah 2000-2011

Kementerian Keuangan. Kajian Ekonomi Dan Keuangan Badan Kebijakan Fiskal
Vol.7 No. 2, Juni 2003

Kementerian Keuangan. Nota Keuangan dan RAPBN 2011

USDA. *Global Agriculture Information Network Report, Indonesia Tobacco And
Products Annual 2002*

USDA. *Global Agriculture Information Network Report, Indonesia Tobacco And
Products Annual 2003*

USDA. *Global Agriculture Information Network Report, Indonesia Tobacco And
Products Annual 2004*

5

Kebijakan Cukai Rokok dan Manfaatnya

5.1 Dampak Peningkatan Rokok

5.1.1 Dampak Peningkatan Rokok terhadap Konsumsi Rokok dan Penerimaan Negara

- Dari tabel 5.1 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 10 persen cukai rokok akan menurunkan konsumsinya sebesar 1 sampai 3 persen dan meningkatkan penerimaan negara dari cukai rokok sebesar 7 sampai 9 persen.

Tabel 5.1

Dampak peningkatan 10% cukai tembakau terhadap konsumsi rokok dan penerimaan negara dari cukai tembakau

Studi	% penurunan konsumsi	% kenaikan penerimaan
De Beyer and Yurekli, 2000 ¹	2,0	8,0
Djutaharta <i>et al</i> , 2005 ²	0,9	9,0
Adioetomo <i>et al</i> , 2005 ³	3,0	6,7
Sunley, Yurekli, Chaloupka, 2000 ⁴	2,4	7,4

- Permintaan akan rokok bersifat inelastis, dimana besarnya penurunan konsumsi rokok lebih kecil daripada peningkatan harganya, sehingga penurunan konsumsi rokok akibat peningkatan cukai akan meningkatkan penerimaan negara. Hal ini juga memperlihatkan bahwa rokok adalah barang yang menimbulkan kecanduan bagi pemakainya.
- Peningkatan harga rokok melalui peningkatan cukai adalah *win win solution* karena akan menurunkan konsumsi rokok, walau bersifat inelastis dan pada saat yang sama akan berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari cukai rokok.

5.1.2 Dampak Peningkatan Cukai Tembakau terhadap Jumlah Perokok, Kematian yang Terkait dengan Konsumsi Rokok dan Penerimaan Cukai Tembakau

- Barber *et al* 2008⁵, melakukan penghitungan mengenai dampak peningkatan cukai rokok menjadi 57% (tingkat maksimal yang diperbolehkan Undang-Undang No. 39 tahun 2007).
- Dari tabel 5.2, dapat dilihat bahwa jika tingkat cukai rokok ditingkatkan menjadi 57% dari harga jual eceran maka diperkirakan jumlah perokok akan

berkurang sebanyak 6,9 juta orang, jumlah kematian yang berkaitan dengan konsumsi rokok akan berkurang sebanyak 2,4 juta kematian, dan penerimaan negara dari cukai tembakau akan bertambah sebanyak Rp. 50,1 triliun (penghitungan ini didasarkan pada asumsi elastisitas harga terhadap permintaan rokok sebesar -0,4).

- Peningkatan cukai tembakau memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan kesehatan masyarakat dan peningkatan penerimaan negara. Oleh karena itu, peningkatan cukai tembakau adalah *win-win solution*.

5.1.3 Dampak Peningkatan Harga Rokok pada Kelompok Termiskin

- Ahsan dan Tobing 2008⁶, dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004 dengan menggunakan model *two part* menyimpulkan bahwa peningkatan 10% harga rokok akan menurunkan konsumsi rokok perokok termiskin (kuintil 1) sebanyak 16%, sedangkan untuk perokok terkaya (kuintil 5) hanya akan turun 6% (tabel 5.3).
- Perokok termiskin lebih sensitif terhadap harga dibandingkan dengan perokok terkaya. Sehingga kebijakan peningkatan harga rokok melalui peningkatan cukai tembakau akan melindungi penduduk termiskin dari kecanduan dan perangkap akibat konsumsi rokok.

5.2 Kebijakan Cukai Rokok di Indonesia

5.2.1 Filosofi UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

- Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang cukai menyatakan bahwa cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat:

Tabel 5.3
Dampak peningkatan harga rokok terhadap konsumsi rokok menurut kelompok pendapatan

Keterangan	Kelompok pendapatan (kuintil)				
	I	II	III	IV	V
Elastisitas harga dari partisipasi merokok	-1,696*	-1,069*	-0,713*	-0,384*	-0,409*
Elastisitas harga terhadap permintaan rokok	-0,304*	-0,065***	0,058	-0,411*	-0,292*
Prevalensi perokok	0,237	0,294	0,287	0,297	0,251
Elastisitas harga total	-1,598	-0,821	-0,451	-0,681	-0,598

Sumber : Ahsan dan Tobing 2008

Catatan : * $p < 1\%$, ** $p < 5\%$ dan *** $p < 10\%$

Tabel 5.2
Dampak kenaikan tarif cukai tembakau terhadap
kematian akibat rokok dan penerimaan negara

No.	Keterangan	Kondisi sekarang	Skenario kenaikan tarif cukai		
			(1)	(2)	(3)
1.	% tarif cukai terhadap harga jual actual	37%	50%	64%	70%
2.	% tarif cukai terhadap HJE yang ditetapkan pemerintah ^a	31%	43%	57%	64%
3.	Jumlah perokok	56,9 juta orang			
		<i>Jumlah perokok yang berkurang (juta)</i>			
	-0,29		1,8	5	7,3
	-0,4		2,5	6,9	10
	-0,67		4,1	11,5	16,8
4.	Perkiraan kematian akibat merokok	28,45 juta orang			
		<i>Kematian yang terhindarkan (juta)</i>			
<i>Elastisitas harga^b</i>	-0,29		0,6	1,7	2,5
	-0,4		0,9	2,4	3,5
	-0,67		1,4	4	5,9
		<i>Kematian terhindarkan (%)</i>			
<i>Elastisitas harga^b</i>	-0,29		2%	6%	9%
	-0,4		3%	8%	12%
	-0,67		5%	14%	21%
		<i>Jumlah perokok yang tersisa (juta)</i>			
<i>Elastisitas harga^b</i>	-0,29		55,1	51,9	49,6
	-0,4		54,4	50,0	46,9
	-0,67		52,8	45,4	40,1
5.	Penerimaan cukai tembakau	Rp 41.8 triliun			
		<i>Tambahan penerimaan cukai (rupiah triliun)</i>			
<i>Elastisitas harga^b</i>	-0,29		25,1	59,3	75,8
	-0,4		23	50,1	59,3
	-0,67		18,1	29,1	23,8

Sumber : Barber et al 2008

Catatan:

^a HJE diestimasi sebagai proporsi dari harga jual

^b Elastisitas harga rendah, menengah, dan tinggi adalah -0,29, -0,4 dan -0,67 berdasarkan urutan estimasi hasil studi yang terbaik: Lihat Guindon et al., Djutaharta et al., dan Adioetomo et al.

^c Nilai penerimaan diestimasi menggunakan target penerimaan 2008, dengan asumsi bahwa 95 persen dari penerimaan cukai berasal dari produk tembakau.

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
 2. Peredarannya perlu diawasi
 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
 4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan
- Kebijakan cukai dibuat untuk mengendalikan konsumsi. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan cukai rokok ditentukan oleh kemampuannya mengendalikan konsumsi rokok, bukan peningkatan penerimaan negara. Sistem dan tingkat cukai rokok yang berlaku haruslah mampu untuk mengendalikan konsumsi rokok.

5.2.2 Sistem Cukai Hasil Tembakau di Indonesia

- Terdapat 2 sistem cukai hasil tembakau yaitu ad valorem dan spesifik. Sistem cukai ad valorem berupa persentase tertentu terhadap harga jual eceran (% dari HJE) sedangkan sistem cukai spesifik berupa sejumlah uang tertentu per satu batang rokok (Rp. / batang)
- Sebelum tahun 2005, Indonesia menggunakan sistem cukai ad valorem berupa % tertentu terhadap HJE. Pada saat itu terdapat 10 layer HJE (tabel 5.4).
- Pada periode 2006-2009, Indonesia menggunakan sistem cukai campuran dimana produk IHT terutama rokok dikenai 2 jenis cukai yaitu spesifik dan ad valorem.
- Setelah tahun 2009, Indonesia menggunakan sistem cukai spesifik, dimana cukai ditetapkan per batang rokok. Namun masih tetap ada layer yang didasarkan pada HJE. Di tahun 2012 masih terdapat 15 layer HJE (tabel 5.4).
- Penggunaan sistem cukai spesifik dilandasi pertimbangan kemudahan administrasi. Akan tetapi banyaknya layer HJE akan memperumit administrasi pemungutan cukai.

5.2.3 Perubahan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau

- Kebijakan cukai hasil tembakau periode 2007-2012 mengalami sejumlah perubahan. Perubahan - perubahan ini diharapkan akan mampu mengendalikan konsumsi hasil tembakau (rokok) dan meningkatkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.

Tabel 5.4
Perubahan sistem cukai hasil tembakau 2005-2012

Periode	Juli 2005 – Nov' 2006	Des'2006 – Okt' 2007	Nov' 2007 – Nov' 2009	Nov' 2009 – Des' 2011	Jan 2012
Sistem Cukai	Ad valorem	Mix Ad valorem & Spesifik	Mix Ad valorem & Spesifik	Spesifik	Spesifik
Layer HJE	10	10	9	19	15

Sumber : Kebijakan Cukai Hasil Tembakau, Badan Kebijakan Fiskal, Jakarta 13 Maret 2012

- Beberapa prinsip dari perubahan kebijakan cukai hasil tembakau antara lain
 - 1) Kebijakan tarif cukai tetap menggunakan sistem spesifik;
 - 2) Kenaikan tarif cukai secara moderat;
 - 3) Penyederhanaan golongan dengan memperhatikan skala keekonomian usaha dan aspek fiskal yang lebih proporsional;
 - 4) Eliminasi layer HJE secara bertahap;
 - 5) Pembedaan besaran tarif cukai antara HT buatan mesin dengan buatan tangan.

5.2.4 Peran DPR dalam Peningkatan Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT)

- Parlemen dapat berperan dalam peningkatan tarif cukai HT karena mereka memiliki hak budget untuk mengubah suatu anggaran.
- Pada saat pembahasan kebijakan tarif cukai HT 2012 yang dilakukan pada tahun 2011, pemerintah mengajukan peningkatan tarif cukai rata-rata sebesar 12,2% untuk mencapai target penerimaan cukai HT sebesar Rp. 69 triliun.
- Akan tetapi anggota DPR tidak sepakat dengan usul pemerintah dan menaikkan target penerimaan cukai HT sebesar Rp. 72 triliun. Guna mencapai target penerimaan cukai HT tersebut maka tarif cukai rata-rata dinaikkan menjadi 16,3%.

5.2.5 Peningkatan Tarif Cukai Hasil Tembakau 2011-2012

- Penentuan tarif cukai HT ditentukan oleh jenis HT, kelompok produksinya dan rentang HJEnya. Jenis hasil tembakau terdiri dari sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan filter (SKTF), cerutu (CRT), klobot (KLB), klembak menyan (KLM) dan tembakau iris (TIS) dimana 3 jenis yang paling mendominasi SKT, SKM dan SPM. Sementara kelompok produksi terdiri dari 3 golongan yaitu golongan 1 yang

Tabel 5.5
Perubahan kebijakan cukai hasil tembakau 2007-2012

Tahun	Kebijakan cukai IHT
2007	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif gabungan advalorum dan spesifik mempertimbangkan jenis, golongan dan HJE. • HJE semua jenis HT naik sebesar 7% per batang • Kenaikan beban cukai rata-rata 7% • Target batas produksi 231 miliar btg per tahun
2008	<ul style="list-style-type: none"> • Penggabungan Gol IIIa dan IIIb untuk SKT • Penetapan tarif cukai SKTF sama dengan SKM • Tarif gabungan advalorum dan meningkatkan tarif spesifik • Kenaikan beban cukai rata-rata 8% • Target batas produksi 240 miliar btg per tahun • Pemberlakuan DBH Cukai Hasil Tembakau 2%
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Penghilangan golongan III pada SKM dan SPM serta SKT dalam 3 golongan • Tarif cukai spesifik dengan mempertimbangkan jenis, golongan, dan batasan HJE • HTP dapat lebih tinggi dari HJE 5% • Pemerintah tidak menjadikan HJE sebagai instrumen pengendali harga • Kenaikan beban cukai rata-rata 7%, SKT golongan III dinaikkan 33% • Target batas produksi 242,4 miliar btg per tahun • UU PDRD mengatur pajak rokok daerah pada tahun 2014, 10% dari cukai HT • Insentif cukai HT untuk ekspor dihapus
2010	<ul style="list-style-type: none"> • Konversi SPM terhadap SKM didekatkan • <i>Gap</i> tarif cukai spesifik antar strata HJE dan golongan diturunkan secara gradual • Kenaikan beban cukai rata-rata 8,1%, Gol II SKM 5% - 15%, Gol II SPM 18% -31%, • Gol II SKT 17% - 20% dan Gol III SKT 63% • Target batas produksi 248,2 miliar btg per tahun
2011	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif cukai SPM didekatkan dengan SKM • Tarif cukai SKT didekatkan dengan SKM • Strata (batasan) HJE untuk penetapan tarif cukai tetap dalam 19 strata tarif • Sesuai arahan Menteri Keuangan, tarif cukai HT 2011 dinaikkan pada kisaran 5%. • Untuk SKT golongan III masih dipertahankan tarifnya yaitu Rp 65 per batang • SKM golongan II layer 3, kenaikan tarifnya relatif lebih tinggi untuk mencegah tumbuhnya merk baru dari pabrikan kecil yang terafiliasi dari pabrikan besar • Target batasan produksi 258,6 miliar batang per tahun
2012	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif cukai dinaikkan dengan kenaikan rata-rata 16,3%; • Batasan jumlah produksi SKT gol. III diturunkan menjadi <300 juta batang per tahun; • Mempertimbangkan <i>roadmap</i> kebijakan cukai HT yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyederhanaan struktur tarif menjadi 15 strata tarif, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ SKM golongan II layer 3 digabung/dinaikkan menjadi layer 2; ✓ SPM golongan I dari 3 layer digabung menjadi 1 layer pada layer 1; ✓ SKT golongan I layer 3 digabung/dinaikkan menjadi layer 2. 2. Jenis HT SKT golongan III masih dipertahankan seperti sebelumnya

Sumber : Kebijakan Cukai Hasil Tembakau, Badan Kebijakan Fiskal, Jakarta 13 Maret 2012

Tabel 5.6

Persentase peningkatan tarif dan target penerimaan cukai hasil tembakau, 2012

No.	Uraian	Usulan pemerintah	Tanggapan DPR RI (optimalisasi)
1	Kenaikan tarif cukai HT rata-rata	12,2 %	16,3 %
2	Target penerimaan cukai HT	Rp 69,041 triliun	Rp 72,041 triliun

Sumber : Kebijakan Cukai Hasil Tembakau, Badan Kebijakan Fiskal, Jakarta 13 Maret 2012

memproduksi lebih dari 2 milyar batang per tahun, golongan 2 yang memproduksi antara 300 juta – 2 milyar batang per tahun dan golongan 3 yang memproduksi di bawah 300 juta batang per tahun (hanya berlaku untuk SKT).

- Pada tahun 2012 terjadi peningkatan tarif cukai HT rata-rata sebesar 16%, dari 42% menjadi 51%.
- Namun tarif cukai sangat bervariasi dari yang terendah sebesar Rp. 75 per batang untuk SKT golongan 3 dan yang tertinggi sebesar Rp. 365 untuk SPM golongan 1.
- Besarnya peningkatan tarif cukai HT bervariasi antara 9-49%. Namun sayangnya peningkatan tarif cukai terendah justru bagi pengusaha rokok kretek mesin 1 sebesar 9-10%. Pemerintah seolah-olah melindungi pengusaha rokok *mesin yang berskala besar* dan menguasai 44% pangsa pasar rokok.

5.2.6 Implikasi dari Sistem Cukai Hasil Tembakau

- Sistem cukai tembakau yang rumit diperkirakan akan menimbulkan beberapa implikasi seperti:
 1. Timbulnya pabrik rokok skala kecil yang dikenai cukai paling rendah
 2. Praktek subkontrak dari perusahaan rokok besar ke perusahaan kecil
 3. Tertahannya tingkat produksi rokok di skala yang lebih kecil yang dikenai cukai lebih rendah
 4. Lebarnya rentang harga jual eceran di tingkat konsumen.
- Keempat implikasi ini akan mengurangi efektifitas kebijakan cukai tembakau dalam mengendalikan konsumsi rokok.

5.3 Perbandingan Tingkat Cukai dan Harga Rokok di ASEAN

5.3.1 Perbandingan Tingkat Cukai Rokok di ASEAN⁷

- Tarif cukai rokok rata-rata di Indonesia pada tahun 2012 diperkirakan

Tabel 5.7
Sistem dan tingkat cukai industri hasil tembakau, 2011-2012

No.	Jenis HT	Kelompok produksi	2011		2012		% Peningkatan
			Rentang HJE	Tarif cukai (Rp)	Rentang HJE	Tarif cukai (Rp)	
1	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	I > 2 Milyar	> 660	325	> 660	355	9
2			630 - 660	315	630 - 660	345	10
3			600 - 630	295	600 - 630	325	10
4		II 2 Milyar	> 430	245	>430	270	10
5			380 - 430	210	374 - 430	235	12
6			374 - 380	170			38
7	Sigaret Putih Mesin (SPM)	I > 2 Milyar	>600	325	=>375	365	12
8			450 - 600	295			24
9			375 - 450	245			49
10		II 2 Milyar	>300	215	>300	235	9
11			254 - 300	175	254 - 300	190	9
12			217 - 254	110	217 - 254	125	14
13	Sigaret Kretek Tangan (SKT) / Sigaret Putih Tangan (SPT)	I > 2 Milyar	>590	235	>590	255	9
14			550 - 590	180	520 - 590	195	8
15			520 - 550	155			26
16		II >300 Juta - 2 Milyar	>379	110	>379	125	14
17			349 - 379	100	349 - 379	115	15
18			336 - 349	90	336 - 349	105	17
19	III 300 Juta	=>234	65	=>234	75	15	

Sumber : PMK 167/PMK.011/2011 dan PMK 190/PMK.011/2010

Tabel 5.8
Pangsa pasar IHT menurut jenis dan golongan produksi

Jenis IHT	Golongan produksi	Pangsa pasar (%)
SKM	Golongan 1 (> 2 M batang per tahun)	44
	Golongan 2 (< 2 M batang per tahun)	11
SKT	Golongan 1 (> 2 M batang per tahun)	23
	Golongan 2 (300juta - 2 M batang per tahun)	10
	Golongan 3 (< 300 juta batang per tahun)	5
SPM		7
	TOTAL	100

Sumber: Diolah dari Roadmap Industri Rokok dan NK dan APBN 2009

sebesar 52% dari harga jual eceran.

- Tarif cukai rokok ini termasuk tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia berada di urutan keempat setelah Brunei (72%), Thailand (70%) dan Singapura (69%) (tabel 5.9).
- Tarif cukai rokok di Indonesia masih di bawah tarif maksimal yang diijinkan UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai sebesar 57%. Tarif ini juga masih jauh dari rekomendasi WHO tentang tarif cukai yaitu 2/3 dari harga jual eceran atau sekitar 70%.

5.3.2 Perbandingan Harga Rokok di ASEAN

- Harga rokok merek internasional di ASEAN berkisar antara USD 0,63 – USD 8,3 per bungkus. Harga rokok yang termahal ada di Singapura (USD 8,3 per bungkus) sementara yang termurah di Filipina (USD 0,63 per bungkus)
- Harga rokok di Indonesia menempati urutan ke 6 dari 9 negara di ASEAN sebesar USD 1,24 per bungkus.

5.4 Penerimaan Pemerintah dari Cukai Hasil Tembakau

5.4.1 Penerimaan Cukai Hasil Tembakau 2006-2012

- Realisasi penerimaan cukai hasil tembakau dari 2006-2011 selalu melebihi target yang dibebankan. Penerimaan cukai HT 2011 sebesar Rp. 73,25 trilliun lebih besar dari target yang dibebankan sebesar Rp.65,38 trilliun.

Tabel 5.9
Beban tarif cukai rokok di negara ASEAN, 2012

Negara	Beban cukai rokok	Jenis cukai
Brunei	72%	BND 0.25/ batang cukai spesifik
Kamboja	20% domestik & 25% impor	10% cukai ad valorem
Indonesia	52.4%	IDR 65-310/ batang cukai spesifik
Laos	19.7% domestik & 16% impor	15%-30% cukai ad valorem
Malaysia	45%	MYR 0.19/ batang cukai spesifik 20% cukai ad valorem
Myanmar	50%	63% cukai ad valorem
Filipina	30%	PHP 2.47 – PHP 28.30 / bungkus cukai spesifik
Singapura	69%	SGD 0.32/ batang cukai spesifik
Thailand	70%	85% ad valorem tax on cigarettes
Vietnam	45%	65% ad valorem tax

Sumber : ASEAN Tobacco Tax Report Card, Regional Comparison and Trends, February 2012, SITT - SEATCA

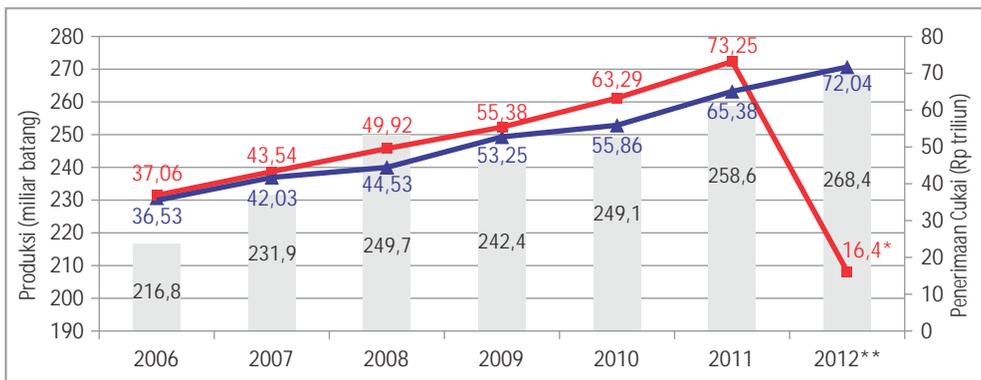
Tabel 5.10
 Harga rokok merek internasional di ASEAN

No	Negara	Harga rokok (USD per bungkus)
1.	Singapura	USD 8,3
2.	Brunei Darussalam	USD 5,9
3.	Malaysia	USD 3,32
4.	Thailand	USD 2,36
5.	Laos	USD 1,46
6.	Indonesia	USD 1,24
7.	Kamboja	USD 1,19
8.	Vietnam	USD 0,74
9.	Filipina	USD 0,63

Sumber : ASEAN Tobacco Tax Report Card, Regional Comparison and Trends, February 2012, SITT-SEATCA

- Namun yang harus diingat, cukai merupakan instrumen untuk mengendalikan konsumsi rokok, sehingga keberhasilannya ditentukan oleh berkurangnya konsumsi rokok bukan dari sisi penerimaan negara. Pembayar cukai adalah konsumen barang kena cukai yaitu minuman beralkohol dan hasil tembakau (rokok). Sehingga tidak tepat jika dikatakan bahwa industri rokoklah yang berkontribusi pada penerimaan negara. Perokoklah yang membayar cukai bukan industri rokok.
- Produksi rokok untuk tahun 2011 diperkirakan sebanyak 258,6 miliar batang meningkat dari 249,1 miliar batang pada 2010.

Gambar 5.1
 Produksi dan penerimaan cukai hasil tembakau, Indonesia 2006-2012



Sumber : Kebijakan Cukai Hasil Tembakau, Badan Kebijakan Fiskal, Jakarta 13 Maret 2012

- Untuk tahun 2012, penerimaan cukai hasil tembakau ditargetkan sebesar Rp. 72 triliun dengan estimasi produksi sebanyak 268 miliar batang. Estimasi produksi ini sudah melebihi batasan *roadmap* industri rokok sebesar 260 miliar batang. Sehingga diharapkan ke depan tarif cukai dan harga rokok dinaikkan dengan signifikan untuk menekan laju peningkatan produksi rokok.

5.4.2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah dari Cukai HT dan Penerimaan Lainnya

- Penerimaan pemerintah dari cukai HT bukanlah yang terbesar dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya.
- Untuk periode 1998-2010 penerimaan pemerintah dari cukai HT hanya berkisar 4,8% - 7,7% dibandingkan dengan total penerimaan pemerintah (tabel 5.11).
- Untuk tahun 2010, penerimaan negara PPH sebesar Rp. 362 triliun dan PPN sebesar 263 triliun, sedangkan penerimaan cukai HT sebesar Rp. 63,3 triliun atau hanya 17% dari PPH dan 24% dari PPN.

5.5 Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga untuk Tembakau

5.5.1 Pengeluaran Rumah Tangga untuk Rokok

- Sebesar 63% rumah tangga di Indonesia memiliki pengeluaran untuk membeli rokok.
- Hal ini sangat disayangkan karena rokok merupakan pengeluaran yang tidak memberikan manfaat bagi rumah tangga tersebut. Bahkan pengeluaran untuk rokok akan meningkatkan risiko terkena penyakit berbahaya seperti serangan jantung, kanker paru-paru dan stroke. Sehingga mengkonsumsi rokok seolah-olah seperti membeli penyakit di masa depan.

5.5.2 Tren Pengeluaran Rumah Tangga Termiskin untuk Rokok

- Sebanyak 12% dari pendapatan rumah tangga termiskin yang ada perokoknya (RT termiskin merokok) dihabiskan untuk membeli rokok. Dari tahun 2003 – 2010 persentase ini stabil. Hal ini menunjukkan bahwa di RT termiskin merokok sangat dibebani oleh pengeluaran untuk membeli rokok.
- Di tahun 2010, pengeluaran total RT termiskin merokok sebesar Rp. 864 ribu, sementara untuk membeli rokok sebesar Rp. 102 ribu (12%).
- Pengeluaran untuk membeli rokok berada di urutan kedua dibandingkan

Tabel 5.11

Perbandingan penerimaan pemerintah dari cukai tembakau dan penerimaan lainnya

No	Keterangan	1998/ 1999	1999/ 2000	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Total penerimaan pemerintah (Rp. Triliun)	152,87	142,20	205,34	301,08	298,6	341,4	407,9	493,9	636,2	706,1	979,3	847,1	990,5
	% cukai tembakau	4,87	7,11	6,72	6,08	7,73	7,73	7,02	6,61	5,81	6,16	5,1	6,5	6,4
2	Penerimaan pajak (Rp. Triliun)	102,39	125,95	115,91	185,57	210,09	242,05	280,56	347,03	409,20	491,00	658,7	619,9	743,3
	% cukai tembakau	7,28	8,03	11,91	9,86	10,99	10,91	10,21	9,41	9,03	8,86	7,6	8,9	8,5
3	Penerimaan pajak dalam negeri (Rp. Triliun)	95,46	120,92	108,88	176,00	199,51	230,93	267,82	331,79	395,97	470,10	622,4	601,3	720,8
	% cukai tembakau	7,80	8,36	12,67	10,40	11,57	11,43	10,69	9,84	9,33	9,25	8,0	9,2	8,8
4	Pajak penghasilan (Rp. Triliun)	55,94	72,73	57,07	94,58	101,87	115,02	119,51	175,54	208,83	238,40	327,5	317,6	362,2
	% cukai tembakau	13,32	13,90	24,18	19,35	22,66	22,95	23,96	18,60	17,70	18,24	15,2	17,4	17,5
5	Pajak pertambahan nilai (Rp. Triliun)	27,80	33,09	35,23	56,00	65,20	77,10	87,60	101,30	123,00	154,50	209,6	193,1	263
	% cukai tembakau	26,80	30,56	39,17	32,68	35,40	34,24	32,69	32,23	30,05	28,14	23,8	28,7	24,1
6	Pajak bumi dan bangunan (Rp. Triliun)	35,65	41,07	44,56	5,20	6,20	8,80	11,80	16,20	20,90	23,70	25,4	24,3	25,3
	% cukai tembakau	20,90	24,61	30,97	351,92	372,32	300,00	242,71	201,54	176,84	183,46	196,5	228,0	250,2
7	Penerimaan cukai Tembakau (Rp. Triliun)	7,45	10,11	13,80	18,30	23,08	26,40	28,64	32,6	37,1	43,5	49,9	55,4	63,3

Tabel 5.12

Distribusi persentase rumah tangga perokok dan non-perokok, Indonesia, 2003-2010

Tahun	RT perokok	RT non-perokok
2003	70,5	29,5
2004	71,25	28,75
2005	64,28	35,72
2006	63,68	36,32
2007	62,61	37,39
2008	59,28	40,72
2009	64,56	35,44
2010	63,65	36,65

Sumber: Susenas 2003-2010, diolah

dengan pengeluaran lainnya di RT termiskin merokok. Dia mengalahkan 23 jenis pengeluaran lainnya seperti pendidikan, pemenuhan gizi, dan kesehatan. Hal ini konsisten terjadi untuk periode 2003-2010 (tabel 5.13).

5.5.3 Perbandingan Pengeluaran Rumah Tangga untuk Rokok antara yang Termiskin dan Terkaya

- Jika dibandingkan dengan rumah tangga terkaya, persentase pengeluaran RT termiskin untuk membeli rokok jauh lebih besar yaitu 12%, sementara di RT terkaya hanyalah 7%. Hal ini mengindikasikan bahwa RT termiskin lebih terjerat konsumsi rokok dari pada RT terkaya (tabel 5.14).

5.5.4 Kesempatan yang Hilang Akibat Kebiasaan Merokok RT Termiskin

- Dibandingkan dengan pengeluaran lainnya yang lebih penting, pengeluaran untuk rokok jauh lebih besar di RT termiskin. Persentase pengeluaran untuk rokok sebesar 12%, sementara pengeluaran untuk daging hanya 1%; pengeluaran untuk susu dan telur hanya 2%; pengeluaran untuk pendidikan hanya 2%; dan pengeluaran untuk kesehatan hanya 2% (tabel 5.15).
- Pengeluaran untuk rokok bagi RT termiskin setara 13x pengeluaran untuk daging; 5x pengeluaran untuk susu dan telur; 6x pengeluaran untuk pendidikan dan 6x pengeluaran untuk kesehatan.
- Jika para perokok miskin menghentikan kebiasaannya dan uangnya dialokasikan untuk membeli daging maka konsumsi daging di RT-nya akan meningkat 13x lipat. Jika dibelikan susu dan telur maka konsumsi susu dan telur akan meningkat 5x lipat. Jika hal ini dilakukan maka kualitas gizi dan

Tabel 5.13

Pengeluaran rumah tangga perokok termiskin (q1), Indonesia 2003-2010

No	Jenis Pengeluaran	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010	
		Rp	%														
1	Minuman alkohol	487	0,13	510	0,14	710	0,16	658	0,12	732	0,12	945	0,13	1.155	0,15	1.302	0,15
2	Pajak dan asuransi	1.108	0,29	1.099	0,31	1.965	0,45	2.097	0,39	2.567	0,43	3.001	0,41	4.729	0,55	6.260	0,72
3	Pemeliharaan rumah	1.991	0,53	1.599	0,43	557	0,13	2.990	0,55	2.709	0,46	2.319	0,82	4.379	0,56	4.613	0,53
4	Daging	5.568	1,48	4.955	1,39	4.456	1,02	4.085	0,76	4.301	0,73	6.995	0,96	7.901	1,02	7.759	0,90
5	Barang tahan lama	4.904	1,30	4.878	1,36	6.250	1,43	25.775	4,77	7.076	1,20	12.507	1,72	10.538	1,35	9.809	1,13
6	Pesta dan upacara	6.426	1,71	5.163	1,44	5.792	1,33	5.291	0,98	5.240	0,89	4.257	0,59	7.102	0,91	6.058	0,70
7	Pendidikan	3.358	0,89	3.380	0,94	8.369	1,92	5.940	1,10	7.852	1,33	11.578	1,59	15.438	1,98	16.257	1,88
8	Buah-buahan	8.636	2,30	6.495	1,81	7.044	1,62	7.037	1,30	8.250	1,39	13.728	1,89	12.119	1,56	10.294	1,26
9	Umbi-umbian	6.186	1,64	5.691	1,58	6.526	1,50	8.485	1,57	9.303	1,57	10.501	1,44	13.292	1,71	11.211	1,30
10	Bahan makanan lainnya	4.773	1,27	4.872	1,35	7.947	1,82	8.797	1,63	11.293	1,91	11.234	1,54	14.467	1,86	16.233	1,88
11	Kesehatan	7.355	1,96	7.344	2,04	4.953	1,14	9.055	1,67	13.290	2,24	15.928	2,19	16.647	2,14	17.470	2,02
12	Pakaian dan alas kaki	13.135	3,49	10.323	2,87	15.690	3,60	17.962	3,32	22.018	3,72	27.678	3,81	27.858	3,58	31.354	3,63
13	Bumbu	9.220	2,45	8.491	2,36	9.583	2,20	11.708	2,17	11.719	1,98	12.605	1,73	13.997	1,80	15.305	1,77
14	Telur dan susu	8.119	2,16	8.769	2,44	10.866	2,49	11.219	2,08	12.081	2,04	14.405	1,98	17.355	2,23	19.437	2,25
15	Kacang	12.424	3,30	10.152	2,82	10.603	2,43	12.087	2,24	13.212	2,2	13.594	1,87	18.914	2,43	19.700	2,28
16	Minyak dan lemak	14.146	3,76	14.437	3,99	15.939	3,66	17.874	3,31	22.178	3,75	28.694	3,94	25.978	3,34	27.655	3,30
17	Barang dan jasa	9.579	2,55	16.927	4,71	20.738	4,76	25.775	4,77	33.905	5,73	50.598	6,96	45.243	5,82	56.410	6,52
18	Bahan minuman	16.711	4,44	16.927	4,71	20.455	4,69	22.642	4,19	25.669	4,34	25.838	3,55	30.437	3,91	34.151	3,95
19	Sayur-sayuran	23.209	6,17	19.984	5,56	23.267	5,34	26.087	4,82	32.145	5,43	47.497	6,53	41.774	5,37	49.127	5,68
20	Listrik, telepon dan gas	31.178	8,29	31.748	8,83	30.860	7,08	48.639	9,00	45.015	7,60	64.656	8,89	58.717	7,55	66.537	7,70
21	Ikan	24.687	6,56	22.888	6,36	31.281	7,18	35.783	6,62	38.225	6,46	43.177	5,94	51.504	6,62	52.368	6,06
22	Sewa	27.269	7,38	30.519	8,49	34.905	8,01	41.957	7,76	45.929	7,76	50.846	6,99	62.794	8,07	72.589	8,40
23	Rokok dan sirih	47.295	12,58	41.777	11,62	54.752	12,56	60.670	11,22	68.123	11,51	68.850	9,47	91.931	11,82	102.956	11,91
24	Padi-padian	72.812	19,36	66.816	18,58	83.140	19,08	109.967	20,34	121.084	20,45	117.090	16,10	140.185	18,02	155.896	18,03
	Total pengeluaran	376.100	100	359.620	100	435.827	100	540.673	100	592.078	100	727.372	100	777.784	100	864.604	100

Sumber: Susenas 2003-2010, diolah

Tabel 5.14
Pengeluaran rumah tangga perokok menurut kuintil, Indonesia, 2010

No	Jenis Pengeluaran	Q1		Q2		Q3		Q4		Q5	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Minuman Alkohol	1.302	0,15	2.137	0,16	2.684	0,15	3.692	0,15	7.971	0,15
2	Pajak dan Asuransi	6.260	0,72	10.287	0,81	15.762	0,89	25.379	1,04	90.075	1,73
3	Pemeliharaan Rumah	4.613	0,53	8.819	0,66	15.292	0,86	29.628	1,22	242.990	4,68
4	Daging	7.759	0,90	16.529	1,24	27.023	1,52	44.653	1,83	97.893	1,89
5	Barang Tahun Lama	9.809	1,13	20.340	1,53	34.433	1,94	69.446	2,85	451.025	8,69
6	Pesta dan Upacara	6.085	0,70	10.160	0,76	15.342	0,86	25.657	1,05	144.068	2,77
7	Pendidikan	16.257	1,88	37.854	2,85	64.819	3,65	117.707	4,67	440.408	8,48
8	Buah-buahan	10.924	1,26	18.147	1,36	26.484	1,49	38.667	1,59	77.312	1,49
9	Umbi-umbian	11.211	1,30	14.197	1,07	15.752	0,89	17.327	0,71	20.304	0,39
10	Bahan Makanan Lainnya	16.233	1,88	25.733	1,94	33.656	1,90	43.878	1,80	63.285	1,22
11	Kesehatan	17.470	2,02	27.884	2,10	40.117	2,26	61.500	2,53	218.882	4,22
12	Pakaian dan Alas Kaki	31.354	3,63	57.047	4,29	86.326	4,86	128.703	5,29	255.396	4,92
13	Bumbu	15.305	1,77	20.085	1,51	23.548	1,33	27.474	1,13	34.227	0,66
14	Telur dan Susu	19.437	2,25	36.312	2,73	54.273	3,06	83.023	3,41	167.620	3,23
15	Kacang	19.700	2,28	24.723	1,86	28.434	1,60	33.854	1,39	44.958	0,87
16	Minyak dan Lemak	27.665	3,20	37.215	2,80	43.452	2,45	50.919	2,09	62.365	1,20
17	Barang dan Jasa	56.410	6,52	97.510	7,33	138.776	7,82	202.485	8,32	468.010	9,01
18	Bahan Minuman	34.151	3,95	45.799	3,44	54.094	3,05	63.215	2,60	78.557	1,51
19	Sayur-sayuran	49.127	5,68	70.848	5,33	87.636	4,94	107.980	4,44	142.197	2,74
20	Listrik, Telepon, dan gas	66.537	7,70	97.849	7,36	131.523	7,41	184.776	7,59	361.275	6,96
21	Ikan	52.368	6,06	88.410	6,65	120.262	6,78	159.396	6,55	235.809	4,54
22	Sewa	72.589	8,40	110.247	8,29	150.648	8,49	214.638	8,82	453.747	8,74
23	Rokok dan Sirih	102.956	11,91	153.722	11,56	196.276	11,06	250.358	10,29	349.572	6,73
24	Padi-padian	155.896	18,03	205.918	15,49	235.819	13,29	262.913	10,80	293.345	5,65
	Total Pengeluaran	864.604	100	1.329.731	100	1.774.488	100	2.434.638	100	5.192.784	100

Sumber: Susenas 2010, diolah

Tabel 5.15
Pengeluaran bulanan rumah tangga perokok termiskin, 2010

Jenis pengeluaran	Pengeluaran (Rp)	%
Rokok & Sirih	102.956	11,91
Daging	7.759	0,90
Susu & Telur	19.437	2,25
Ikan	52.368	6,06
Sayur-sayuran	49.127	5,68
Pendidikan	16.257	1,88
Kesehatan	17.470	2,02

Sumber: Susenas 2010, diolah

Tabel 5.16
Perbandingan pengeluaran bulanan rumah tangga perokok termiskin, 2010

Rokok dan sirih	=	13	x	Daging
		5	x	Susu & telur
		2	x	Ikan
		2	x	Sayur-sayuran
		6	x	Pendidikan
		6	x	Kesehatan

Sumber: Susenas 2010, diolah

SDM keluarga miskin akan meningkat dan akhirnya akan berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

5.6 Isu-isu yang Terkait dengan Cukai Tembakau

5.6.1 Usaha Kecil dan Menengah Rokok

- UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Bab IV pasal 6 : *usaha mikro* adalah yang memiliki omset kurang dari Rp. 50.000.000 per tahun, *usaha kecil* adalah yang memiliki omset antara Rp. 50.000.000 sampai Rp. 500.000.000 per tahun, *usaha menengah* adalah yang beromset Rp. 500.000.000 sampai Rp. 10.000.000.000 (Rp. 10 milyar) per tahun.
- Peraturan cukai terbaru (No 167/PMK.011/2011) yang menetapkan tarif cukai terendah bagi pengusaha SKT Gol 3 yang memproduksi maksimal 300 juta batang per tahun tidak sesuai dengan UU UMKM (UU No. 20/2008).
- Asumsi harga rokok SKT Gol 3 = Rp. 234,- per batang nilai penjualannya (omset) per tahun mencapai (dikalikan 300 juta) Rp. 70,2 milyar > Rp. 10

milyar (batasan usaha menengah).

- Perlu dilakukan harmonisasi antara Peraturan Cukai dengan UU UMKM.
- Jika yang ingin dilindungi adalah pengusaha kecil maka nilai penjualan rokoknya dalam setahun tidak boleh melebihi Rp. 10.000.000.000. Dengan asumsi harga rokok per batang Rp. 234,- maka definisi SKT Golongan 3 seharusnya berubah maksimum produksinya menjadi 43 juta batang per tahun (bukan 300 juta batang per tahun).

5.6.2 Pajak Pertambahan Nilai

- UU No. 42 tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah Pasal 7 mengamanatkan bahwa PPN bagi semua barang adalah 10% dari harga barang.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak, nomor KEP-103/PJ./2002, tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai bagi hasil tembakau (rokok) hanya 8,4%.
- Untuk menaikkan PPN rokok menjadi 10% sama dengan barang-barang lain.

5.6.3 Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

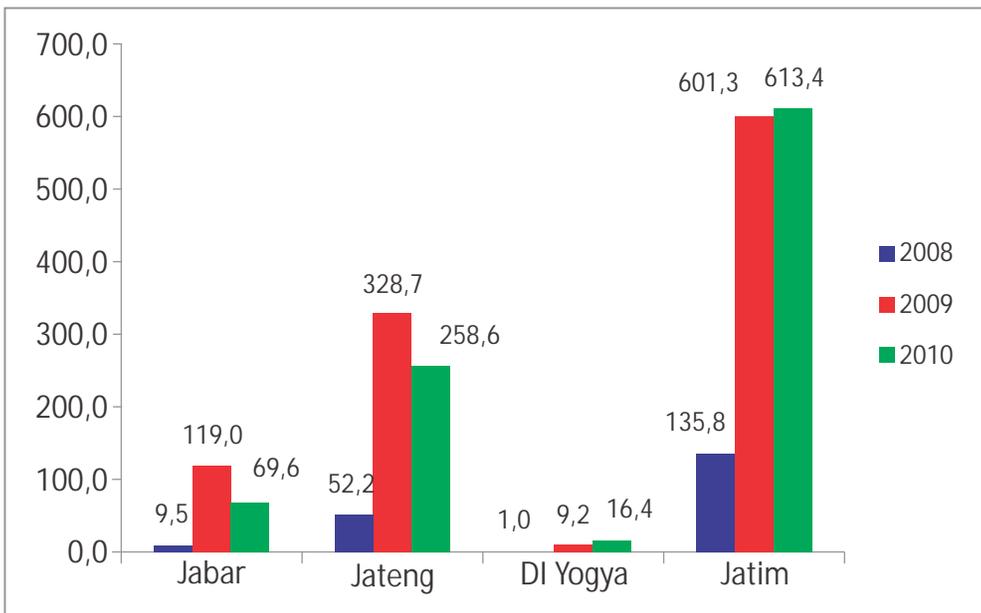
- Pasal 66A UU No. 39 tahun 2007 ayat 1 menyebutkan bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk:
 1. mendanai peningkatan kualitas bahan baku,
 2. pembinaan industri,
 3. pembinaan lingkungan sosial,
 4. sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau
 5. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- Dari lima alokasi penggunaan cukai di atas, hanya alokasi no. 3 yang dapat digunakan untuk promosi kesehatan (*pro health*) untuk mengatasi dampak buruk dari rokok dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja (*pro job*) dan pengentasan kemiskinan (*pro poor*).
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang ditransfer ke daerah penghasil cukai dan daerah tembakau meningkat dari Rp 200 milyar tahun 2008 menjadi Rp 1,1 triliun pada tahun 2010.

- Sebagian besar DBH-CHT mengalir ke Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur (Gambar 5.2)
- Temuan penelitian penggunaan DBH Cukai Tembakau di 3 wilayah (Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur). Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dikelola oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan berbagai macam kegiatan. Contoh kegiatannya antara lain:

Dinas Kesehatan Kediri (Jawa Timur):

1. Pengadaan Obat Untuk Penyakit Akibat Kerja Dan Penyakit Dampak Asap Rokok
2. Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Kesehatan Akibat Asap Rokok (ISPA)
3. Monitoring Evaluasi Pelaporan Kegiatan Kesehatan Masyarakat Akibat Asap Rokok
4. Penanggulangan Anemia Gizi Dampak Polusi Pabrik & Asap Rokok
5. Pelayanan Pencegahan 7 Penanggulangan Penyakit Menular akibat Asap Rokok

Gambar 5.2
Alokasi DBH-CHT di empat provinsi, 2008-2010 (dlm milyar rupiah)



Sumber: Paparan Direktur Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kebijakan DBH CHT 2010, dalam Seminar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi Pembangunan Daerah, di Jakarta, tanggal 25 Mei 2010

Di Yogyakarta, DBH Cukai Tembakau dipergunakan untuk:

1. Promosi kesehatan
2. Dana sehat
3. Pemberantasan penyakit tidak menular Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
4. Obat-obatan untuk Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4)
5. Peralatan dan logistik BP4.

Di Jawa Tengah, DBH Cukai Tembakau untuk pembinaan lingkungan sosial:

1. Peningkatan kesehatan masyarakat
 2. Pemeliharaan ruang terbuka hijau
 3. Peningkatan kemampuan koperasi karyawan IHT
 4. Penyiapan tenaga kerja siap pakai
 5. Rehabilitasi sarana dan prasarana BLK.
- Hasil temuan lapangan menemukan bahwa banyak tokoh masyarakat/agama/politik yang belum mengetahui adanya DBH Cukai tembakau di wilayah masing-masing.
 - Penyusunan DBH Cukai Tembakau belum melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal.
 - Hasil studi menyarankan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyusunan perencanaan penggunaan DBH Cukai Tembakau dan mengawasi pelaksanaannya.

5.6.4 Pajak Rokok Daerah

Di dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tercantum mengenai adanya pajak rokok daerah di bagian enam (pasal 26-31).

- Pasal 26 menyebutkan bahwa objek pajak rokok adalah konsumsi rokok yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun. Sementara yang dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan UU Cukai.
- Pasal 27, menyatakan bahwa subjek pajak rokok adalah konsumen rokok dan wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Pajak rokok ini akan dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Kemudian, pajak rokok akan di setor ke rekening kas umum daerah provinsi

secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

- Pasal 28, dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok.
- Pasal 29, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- Pasal 31, penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- Pasal 94, ayat 1c, hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen)
- Pasal 181, ketentuan pajak rokok akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Sebagai estimasi, jika pajak rokok ini diberlakukan pada tahun 2009 dengan asumsi penerimaan negara dari cukai rokok sebesar Rp. 50 triliun maka besarnya pajak rokok adalah Rp. 5 triliun dimana Rp. 2,5 triliun (50%) akan didedikasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di seluruh kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia. Diprediksi besaran akan meningkat pada tahun 2014. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia.

KESIMPULAN

Permintaan akan rokok bersifat inelastis dimana besarnya penurunan permintaan rokok akan lebih kecil dari peningkatan harganya. Hal ini dikarenakan oleh sifat adiktif (kecanduan) yang ada di komoditas rokok.

Peningkatan harga rokok melalui peningkatan cukai adalah *win-win solution* karena penerimaan negara akan meningkat dan konsumsi rokok akan turun yang baik bagi kesehatan.

Tujuan dari kebijakan cukai rokok adalah untuk mengurangi konsumsi rokok. Sehingga keberhasilan kebijakan cukai adalah pada saat konsumsi rokok turun. Peningkatan penerimaan negara hanyalah dampak sampingan dari kebijakan cukai, dia bukanlah tujuan utama.

Pembayar cukai rokok adalah perokok sehingga industri rokok tidak bisa mengklaim

bahwa mereka menyumbang pada penerimaan negara.

Penerimaan cukai rokok bukanlah penerimaan terbesar dibandingkan dengan penerimaan pemerintah lainnya.

KEPUSTAKAN

1. Curbing the Tobacco Epidemic in Indonesia, 2000. World Bank, Watching Brief
2. T. Djutaharta, HV Surya, NHA. Pasay, Hendratno dan SM. Adioetomo, 2005. *"Aggregate Analysis of the Impact of Cigarette Tax Rate Increase on Tobacco Consumption and Government Revenue: The Case of Indonesia"*. World Bank HNP Discussion Paper, Economic of Tobacco Control No. 25
3. SM Adioetomo, T. Djutaharta, dan Hendratno, 2005. *"Cigarette Consumption, Taxation, and Household Income: Indonesia Case Study"*. World Bank HNP Discussion Paper, Economic of Tobacco Control No. 26
4. EM. Sunley, A. Yurekli dan FJ. Chaloupka, 2000. *"The Design, Administration, and Potential Revenue of Tobacco Excise"*. Dalam P. Jha dan FJ. Chaloupka (eds.) *Tobacco Control in Developing Countries*. New York: Oxford University Press
5. Barber, Adioetomo, Ahsan and Setyonaluri; Sarah, Sri Moertiningsih, Abdillah and Diahadi, *"Ekonomi Tembakau di Indonesia "*. Lembaga Demografi – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Depok, 2008
6. A. Ahsan dan MH. Tobing, 2008. *"Study of the Impact of Tobacco Consumption among the Poor in Indonesia"*. Lembaga Demografi – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan RITC-IDRC : Depok, 2008
7. ASEAN Tobacco Tax Report Card, Regional Comparison and Trends, February 2012, Southeast Asia Initiative on Tobacco Tax (SITT) – Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)

6

Kebijakan Pengendalian Tembakau

6.1 Peraturan-peraturan yang ada di Indonesia¹

Pemerintah telah menyusun berbagai peraturan yang mengatur perlindungan terhadap masyarakat akibat bahaya merokok.

UU Kesehatan No. 36/ 2009 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan

Undang-Undang Kesehatan ini disahkan dalam rapat paripurna DPR, Senin, 14 September 2009, yang menyatakan bahwa tembakau adalah zat adiktif.

Pasal 113

- (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan.
- (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/ atau masyarakat sekelilingnya.
- (3) Produksi, peredaran dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 114

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.

Pasal 115

- (1) Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 199

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

6.2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Beberapa Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia Tahun 2012

Peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok bervariasi di setiap kabupaten/ kota di Indonesia dan belum semua kabupaten/ kota mempunyai peraturan daerah untuk kawasan tanpa rokok. Tingkatan peraturan berbeda untuk Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota. Pada umumnya pembuatan peraturan adalah atas dasar peraturan di tingkat yang lebih tinggi.

Tabel 6.1
Peraturan Gubernur

No	Provinsi	Keterangan
1	Yogyakarta	Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2007 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Tabel 6.2
Peraturan Daerah Provinsi

No	Provinsi	Keterangan
1	Bali	Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok
2	DKI Jakarta	Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Kawasan Tanpa Rokok Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok
3	Sumatera Barat	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Tabel 6.3
Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

No	Kab/Kota	Keterangan
1	Payakumbuh	Peraturan Daerah No.15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok
2	Palembang	Peraturan Daerah No. 7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok
3	Bogor	Peraturan Daerah No. 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok Peraturan Walikota No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Bogor No.12 Tahun 2009 tentang KTR Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok
4	Pontianak	Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok
5	Sragen	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok
6	Bukit Tinggi	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok
7	Tangerang	Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok
8	Padang Panjang	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok
9	Tulung Agung	Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok
10	Surabaya	Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok
11	Sidoarjo	Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok
12	Palu	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Daerah

Tabel 6.4
Peraturan Bupati / Instruksi Bupati

No	Kab/Kota	Keterangan
1	Bangli	Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok
2	Bandung	Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2008 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok
3	Lombok Timur	Instruksi Bupati Lombok Timur No. 02 tahun 2004 tentang Pelaksanaan PHBS
4	Bone Bolango	Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Rokok
5	Minahasa Utara	Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2011 tentang Kawasan Dilarang Merokok

Tabel 6.5
Peraturan Walikota

No	Kab/Kota	Keterangan
1	Makassar	Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok
2	Bitung	Peraturan Walikota No. 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok
3	Banda Aceh	Peraturan Walikota No. 47 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok
4	Semarang	Peraturan Walikota No. 12 Tahun 2009 tentang KTR dan KTM
5	Probolinggo	Peraturan Walikota No. 188 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok
6	Cirebon	SK Walikota No. 27A/2006 tentang Perlindungan Masyarakat Bukan Perokok di Kota Cirebon
7	Bengkulu	Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok
8	Samarinda	Peraturan Walikota No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok
9	Bekasi	Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok
10	Surakarta	Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Tabel 6.6
Peraturan Daerah lain yang mengatur kawasan tanpa rokok

No	Daerah	Keterangan
1	Bandung	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan
2	Kalimantan Selatan	Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan

6.3 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri

Pada tahun 2011, Pemerintah telah menetapkan peraturan bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok yang tercantum dalam NOMOR 188/MENKES/PB/I/2011.

Pasal 2

Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/ tempat/ ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Peraturan bersama ini pada dasarnya dibuat dalam upaya untuk meminimalkan paparan asap rokok di masyarakat untuk dapat menurunkan timbulnya gangguan kesehatan akibat asap rokok (baik diantara perokok aktif maupun perokok pasif), serta mengatur peran dan tugas Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok.

6.4 Strategi MPOWER^{2,3}

Guna memperluas perlawanan terhadap epidemi tembakau, World Health Organization menyarankan 6 langkah - langkah pengendalian tembakau dan kematian yang disebut dengan strategi MPOWER.

Monitor Penggunaan Tembakau dan Pencegahannya

Monitor penggunaan tembakau dan dampak yang ditimbulkannya harus diperkuat untuk kepentingan perumusan kebijakan. Saat ini 2/3 negara berkembang di seluruh dunia tidak memiliki data dasar penggunaan tembakau pada anak muda dan orang dewasa. Hampir 2/3 perokok tinggal di 10 negara dan Indonesia menduduki posisi ketiga⁴.

Saat ini Indonesia telah memiliki data dasar penggunaan tembakau untuk remaja dan dewasa secara berkala dalam beberapa survei berbasis masyarakat (SKRT, RISKESDAS, GATS, GYTS, GSPS, dan GSHP) sejak tahun 1995. Survei nasional ini mengalami peningkatan metodologi sehingga bisa dibandingkan secara nasional maupun internasional.

Perlindungan terhadap Asap Tembakau

Asap rokok tidak hanya berbahaya bagi orang yang menghisap rokok tetapi juga orang di sekitarnya (perokok pasif). Lebih dari separuh negara di dunia, dengan populasi mendekati 2/3 penduduk dunia, masih membolehkan merokok di

kantor pemerintah, tempat kerja dan di dalam gedung. Perlindungan terhadap asap tembakau hanya efektif apabila diterapkan Kawasan Tanpa Rokok 100%.

Sampai saat ini, sudah ada tiga provinsi dan 12 kabupaten/ kota yang memiliki Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pelaksanaan lebih menekankan pada penegakan hukum (*law enforcement*). Sebanyak 15 kabupaten/ kota sudah memiliki Peraturan Walikota/ Bupati dan Peraturan Gubernur. Kabupaten dan Kota pada tahap ini masih perlu memperjuangkan Peraturan Daerah melalui DPRD setempat.

Optimalkan Dukungan untuk Berhenti Merokok

Tiga dari 4 perokok di seluruh dunia menyatakan ingin berhenti merokok namun bantuan komprehensif yang tersedia baru dapat menjangkau 5%-nya. Bantuan yang dapat diberikan adalah: 1) Pelayanan konsultasi bantuan berhenti merokok yang terintegrasi di pelayanan kesehatan primer; 2) *Quitline*: Telepon Layanan Bantuan Berhenti Merokok yang mudah diakses dan cuma-cuma; 3) Terapi obat yang murah dengan pengawasan dokter.

Pada tahun 2012, ada tiga provinsi yang sedang dalam uji coba untuk pelayanan konseling berhenti merokok di tingkat Puskesmas, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Lampung. Sejak tahun 2007, pada tingkat pelayanan sekunder dan tersier (BP4 dan RS), sudah dilakukan inisiasi pelayanan berhenti merokok di Klinik *Quitline* FK UGM DI Yogyakarta, BP4 DI Yogyakarta, Klinik Berhenti Merokok FK UNDIP Semarang, RS Persahabatan Jakarta, RS Sahid Suherman Jakarta, dan beberapa klinik yang tersebar di kabupaten/ kota di Indonesia.

Waspadakan Masyarakat akan Bahaya Tembakau

Walaupun sebagian besar perokok tahu bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan, namun kebanyakan dari mereka tidak tahu apa bahayanya. Karena itulah, pesan kesehatan wajib dicantumkan dalam bentuk gambar.

Sesuai Amanat UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 115 sudah dipersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok.

Eliminasi Iklan, Promosi dan Sponsor terkait Tembakau

Pemasaran tembakau memiliki peranan besar dalam meningkatkan gangguan kesehatan dan kematian karena tembakau. Larangan terhadap promosi produk tembakau adalah senjata yang ampuh untuk memerangi tembakau. Sepuluh tahun sejak inisiasi larangan iklan rokok dijalankan, konsumsi rokok di negara dengan larangan iklan turun 9 kali lipat dibandingkan dengan negara tanpa

larangan iklan⁵.

Sedang dilakukan berbagai upaya amandemen dan revisi pada kebijakan yang terkait dengan pelarangan total iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Raih Kenaikan Cukai Tembakau

Dengan menaikkan cukai tembakau, harga rokok menjadi lebih mahal. Hal ini merupakan cara yang paling efektif dalam menurunkan pemakaian tembakau dan mendorong perokok untuk berhenti.

Sejak tahun 2007, Indonesia secara bertahap sudah meningkatkan cukai rokok, dari 42% harga eceran menjadi 51% pada tahun 2012. Diharapkan peningkatan cukai tetap berlangsung sehingga dapat menurunkan konsumsi rokok.

Strategi MPOWER harus dilaksanakan secara keseluruhan untuk mencapai hasil yang efektif.

KESIMPULAN

Berbagai upaya pengendalian konsumsi tembakau telah dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan berbagai sektor terkait baik di tingkat pemerintah maupun non pemerintah. Upaya pengendalian tembakau pada dasarnya memerlukan keterlibatan aktif berbagai pihak baik di sektor kesehatan maupun non-kesehatan.

Sejauh ini Indonesia telah mengembangkan kebijakan-kebijakan terkait konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya dalam bentuk peraturan-peraturan di tingkat nasional maupun daerah dengan mengacu pada kebijakan dan strategi global pengendalian tembakau. Meskipun, sampai saat ini Indonesia masih belum menunjukkan komitmen global pengendalian tembakau yang tertuang dalam *FCTC*, tetapi sudah dapat menunjukkan kemajuan dalam pengendalian tembakau dalam aspek legal maupun intervensi promosi dan pendidikan kesehatan, intervensi berbasis masyarakat dan intervensi perindustrian dan perekonomian.

Sampai dengan tahun 2012 ini pemerintah telah berupaya untuk dapat menerapkan peraturan dan perundangan pengendalian tembakau yang terintegrasi yang tercakup dalam strategi MPOWER meskipun belum secara menyeluruh dan lengkap.

KEPUSTAKAAN

1. Indonesia. Departemen Kesehatan RI. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. *Data tembakau Indonesia data empiris untuk strategi*

pengendalian tembakau nasional. — Jakarta: Departemen Kesehatan, 2004

2. WHO, 'WHO report on the Tobacco Epidemic', 2008
3. WHO, country office for Indonesia, *MPOWER, Upaya Pengendalian Konsumsi Tembakau*
4. Global Tobacco Control Report 2008. *Data merupakan estimasi dari laporan survey yang masuk dari tiap negara.*
5. Saffer H. 'Tobacco Advertising and Promotion'. In: Jha P. Chaloupka FI, eds. *Tobacco Control in Developing Countries*. Oxford, Oxford University Press, 2000.